



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Purworejo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga- Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo.
15. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
24. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
27. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
30. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
31. Sempadan Sungai dan Saluran Irigasi adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai dan saluran irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan saluran irigasi.
32. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
33. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

34. Kawasan Sekitar Bendungan dan Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling bendungan dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi bendungan dan waduk.
35. Kawasan Suaka Pesisir adalah kawasan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
36. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
37. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
38. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
39. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan mangrove yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
40. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
41. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.
42. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang memiliki bentukan geologi yang khas sehingga perlu dilindungi kelestariannya.
43. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
44. Kawasan *Outline* (zona di luar ketentuan) adalah kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang perubahan peruntukan dan fungsinya menjadi kawasan peruntukan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi usaha pertanian.
46. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut KP2B, adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

47. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
48. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
49. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
50. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
51. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
52. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
53. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
54. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kegiatan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan/atau menyediakan jasa industri.
56. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata atau yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
57. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

58. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
60. Kota Perbatasan (*border city*) adalah kota yang berdekatan dengan perbatasan antara dua wilayah yang memiliki tata letak, infrastruktur dan ekonomi berpusat pada bandar udara.
61. Kawasan Strategis Provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
63. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.
64. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
65. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
66. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat KKPR, adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
67. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
68. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
69. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.

70. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
71. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
72. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
73. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
74. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
75. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
76. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
77. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
78. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
79. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
80. Jalan Strategis adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional, provinsi, serta kabupaten atas dasar kriteria strategis berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
81. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
82. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

83. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
84. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
85. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
86. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
87. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

RTRW memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan serta terletak pada posisi $109^{\circ}47'28''$ – $110^{\circ}8'20''$ BT (Bujur Timur) dan $7^{\circ}32'$ – $7^{\circ}54'$ LS (Lintang Selatan).

- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol;
 - c. Kecamatan Purwodadi;
 - d. Kecamatan Bagelen;
 - e. Kecamatan Kaligesing;
 - f. Kecamatan Purworejo;
 - g. Kecamatan Banyuurip;
 - h. Kecamatan Bayan;
 - i. Kecamatan Kutoarjo;
 - j. Kecamatan Butuh;
 - k. Kecamatan Pituruh;
 - l. Kecamatan Kemiri;
 - m. Kecamatan Bruno;
 - n. Kecamatan Gebang;
 - o. Kecamatan Loano; dan
 - p. Kecamatan Bener.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 469 (empat ratus enam puluh sembilan) desa dan 25 (dua puluh lima) kelurahan.
- (4) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.
- (5) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 108.145 (seratus delapan ribu seratus empat puluh lima) hektar.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing bertumpu pada sektor pariwisata, industri dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah;
 - b. pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
 - d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
 - e. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi pusat kegiatan wilayah;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu;
 - c. meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan;
 - d. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan telekomunikasi;
 - e. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan sumber daya air secara terpadu;

- f. meningkatkan cakupan pelayanan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan;
 - g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
 - i. meningkatkan sistem jaringan evakuasi bencana melalui pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana di seluruh kecamatan secara terpadu; dan
 - j. meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.
- (3) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup;
 - b. mengembalikan kondisi Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - c. mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan pengisian kembali;
 - d. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya dan sekitarnya agar selaras dengan karakteristiknya; dan
 - e. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri, dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mengembangkan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku produk lokal pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan (agroindustri);
 - e. mengembangkan kawasan permukiman layak huni;
 - f. melestarikan kawasan hutan produksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem;

- g. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - h. mengembangkan kegiatan pertambangan pada kawasan yang sesuai; dan
 - i. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
 - d. mengarahkan kegiatan tambang di wilayah pertambangan di luar kawasan lindung, pertanian berkelanjutan, permukiman dan kawasan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan tinggi.
- (6) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur; dan
 - b. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* (YIA) dan Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan Perkotaan Purworejo dan kawasan Perkotaan Kutoarjo.
- (3) Kawasan Perkotaan Purworejo dan Kawasan Perkotaan Kutoarjo akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Purworejo-Kutoarjo.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. PPK Grabag;
 - b. PPK Purwodadi;
 - c. PPK Kemiri-Pituruh;
 - d. PPK Bruno;
 - e. PPK Bener; dan
 - f. PPK Banyuasin.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Desa Ngombol di Kecamatan Ngombol;
 - b. Desa Kaligono di Kecamatan Kaligesing;
 - c. Desa Banyuurip di Kecamatan Banyuurip;
 - d. Desa Krandegan di Kecamatan Bayan;
 - e. Desa Butuh di Kecamatan Butuh;
 - f. Desa Brengkol di Kecamatan Pituruh;
 - g. Desa Winong di Kecamatan Kemiri; dan
 - h. Desa Gebang di Kecamatan Gebang.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

- Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri;
 - b. Jalan Kolektor;
 - c. Jalan Lokal;
 - d. Jalan Lingkungan;
 - e. Jalan Tol;
 - f. Jalan Strategis;
 - g. jalan khusus;
 - h. terminal penumpang; dan
 - i. jembatan timbang.
- (2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. pengembangan ruas jalan Watukuro-Jatimalang-Jetis-Wawar di sepanjang pantai selatan melalui Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Ngombol-Kecamatan Grabag;
 - b. pengembangan ruas jalan Prembun-Kutoarjo (batas Kabupaten Kebumen) melalui Kecamatan Butuh-Kecamatan Kutoarjo;
 - c. pengembangan ruas jalan Kutoarjo-BTS. Kota Purworejo melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip;
 - d. pengembangan ruas jalan JLN. Lingkar Selatan Purworejo melalui Kecamatan Banyuurip; dan
 - e. pengembangan ruas jalan JLN. Lingkar Selatan Purworejo-Karangnongko (BTS. Prov. DIY) melalui Kecamatan Banyuurip-Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Bagelen.
- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 1. pengembangan ruas jalan Kutoarjo-Bruno/batas Kabupaten Wonosobo, melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Kemiri-Kecamatan Bruno;

2. pengembangan ruas jalan Maron-Purworejo melalui Kecamatan Loano;
 3. pengembangan ruas jalan Jl. Ir. H. Juanda melalui Kecamatan Purworejo;
 4. pengembangan ruas jalan Maron-Kemiri melalui Kecamatan Loano-Kecamatan Gebang;
 5. pengembangan ruas jalan batas Kabupaten Magelang/Bener-Maroon melalui Kecamatan Bener-Kecamatan Loano;
 6. pengembangan ruas jalan Purworejo-Sibolong/batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kecamatan Purworejo-Kecamatan Kaligesing;
 7. pengembangan ruas jalan Jl. WR Supratman melalui Kecamatan Purworejo;
 8. pengembangan ruas jalan Jl. Imam Bonjol (lingkar utara Purworejo) melalui Kecamatan Purworejo-Kecamatan Gebang;
 9. pengembangan ruas jalan Jl. Pahlawan (lingkar barat Purworejo) melalui Kecamatan Gebang-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip;
 10. pengembangan ruas jalan Kutoarjo-Ketawang, melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Grabag;
 11. pengembangan ruas Karangduwur-Winong;
 12. pengembangan ruas Kemiri-Pituruh;
 13. pengembangan ruas Klepu-Pituruh;
 14. pengembangan ruas Seren-Winong;
- b. Jalan kolektor sekunder, meliputi:
1. pengembangan ruas jalan Jl. A. Yani;
 2. pengembangan ruas jalan Jl. Jend. Gatot Subroto;
 3. pengembangan ruas jalan Jl. Letjend S. Parman;
 4. pengembangan ruas jalan Jl. Mayjend Sutoyo;
 5. pengembangan ruas jalan Jl. Veteran; dan
 6. pengembangan ruas jalan Jl. Merpati (Jl. Kantor Pos dan Stasiun).
- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pengembangan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pembangunan jalan tol Cilacap-Yogyakarta yang melalui Kabupaten Purworejo.

- (7) Jalan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan *Ringroad* (Jalan Lingkar) Timur Kabupaten Purworejo melalui Kecamatan Bagelen-Kecamatan Purworejo-Kecamatan Loano;
 - b. peningkatan ruas jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo-Batas Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. peningkatan ruas jalan Banyuasin-Tridadi-Pucungroto-Batas Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. peningkatan dan pembangunan jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kecamatan Bener) dan/atau Sedayu (Kecamatan Loano);
 - e. pengembangan ruas jalan Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Purwodadi-Bubutan, dan Bubutan-Watukuro;
 - f. pengembangan ruas jalan Bener-Guntur dan Guntur-Ngasinan; dan
 - g. pengembangan ruas jalan Jl. Tentara Pelajar, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Brigjend. Katamso, dan Jl. Urip Sumoharjo.
- (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, meliputi beberapa kawasan antara lain:
- a. perkebunan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. peternakan;
 - e. pertambangan;
 - f. sumber daya air;
 - g. pertahanan dan keamanan;
 - h. industri;
 - i. perdagangan;
 - j. pariwisata;
 - k. perkantoran;
 - l. pendidikan;
 - m. permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
 - n. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A Purworejo di Kecamatan Banyuurip;
 - b. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Purwodadi; dan
 - c. terminal penumpang tipe C di:
 1. Kecamatan Grabag;
 2. Kecamatan Purwodadi;

3. Kecamatan Kaligesing;
4. Kecamatan Purworejo;
5. Kecamatan Kutoarjo;
6. Kecamatan Kemiri;
7. Kecamatan Pituruh; dan
8. Kecamatan Loano.

- (10) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa tempat dan alat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya yang melintas di jalan umum, meliputi:
- a. jembatan timbang pada ruas jalan Prembun (batas Kabupaten Kebumen)–Kutoarjo di Kecamatan Butuh; dan
 - b. jembatan timbang pada jalan arteri primer pada ruas jalan di sisi pantai Selatan di Kecamatan Purwodadi.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten berupa pengembangan jaringan jalur kereta api ganda (*double track*) Jawa Selatan melalui Kecamatan Bagelen–Kecamatan Purwodadi–Kecamatan Banyuurip–Kecamatan Bayan–Kecamatan Kutoarjo–Kecamatan Butuh; dan
 - b. jaringan jalur kereta api dalam Kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan Kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam Kabupaten, berupa jaringan jalur kereta api Purworejo–Kutoarjo, melalui Kecamatan Purworejo–Kecamatan Banyuurip–Kecamatan Bayan–Kecamatan Kutoarjo.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang, meliputi:
 - a. Stasiun Jenar di Kecamatan Purwodadi;
 - b. Stasiun Wojo di Kecamatan Bagelen;
 - c. Stasiun Purworejo di Kecamatan Purworejo;
 - d. Stasiun Montelan di Kecamatan Banyuurip;
 - e. Stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo; dan
 - f. Stasiun Butuh di Kecamatan Butuh.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 14

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan, meliputi:

- a. pipa minyak Cilacap-Yogyakarta I melalui Kecamatan Butuh-Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip-Kecamatan Purwodadi- Kecamatan Bagelen; dan
- b. pipa minyak Cilacap-Yogyakarta II melalui Kecamatan Butuh-Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Grabag-Kecamatan Ngombol-Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Bagelen.

Pasal 15

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan di Kecamatan Bener;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di seluruh kecamatan;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terdapat di:
 1. Kecamatan Grabag;
 2. Kecamatan Ngombol; dan
 3. Kecamatan Purwodadi.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di:
 1. Kecamatan Bagelen;
 2. Kecamatan Kaligesing;
 3. Kecamatan Purworejo;
 4. Kecamatan Pituruh;
 5. Kecamatan Kemiri;
 6. Kecamatan Bruno;
 7. Kecamatan Gebang;
 8. Kecamatan Loano; dan
 9. Kecamatan Bener.

- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol;
 - c. Kecamatan Purwodadi;
 - d. Kecamatan Bagelen; dan
 - e. Kecamatan Butuh.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), meliputi:
 1. Kecamatan Purwodadi;
 2. Kecamatan Bagelen;
 3. Kecamatan Banyuurip;
 4. Kecamatan Bayan;
 5. Kecamatan Kutoarjo;
 6. Kecamatan Butuh;
 7. Kecamatan Pituruh; dan
 8. Kecamatan Kemiri.
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Gardu Induk di Kecamatan Banyuurip.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan tetap lokal, merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan dalam lingkup wilayah Kabupaten, terdapat di seluruh Kecamatan;
 - b. jaringan tetap Saluran Langsung Jarak Jauh (SLJJ), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar daerah di dalam negeri, terdapat di seluruh Kecamatan;

- c. jaringan tetap Saluran Langsung Internasional (SLI), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar negara, terdapat di seluruh Kecamatan;
 - d. jaringan tetap tertutup, merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan kalangan tertentu secara tertutup, meliputi:
 - 1. jaringan tetap tertutup sistem perkeretaapian, terdapat di:
 - a) Kecamatan Purwodadi;
 - b) Kecamatan Bagelen;
 - c) Kecamatan Purworejo;
 - d) Kecamatan Banyuurip;
 - e) Kecamatan Bayan;
 - f) Kecamatan Kutoarjo; dan
 - g) Kecamatan Butuh.
 - 2. jaringan tetap tertutup fiber optik Pemerintah Kabupaten terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan bergerak terestrial, meliputi:
 - 1. jaringan bergerak terestrial radio trunking, terdapat di seluruh kecamatan;
 - 2. jaringan bergerak terestrial Radio Panggil Untuk Umum (RPUU), terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. jaringan bergerak seluler, meliputi:
 - 1. menara telekomunikasi konvensional, terdapat di seluruh kecamatan;
 - 2. menara telekomunikasi monopole, terdapat di seluruh kecamatan;
 - 3. menara telekomunikasi microcell, terdapat di seluruh kecamatan;
 - 4. menara telekomunikasi konvensional bersama, terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - 5. Jaringan layanan internet, terdapat di seluruh kecamatan.
 - c. jaringan bergerak satelit, merupakan jaringan telekomunikasi dengan akses langsung ke satelit, meliputi:
 - 1. jaringan komunikasi satelit di kalangan militer;
 - 2. jaringan komunikasi satelit kedaruratan bencana; dan
 - 3. jaringan komunikasi satelit publik.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.

- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. sumber air lintas kabupaten dari Wilayah Sungai Serayu Bogowonto meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Daerah Aliran Sungai (DAS) Cokroyasan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wawar; dan
 - b. prasarana sumber daya air lintas kabupaten berupa Daerah Irigasi (DI) meliputi:
 1. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pusat berupa Daerah Irigasi (DI) Wadaslintang; dan
 2. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi, meliputi Daerah Irigasi (DI) Watujagir, Daerah Irigasi (DI) Loning Kragilan, dan Daerah Irigasi (DI) Kalibutek.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber air Kabupaten:
 1. air permukaan:
 - a) air permukaan pada sungai tersebar di seluruh kecamatan;
 - b) mata air, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Bagelen;
 - 2) Kecamatan Kaligesing;
 - 3) Kecamatan Purworejo;
 - 4) Kecamatan Pituruh;
 - 5) Kecamatan Kemiri;
 - 6) Kecamatan Bruno;
 - 7) Kecamatan Gebang;
 - 8) Kecamatan Loano; dan
 - 9) Kecamatan Bener.
 - c) Embung, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Grabag;
 - 2) Kecamatan Ngombol;
 - 3) Kecamatan Purwodadi;
 - 4) Kecamatan Bagelen;
 - 5) Kecamatan Kaligesing;
 - 6) Kecamatan Purworejo;
 - 7) Kecamatan Pituruh;
 - 8) Kecamatan Kemiri;
 - 9) Kecamatan Bruno;
 - 10) Kecamatan Gebang;
 - 11) Kecamatan Loano; dan
 - 12) Kecamatan Bener.
 - d) bendung tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - e) pembangunan Waduk atau Bendungan di Kecamatan Bener.
 2. Air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Kebumen-Purworejo, terdapat di:
 - a) Kecamatan Grabag;
 - b) Kecamatan Ngombol;

- c) Kecamatan Purwodadi;
 - d) Kecamatan Bagelen;
 - e) Kecamatan Purworejo;
 - f) Kecamatan Banyuurip;
 - g) Kecamatan Bayan;
 - h) Kecamatan Kutoarjo;
 - i) Kecamatan Butuh;
 - j) Kecamatan Pituruh;
 - k) Kecamatan Kemiri;
 - l) Kecamatan Gebang;
 - m) Kecamatan Loano; dan
 - n) Kecamatan Bener.
- b. prasarana sumber daya air Kabupaten:
1. sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) jaringan irigasi primer Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat berupa Daerah Irigasi (DI) Boro, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Ngombol;
 - 2) Kecamatan Purwodadi;
 - 3) Kecamatan Purworejo; dan
 - 4) Kecamatan Banyuurip.
 - b) jaringan irigasi primer Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat berupa Daerah Irigasi (DI) Kedung Putri, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Ngombol;
 - 2) Kecamatan Purworejo;
 - 3) Kecamatan Banyuurip;
 - 4) Kecamatan Bayan;
 - 5) Kecamatan Gebang; dan
 - 6) Kecamatan Loano.
 - c) jaringan irigasi primer Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Grabag;
 - 2) Kecamatan Ngombol;
 - 3) Kecamatan Purwodadi;
 - 4) Kecamatan Bagelen;
 - 5) Kecamatan Kaligesing;
 - 6) Kecamatan Purworejo;
 - 7) Kecamatan Banyuurip;
 - 8) Kecamatan Bayan;
 - 9) Kecamatan Kutoarjo;
 - 10) Kecamatan Butuh;
 - 11) Kecamatan Pituruh;
 - 12) Kecamatan Kemiri;
 - 13) Kecamatan Gebang;
 - 14) Kecamatan Loano; dan
 - 15) Kecamatan Bener.
 - d) jaringan irigasi sekunder, tersebar di seluruh kecamatan.

2. sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) jaringan pengendalian banjir ,terdapat di:
 - 1) Kecamatan Grabag;
 - 2) Kecamatan Ngombol;
 - 3) Kecamatan Purwodadi;
 - 4) Kecamatan Bagelen;
 - 5) Kecamatan Purworejo;
 - 6) Kecamatan Banyuurip;
 - 7) Kecamatan Bayan;
 - 8) Kecamatan Kutoarjo;
 - 9) Kecamatan Butuh;
 - 10) Kecamatan Kemiri;
 - 11) Kecamatan Pituruh;
 - 12) Kecamatan Gebang; dan
 - 13) Kecamatan Loano.
 - b) bangunan pengendali banjir tersebar di seluruh kecamatan.
3. jaringan air baku untuk air bersih, berupa jaringan air baku terdapat di seluruh kecamatan; dan
4. jaringan air bersih ke kelompok pengguna, berupa jaringan air bersih perusahaan air minum dan bukan perusahaan air minum terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan, meliputi:
 1. jaringan air baku meliputi seluruh kecamatan;
 2. jaringan produksi, meliputi:
 - a) Kecamatan Grabag;
 - b) Kecamatan Ngombol;
 - c) Kecamatan Purwodadi;
 - d) Kecamatan Bagelen;
 - e) Kecamatan Kaligesing;

- f) Kecamatan Purworejo;
 - g) Kecamatan Banyuurip;
 - h) Kecamatan Kutoarjo;
 - i) Kecamatan Butuh;
 - j) Kecamatan Kemiri;
 - k) Kecamatan Bruno; dan
 - l) Kecamatan Bener.
3. jaringan distribusi meliputi seluruh kecamatan; dan
 4. unit pelayanan meliputi seluruh kecamatan.
- b. bukan jaringan perpipaan meliputi:
1. sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan;
 2. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan;
 3. terminal air terdapat di seluruh kecamatan; dan
 4. bangunan penangkap mata air, terdapat di:
 - a) Kecamatan Bagelen;
 - b) Kecamatan Kaligesing;
 - c) Kecamatan Purworejo;
 - d) Kecamatan Pituruh;
 - e) Kecamatan Kemiri;
 - f) Kecamatan Bruno;
 - g) Kecamatan Gebang;
 - h) Kecamatan Loano; dan
 - i) Kecamatan Bener.
- (3) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didukung dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Keburejo dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Bagelen.
- (4) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah non domestik (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di:
 1. Kecamatan Grabag;
 2. Kecamatan Ngombol;
 3. Kecamatan Purwodadi;
 4. Kecamatan Bagelen;
 5. Kecamatan Purworejo;
 6. Kecamatan Banyurip;
 7. Kecamatan Bayan;
 8. Kecamatan Kutoarjo;
 9. Kecamatan Kemiri;
 10. Kecamatan Pituruh;
 11. Kecamatan Bruno;
 12. Kecamatan Gebang;
 13. Kecamatan Loano; dan
 14. Kecamatan Bener.

- b. sistem pembuangan air limbah domestik (*sewerage*), meliputi:
 - 1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (*Offsite System*) terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (*Onsite System*) terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Purworejo;
 - c. Kecamatan Banyuurip; dan
 - d. Kecamatan Loano.
- (6) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh kecamatan; dan
 - c. pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) dengan sistem *sanitary landfill*, meliputi:
 - 1. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Bagelen;
 - 2. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Kemiri; dan
 - 3. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Loano.
- (7) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana yang terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - b. ruang evakuasi bencana yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas:
 - a. Jaringan primer;
 - b. Jaringan sekunder; dan
 - c. Jaringan tersier.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 20

- (1) Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c. Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa suaka pesisir seluas kurang lebih 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hektare, yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Purwodadi.
- (3) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya, terdapat di:
 - a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Bagelen;
 - c. Kecamatan Purworejo;
 - d. Kecamatan Banyuurip;
 - e. Kecamatan Kutoarjo;
 - f. Kecamatan Butuh;
 - g. Kecamatan Gebang;
 - h. Kecamatan Loano; dan
 - i. Kecamatan Bener.
- (4) Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Ngombol; dan
 - b. Kecamatan Purwodadi.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 21

- (1) Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi;
 - b. Kawasan perkebunan rakyat;
 - c. Kawasan Pertanian;
 - d. Kawasan Perikanan;
 - e. Kawasan Pertambangan dan energi;
 - f. Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. Kawasan Pariwisata;
 - h. Kawasan Permukiman; dan
 - i. Kawasan Pertahanan dan keamanan.

- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) hektare meliputi:
 1. Kecamatan Kaligesing;
 2. Kecamatan Pituruh;
 3. Kecamatan Kemiri;
 4. Kecamatan Bruno;
 5. Kecamatan Gebang;
 6. Kecamatan Loano; dan
 7. Kecamatan Bener.
 - b. kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 6.077 (enam ribu tujuh puluh tujuh) hektare meliputi:
 1. Kecamatan Grabag;
 2. Kecamatan Ngombol;
 3. Kecamatan Purwodadi;
 4. Kecamatan Kaligesing;
 5. Kecamatan Pituruh;
 6. Kecamatan Kemiri;
 7. Kecamatan Bruno;
 8. Kecamatan Gebang;
 9. Kecamatan Loano; dan
 10. Kecamatan Bener.
 - c. Kawasan Pariwisata berupa kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang selanjutnya disebut sebagai kawasan hutan produksi terbatas/kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) ditetapkan sebagai Kawasan *Outline*;

- d. Kawasan hutan produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare di Kecamatan Bener; dan
 - e. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 28.214 (dua puluh delapan ribu dua ratus empat belas) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol;
 - c. Kecamatan Purwodadi;
 - d. Kecamatan Bagelen;
 - e. Kecamatan Kaligesing;
 - f. Kecamatan Purworejo;
 - g. Kecamatan Pituruh;
 - h. Kecamatan Kemiri;
 - i. Kecamatan Bruno;
 - j. Kecamatan Gebang;
 - k. Kecamatan Loano; dan
 - l. Kecamatan Bener.
- (4) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 29.785 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang akan ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 29.273 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare;
 - c. Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 9.297 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - d. kawasan peternakan berupa kegiatan dan usaha peternakan terdapat di seluruh kecamatan, meliputi:
 - 1. skala usaha besar;
 - 2. skala usaha menengah;
 - 3. skala usaha kecil; dan
 - 4. skala usaha mikro.
- (5) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Perikanan tangkap berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - b. Kawasan Perikanan budi daya.

- (6) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Kertojayan di Kecamatan Grabag;
 - b. Pelabuhan Perikanan Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pagak di Kecamatan Ngombol;
 - d. Pelabuhan Perikanan Jatikontal di Kecamatan Purwodadi; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan Jatimalang di Kecamatan Purwodadi.
- (7) Tempat pelelangan ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kertojayan di Kecamatan Grabag;
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
 - c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pagak di Kecamatan Ngombol;
 - d. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatikontal di Kecamatan Purwodadi; dan
 - e. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang di Kecamatan Purwodadi.
- (8) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Gebang;
 - b. Kecamatan Loano; dan
 - c. Kecamatan Bener.
- (9) Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektare, berupa wilayah izin usaha pertambangan batuan di Kecamatan Bagelen.
- (10) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektare, meliputi :
- a. kawasan peruntukan industri terdapat di :
 1. Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektare;
 2. Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektare;
 3. Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) hektare;
 4. Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektare;
 5. Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare;
 6. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektare;

7. Kecamatan Loano seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare; dan
 8. Kecamatan Bener seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektare.
- b. sentra industri kecil dan menengah (SIKM) berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang diarahkan di kawasan peruntukan industri (KPI).
- (11) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hektare, terdiri dari:
 1. Pantai Genjik di Kecamatan Grabag;
 2. Pantai Ketawang di Kecamatan Grabag;
 3. Pantai Jetis di Kecamatan Grabag;
 4. Pantai Pasir Puncu di Kecamatan Ngombol;
 5. Pantai Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
 6. Pantai Jatimalang di Kecamatan Purwodadi;
 7. Pantai Jatikontal di Kecamatan Purwodadi;
 8. Desa Wisata Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi;
 9. Goa Seplawan di Kecamatan Kaligesing;
 10. Desa Wisata Sedayu di Kecamatan Loano;
 11. Alun-alun Purworejo di Kecamatan Purworejo;
 12. Taman Heroes Park di Kecamatan Purworejo;
 13. Kolam Renang Artha Tirta di Kecamatan Purworejo;
 14. Gegermenjangan di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Loano;
 15. Taman Pintar Baledono di Kecamatan Purworejo;
 16. Taman Kota Baledono di Kecamatan Purworejo; dan
 17. Alun-alun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo.
 - b. Obyek wisata/Daya Tarik Wisata (DTW), terdiri atas:
 1. Pariwisata alam, meliputi:
 - a) Mangrove Demanggede di Kecamatan Purwodadi;
 - b) Gunung Kunir di Kecamatan Bener;
 - c) Gunung Mangguljoyo di Kecamatan Bener;
 - d) Curug Putri di Kecamatan Bener;
 - e) Bukit Sikepel di Kecamatan Bener;
 - f) Wisata Alam Desa Nglaris di Kecamatan Bener;
 - g) Bukit Watusalang di Kecamatan Bener;
 - h) Bukit Seribu Besek di Kecamatan Bener;
 - i) Pegunungan Banyak Angkrem di Kecamatan Bener;
 - j) Goa Sendangsari di Kecamatan Kaligesing;
 - k) Sumur Tegal Asih di Kecamatan Kaligesing;
 - l) Goa Anjani di Kecamatan Kaligesing;
 - m) Goa Semar di Kecamatan Kaligesing;
 - n) Air Terjun Curug Silangit di Kecamatan Kaligesing;
 - o) Curug Kembar Mayang di Kecamatan Kaligesing;
 - p) Curug Siklothok di Kecamatan Kaligesing;
 - q) Taman Sidandang di Kecamatan Kaligesing;
 - r) Hutan Pinus Kalilo di Kecamatan Kaligesing;

- s) Hutan Pinus Sigendol di Kecamatan Kaligesing;
 - t) Goa Sikantong di Kecamatan Kaligesing;
 - u) Gunung Ijo di Kecamatan Bagelen;
 - v) Area Gardu Pandang Simundu (Arga Pandu) di Kecamatan Bagelen;
 - w) Wisata Alam Desa Kemiri di Kecamatan Gebang;
 - x) Hutan Pinus Tawang Sari di Kecamatan Kaligesing;
 - y) Curug Muncar di Kecamatan Bruno;
 - z) Curug Pengilon di Kecamatan Bruno;
 - aa) Curug Gunung Putri di Kecamatan Bruno;
 - bb) Puncak Kayangan Si Gendol di Kecamatan Bruno;
 - cc) Curug Kyai Kate di Kecamatan Bruno;
 - dd) Goa Silumbu di Kecamatan Kemiri;
 - ee) Goa Gong di Kecamatan Pituruh;
 - ff) Goa Pencu di Kecamatan Pituruh;
 - gg) Wisata Alam Desa Wonosido di Kecamatan Pituruh;
 - hh) Wisata Alam Desa Pamriyan di Kecamatan Pituruh;
 - ii) Gunung Kembang di Kecamatan Pituruh;
 - jj) Curug Jakatarub di Kecamatan Pituruh;
 - kk) Curug Putren dan Pemandian Awet Muda di Kecamatan Pituruh;
 - ll) Curug Kaliurip di Kecamatan Kemiri;
 - mm) Curug Silumut di Kecamatan Kemiri; dan
 - nn) Hutan Pinus Argo Belah di Kecamatan Kemiri.
2. Pariwisata budaya dan religi, meliputi:
- a) Masjid Jenarkidul di Kecamatan Purwodadi;
 - b) Situs Watukuro di Kecamatan Purwodadi;
 - c) Masjid Seboropasar di Kecamatan Ngombol;
 - d) Makam Habib Hasan Bin Muhammad Alaydrus di Kecamatan Grabag;
 - e) Petilasan Pangeran Benowo di Kecamatan Bener;
 - f) Petilasan W.R. Soepratman di Kecamatan Kaligesing;
 - g) Makam/Petilasan Nyai Bagelen di Kecamatan Bagelen;
 - h) Petilasan Masjid Sunan Geseng di Kecamatan Bagelen;
 - i) Masjid Tiban/Masjid Santren Syekh Baidlowi di Kecamatan Bagelen;
 - j) Benteng Pendem di Kecamatan Bagelen;
 - k) Makam Mbah Kyai Haji Yunus Muhammad Irsyad di Kecamatan Loano;
 - l) Petilasan Desa Kemejing di Kecamatan Loano;
 - m) Makam Romo Semono di Kecamatan Loano;
 - n) Makam Gagak Handoko di Kecamatan Loano;
 - o) Makam Cokronegoro di Kecamatan Gebang;
 - p) Makam Kyai Imam Puro di Kecamatan Purworejo;
 - q) Klenteng Purworejo di Kecamatan Purworejo;
 - r) Kantor Asisten Residen di Kecamatan Purworejo;

- s) Gedung Kepolisian Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo;
 - t) Gedung Museum Tosan Aji di Kecamatan Purworejo;
 - u) Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat di Kecamatan Purworejo;
 - v) Gereja Katolik SPM di Kecamatan Purworejo;
 - w) Stasiun Kereta Api Purworejo di Kecamatan Purworejo;
 - x) Gedung HKS 1915 di Kecamatan Purworejo;
 - y) Gedung Lembaga Perasyarakatan Purworejo di Kecamatan Purworejo;
 - z) Masjid Kauman (Darul Mutaqqin) di Kecamatan Purworejo;
 - aa) Makam Sarwo Edhie Wibowo di Kecamatan Purworejo;
 - bb) Gedung Kabupaten Sawunggalih di Kecamatan Kutoarjo;
 - cc) Makam Sawunggalih di Kecamatan Kutoarjo;
 - dd) Stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo;
 - ee) Klenteng Tintakim di Kecamatan Kutoarjo;
 - ff) Makam Eyang Jokowi di Kecamatan Kutoarjo;
 - gg) Makam Mbah Brengos di Kecamatan Kutoarjo;
 - hh) Makam Mbah Unggul di Kecamatan Kutoarjo;
 - ii) Makam Simbah Jogowilogo di Kecamatan Kutoarjo;
 - jj) Makam Mbah Berkah di Kecamatan Bayan;
 - kk) Makam Kyai Patih Dipojoyobongso di Kecamatan Bayan;
 - ll) Petilasan Pangeran Joyokusumo di Kecamatan Banyuurip;
 - mm) Petilasan Kimanguyu di Kecamatan Banyuurip;
 - nn) Makam Kanjeng Kyai Gusti Seborokrapyak di Kecamatan Banyuurip;
 - oo) Altar Kayu Ara Hiwang di Kecamatan Banyuurip;
 - pp) Makam Pangeran Bintoro di Kecamatan Butuh;
 - qq) Makam Kyai Sadrach di Kecamatan Butuh;
 - rr) Makam Kyai Sabdo Palon di Kecamatan Butuh;
 - ss) Makam Mbah Nur Muhammad Alang-Alang Ombo di Kecamatan Pituruh; dan
 - tt) Makam Tuan Guru Muhyidin Imam Rofingi di Kecamatan Kemiri.
3. Pariwisata lainnya, meliputi:
- a) Pasar Inis di Kecamatan Purwodadi;
 - b) Pasar Menoreh di Kecamatan Loano; dan
 - c) Pasar Monggo Mampir di Kecamatan Banyuurip.
- c. Desa Wisata meliputi:
- 1. Desa Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing;
 - 2. Desa Wisata Pucungroto di Kecamatan Kaligesing;
 - 3. Desa Wisata Tlogoguwo di Kecamatan Kaligesing;
 - 4. Desa Wisata Pandanrejo di Kecamatan Kaligesing;
 - 5. Desa Wisata Kaligono di Kecamatan Kaligesing;

6. Desa Wisata Donorejo di Kecamatan Kaligesing;
7. Desa Wisata Sidomulyo di Kecamatan Purworejo;
8. Desa Wisata Semawung di Kecamatan Purworejo;
9. Desa Wisata Kemanukan di Kecamatan Bagelen;
10. Desa Wisata Durensari di Kecamatan Bagelen;
11. Desa Wisata Dadirejo di Kecamatan Bagelen;
12. Desa Wisata Tlogokotes di Kecamatan Bagelen;
13. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Loano;
14. Desa Wisata Sedayu di Kecamatan Loano;
15. Desa Wisata Kemejing di Kecamatan Loano;
16. Desa Wisata Cacaban Kidul di Kecamatan Bener;
17. Desa Wisata Sukowuwuh di Kecamatan Bener;
18. Desa Wisata Jati di Kecamatan Bener;
19. Desa Wisata Benowo di Kecamatan Bener;
20. Desa Wisata Guntur di Kecamatan Bener;
21. Desa Wisata Tlogosono di Kecamatan Gebang;
22. Desa Wisata Kemiri di Kecamatan Gebang;
23. Desa Wisata Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi;
24. Desa Wisata Gedangan di Kecamatan Purwodadi;
25. Desa Wisata Jatimalang di Kecamatan Purwodadi;
26. Desa Wisata Pagak di Kecamatan Ngombol;
27. Desa Wisata Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
28. Desa Wisata Patutreja di Kecamatan Grabag;
29. Desa Wisata Ketawang di Kecamatan Grabag;
30. Desa Wisata Kertojayan di Kecamatan Grabag;
31. Desa Wisata Kaliurip di Kecamatan Kemiri;
32. Desa Wisata Purbayan di Kecamatan Kemiri;
33. Desa Wisata Cepedak di Kecamatan Bruno;
34. Desa Wisata Giyombong di Kecamatan Bruno;
35. Desa Wisata Kaliwungu di Kecamatan Bruno;
36. Desa Wisata Gunung Condong di Kecamatan Bruno;
37. Desa Wisata Pamriyan di Kecamatan Pituruh;
38. Desa Wisata Sambeng di Kecamatan Pituruh;
39. Desa Wisata Kaliwatubumi di Kecamatan Butuh; dan
40. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Kutoarjo.

- (12) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Kawasan Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.654 (sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) hektare, tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. Kawasan Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 18.863 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.
- (13) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare, berupa:
- a. Daerah Latihan Militer Ketawangrejo di Kecamatan Grabag;
 - b. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Ngombol;

- c. Brigade Infanteri-6 Tri Shakti Balajaya Batalyon Infanteri 412 di Kecamatan Purworejo;
- d. Batalyon Infanteri Mekanis Raider 412/Bharata Eka Shakti Kompi Mekanis B di Kecamatan Purworejo;
- e. Gudang Persenjataan di Kecamatan Purworejo;
- f. Komando Distrik Militer 0708/Purworejo di Kecamatan Purworejo;
- g. Kompleks Asrama Polisi dan Eks Kantor Satuan Lalu Lintas Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo;
- h. Sub Detasemen Zeni Bangunan di Kecamatan Purworejo;
- i. Kantor Satuan Lalu Lintas Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo;
- j. Kantor Kepolisian Resor Purworejo di Kecamatan Banyurip;
- k. Lapangan Tembak Besole di Kecamatan Bayan;
- l. Markas Komando Brimob Subden 4C/Pelopor di Kecamatan Kutoarjo;
- m. Kantor Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan; dan
- n. Kantor Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 22

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan sudut kepentingan.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KSP yang berada di wilayah Kabupaten; dan
 - b. KSK.

Pasal 23

- (1) KSP yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu berupa kawasan Borobudur-Kebumen-Dieng dan sekitarnya.
- (2) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* (YIA); dan
 - b. Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.
- (5) Peta Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Kawasan sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), terdapat di:
 - a. Kecamatan Kaligesing;
 - b. Kecamatan Loano; dan
 - c. Kecamatan Bener.
- (2) Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* (YIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Purwodadi; dan
 - b. Kecamatan Bagelen.
- (3) Kawasan sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Purwodadi.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 25

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:
 - a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;

- b. mendukung program utama penetapan ruang nasional dan provinsi;
 - c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah Kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
 - e. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan;
 - f. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
 - g. mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
 - h. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis serta mempertimbangkan ketentuan khusus.
 - (3) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang meliputi program utama, lokasi, besaran, instansi pelaksana, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, beserta perkiraan pendanaannya.
 - (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam indikasi program lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan kerjasama pendanaan.
 - (7) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. ketentuan KKPR;
 - d. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 27

- (1) Ketentuan umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang wilayah; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang wilayah.
- (3) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan budi daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 28

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum zonasi PPL.

- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
 1. prasarana minimum skala Kabupaten meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air bersih;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum skala kabupaten meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perekonomian;
 - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - g) sarana pelayanan umum.
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
 - e. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan kecamatan dan/atau skala layanan kabupaten;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
 - c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
 1. prasarana minimum skala kecamatan meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air bersih;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.

2. sarana minimum skala kecamatan meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perekonomian;
 - f) sarana olahraga; dan
 - g) sarana pelayanan umum.
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
 - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
 - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan lingkungan dan/atau skala layanan kecamatan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan Kawasan agropolitan;
 - c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
 1. prasarana minimum skala lingkungan meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air bersih;
 - c) jaringan energi;
 - d) jaringan telekomunikasi; dan
 - e) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum skala lingkungan meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perekonomian;
 - f) sarana olahraga; dan
 - g) sarana pelayanan umum.
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
 - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
 - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana

Pasal 29

Ketentuan umum zonasi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi.
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 30

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan kereta api.

- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Lokal;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Lingkungan;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk Jalan Tol;
 - f. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan strategis;
 - g. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan khusus;
 - h. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - i. ketentuan umum zonasi untuk jembatan timbang.

- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan arteri sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jalan kolektor primer dan kolektor sekunder disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;

- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan kolektor sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; dan
 - e. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (7) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pengawasan jalan berupa bangunan gedung dan bangun bangunan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - f. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan tol sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - g. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;

- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
 - e. diperbolehkan bersyarat penggunaan jalan khusus untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang;
 - c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan; dan
 - d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya.
- (11) Ketentuan umum zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar jembatan timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
 - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang di sekitar jembatan timbang untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara jembatan timbang sesuai kewenangannya.
- (12) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;

- c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan sesuai peruntukan kawasan dengan intensitas rendah hingga sedang, mematuhi aturan garis sempadan, memperhatikan dampak lingkungan, dan memperhatikan kebutuhan ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan, dan pengembangan jaringan jalur kereta api;
- d. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika serta harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan prasarana dan utilitas;
- e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pembangunan perlintasan sebidang atau perlintasan tidak sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- f. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin pemerintah dan/atau instansi berwenang yang menanganinya; dan
- g. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian serta kegiatan yang peka terhadap lalu lintas kereta api.

Pasal 31

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) dengan mempertimbangkan keselamatan, jangkauan pelayanan, dan lingkungan hidup;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;

- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;
 - g. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
 - h. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. pengaman jaringan; dan
 - 2. papan peringatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik;
 - b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkitan tenaga listrik.
- (5) Ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung energi ketenagalistrikan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - c. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
 - d. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk pemanfaatan ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan gardu induk.

Pasal 32

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan jaringan telekomunikasi kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
- c. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- d. diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan menara telekomunikasi konvensional dan menara telekomunikasi konvensional bersama di kawasan permukiman perkotaan;
- e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi untuk kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
- f. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan;
- g. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. pengaman jaringan; dan
 2. papan peringatan.
- h. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya.

Pasal 33

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan yang mendukung pelestarian sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan budidaya sesuai peruntukan dengan mematuhi garis sempadan, menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan;

- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di badan air untuk jaringan irigasi, pengendali banjir, jaringan air baku, wisata air, pertambangan, perikanan, dan ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air;
- d. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas;
- e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang memiliki fungsi lindung di sekitar jaringan sumber daya air;
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas badan air kecuali untuk peningkatan pengelolaan prasarana sumber daya air;
- g. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
- h. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pengendali daya rusak air.

Pasal 34

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
 - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan air minum untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan sumber air minum;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan instalasi pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku;
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan;

- f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber air minum harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan sumber air minum; dan
 - g. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan sumber air minum harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan limbah;
 - b. diperbolehkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan limbah;
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan;
 - f. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
 - g. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan limbah;
 - h. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya; dan
 - i. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah;

- b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan sampah;
 - c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan persampahan untuk pembangunan permukiman dan kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang;
 - f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pembatas atau pengaman Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan lingkungan di sekitarnya; dan
 - g. pemanfaatan ruang untuk penempatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. jalur evakuasi bencana:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan jalur evakuasi bencana;
 2. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang manfaat jalan (rumaja) jalur evakuasi bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
 3. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah hingga sedang; dan
 4. pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi.
 - b. ruang evakuasi bencana:
 1. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar ruang evakuasi bencana untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pengungsi;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang evakuasi bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi ruang evakuasi bencana;
 3. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;

4. pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi harus didukung dengan tersedianya:
 - a) prasarana minimum:
 - 1) jaringan transportasi;
 - 2) jaringan air bersih;
 - 3) jaringan energi;
 - 4) jaringan telekomunikasi; dan
 - 5) prasarana lingkungan;
 - b) sarana minimum:
 - 1) sarana barak pengungsian;
 - 2) sarana kesehatan;
 - 3) sarana pendidikan; dan
 - 4) sarana peribadatan.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase;
 - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak sistem drainase.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 35

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem mangrove.

Pasal 36

Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, berupa kawasan suaka pesisir disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan untuk perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi pesisir, pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi, monitoring sumberdaya, serta rehabilitasi habitat dan populasi;

- b. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi, pertahanan dan keamanan, perikanan, kegiatan peternakan, dan usaha peternakan skala mikro hingga kecil secara berkelanjutan tanpa mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
- c. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pertanian, permukiman nelayan atau petani dengan kepadatan rendah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak kelestarian alam berupa kegiatan pertambangan, industri, dan budi daya perikanan dengan mengambil air bawah tanah.

Pasal 37

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kepentingan sosial, kegiatan pelayanan umum, perdagangan, jasa, kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, perkantoran, agama dan kebudayaan, peribadatan, pariwisata dan/atau pertahanan keamanan dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya;
- b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan sekitarnya;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya; dan
- d. pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 38

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, jaringan energi, serta perhubungan dan telekomunikasi;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem mangrove, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta usaha-usaha yang berkaitan dengan ekosistem mangrove dengan mempertimbangkan fungsi lindung, nilai ekologis dan estetika kawasan;

- c. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, serta tradisi dan kebiasaan;
- d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu fungsi lindung;
- e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan tidak mendirikan bangunan permanen komersial;
- f. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
- g. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan budi daya.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 39

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 40

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan kegiatan pada lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumber daya lahan;
 2. peningkatan produktivitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditas berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 3. pengembangan hasil hutan non kayu dan tanaman hortikultura dengan produk non kayu; dan

4. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- b. diperbolehkan pemanfaatan hutan secara terbatas dan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, tidak mengubah bentang alam serta sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- d. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan budi daya di kawasan hutan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;
- f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya:
 1. tanaman semusim pada hutan produksi dengan kelerengan di atas 40% (empat puluh persen); dan
 2. pendirian bangunan kecuali bangunan penunjang kegiatan hutan produksi, bangunan pendukung kegiatan pariwisata dan bangunan prasarana dasar yang tidak mengubah bentang alam; dan
- g. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 41

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan perkebunan untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan perkebunan rakyat, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan;
- b. pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan perkebunan secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumber daya lahan;
- c. diperbolehkan untuk kegiatan agroindustri dan agrowisata serta sarana dan prasarana pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
- d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk pengembangan kegiatan permukiman pedesaan;

- e. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan dan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan;
- f. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
- g. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan kegiatan pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana;
- h. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan perkebunan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan pengendalian bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
- j. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH paling rendah 60% (enam puluh persen).

Pasal 42

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. untuk Kawasan Tanaman Pangan:
 - 1. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - a) pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
 - b) pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah.
 - 2. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kawasan tanaman pangan di luar KP2B:
 - a) pengembangan kegiatan perikanan dan usaha peternakan skala mikro hingga kecil dengan berwawasan lingkungan dengan tidak mengubah fungsi kawasan;
 - b) pengembangan kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung fungsi kawasan;
 - c) pengembangan kegiatan pembibitan tanaman;
 - d) alih fungsi kawasan tanaman pangan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan tidak menyebabkan hilang atau rusaknya jaringan irigasi serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;

- e) intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut.
 - 1) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - 2) KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam); dan
 - 3) KDH paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
- 3. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan tanaman pangan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk Kawasan Hortikultura:
 - 1. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - a) pengembangan produksi komoditas andalan/ unggulan Kabupaten; dan
 - b) peningkatan produktivitas tanaman hortikultura.
 - 2. diperbolehkan secara terbatas untuk:
 - a) pengembangan kegiatan pembibitan;
 - b) pengembangan budi daya tanaman perkebunan rakyat dan tanaman pangan;
 - c) pengembangan kegiatan permukiman;
 - d) pengembangan kegiatan industri kecil;
 - e) pengembangan pariwisata pada daerah yang sesuai;
 - f) pengembangan kegiatan terkait dengan pencegahan bencana;
 - g) pengembangan kegiatan perikanan berkelanjutan; dan
 - h) pengembangan kegiatan dan usaha peternakan berkelanjutan.
 - 3. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
 - 4. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan kegiatan pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana;
 - 5. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan hortikultura untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) KDB paling tinggi 45% (empat puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
 - c) KDH paling rendah 55% (lima puluh lima persen).
- c. untuk Kawasan Peternakan:
 - 1. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - a) pengembangan kegiatan pertanian;
 - b) pengembangan produksi komoditas andalan/ unggulan daerah;

- c) pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan;
 - d) mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan; dan
 - e) pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna;
2. diperbolehkan secara terbatas untuk:
 - a) pengembangan kegiatan permukiman skala kecil;
 - b) pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil ternak;
 - c) pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah;
 - d) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - e) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 3. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan peternakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti pengaturan intensitas pemanfaatan ruang pada masing-masing pola ruang yang mewadahi usaha peternakan.

Pasal 43

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan tangkap dan budidaya;
- b. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan Waduk;
- c. diperbolehkan pengembangan Kawasan Perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- d. diperbolehkan bersyarat bangunan pendukung kegiatan pariwisata;
- e. diperbolehkan bersyarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;
- f. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Perikanan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan; dan
- h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 1 (satu); dan
 3. KDH paling rendah 40% (empat puluh persen).

Pasal 44

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dengan syarat mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara risiko dan manfaat, tidak berpotensi menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta melakukan rehabilitasi kawasan pascatambang;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan pada kawasan hutan mengikuti mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- c. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Pertambangan dan energi untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan pada kawasan lindung;
- e. pengelolaan lingkungan hidup dan pascatambang dilakukan dengan:
 1. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup; dan
 2. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. pengelolaan kawasan pascatambang dilakukan melalui kegiatan reklamasi berupa penatagunaan lahan, revegetasi dan/atau peruntukan lainnya mengacu pada dokumen rencana reklamasi yang disetujui oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. intensitas pemanfaatan ruang pascatambang dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang.

Pasal 45

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri dan penduduknya dengan sarana dan prasarana pengolah limbah yang layak, mengendalikan dampak terhadap lingkungan, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan ruang terbuka hijau (RTH);
- c. diperbolehkan terbatas untuk permukiman eksisting dengan mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

- d. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. diperbolehkan bersyarat pembangunan kegiatan usaha industri secara individu berada di kawasan peruntukan industri selama belum ada kawasan industri dengan dilengkapi syarat mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- g. diperbolehkan bersyarat bagi pengembangan prasarana dan sarana penunjang industri dengan mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- h. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan peruntukan industri untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak diperbolehkan mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan;
- j. tidak diperbolehkan pengambilan air bawah tanah; dan
- k. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).

Pasal 46

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
 1. prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan limbah;
 - d) jaringan energi;
 - e) jaringan telekomunikasi; dan
 - f) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perdagangan dan jasa;
 - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - g) sarana pelayanan umum;

- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan pariwisata alam maupun budaya dengan tetap mempertahankan keaslian lingkungan alam dan kearifan budaya setempat;
- d. diperbolehkan bersyarat pengembangan pariwisata buatan dengan luasan lebih dari 100 (seratus) hektar mengikuti standar teknis dan ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan pariwisata untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak fungsi dan kelestarian lingkungan Kawasan Pariwisata;
- g. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata mengacu pada kawasan peruntukan; dan
- h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. pariwisata alam di daerah pantai dan dataran rendah, meliputi:
 - a) KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 1 (satu); dan
 - c) KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. pariwisata alam di daerah dataran tinggi, meliputi:
 - a) KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - c) KDH paling rendah 80% (delapan puluh persen);
 - 3. pariwisata buatan dan budaya di daerah dataran rendah, meliputi:
 - a) KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
 - c) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen);
 - 4. Pariwisata buatan dan budaya di daerah dataran tinggi, meliputi:
 - a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam); dan
 - c) KDH paling rendah 60% (enam puluh persen).

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk pembangunan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang serta di luar Kawasan Lindung dan KP2B;

- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
 1. prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan limbah;
 - d) jaringan energi;
 - e) jaringan telekomunikasi; dan
 - f) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perdagangan dan jasa;
 - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - g) sarana pelayanan umum;
- c. diperbolehkan secara terbatas bagi industri besar dan menengah eksisting sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak dapat melakukan perluasan;
- d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk:
 1. pengembangan kegiatan usaha industri kecil;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. pengembangan kegiatan pariwisata dan usaha pariwisata;
 4. pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skala pelayanan sistem perkotaan;
 6. pembangunan menara telekomunikasi konvensional dan menara telekomunikasi konvensional bersama; dan
 7. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
- e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan permukiman untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
- g. kegiatan industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah dan besar harus berpindah ke Kawasan Peruntukan Industri; dan
- h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 70%(tujuh puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 30%(tiga puluh persen).

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk pembangunan permukiman dengan syarat di luar Kawasan Lindung dan KP2B;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
 1. prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan air limbah;
 - d) jaringan energi;
 - e) jaringan telekomunikasi; dan
 - f) prasarana lingkungan.
 2. sarana minimum meliputi:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perdagangan; dan
 - f) sarana pelayanan umum;
 - c. diperbolehkan secara terbatas bagi industri besar dan menengah eksisting sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak dapat melakukan perluasan;
 - d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk:
 1. pengembangan kegiatan industri kecil;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
 4. pengembangan usaha peternakan skala mikro hingga kecil dan usaha perikanan secara berkelanjutan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
 5. pengembangan kegiatan pariwisata dan usaha pariwisata;
 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skala pelayanan sistem perkotaan; dan
 7. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
 - e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Permukiman untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;

- g. industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah dan besar harus berpindah ke Kawasan Peruntukan Industri; dan
- h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman perdesaan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 65% (enam puluh lima persen);
 2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf i, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya secara selektif sesuai fungsi kawasan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada disekitarnya;
 - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan; dan
 - f. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB paling tinggi 3 (tiga); dan
 3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).

Bagian Ketiga Ketentuan khusus

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang memerlukan ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus KP2B;
 - c. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
 - d. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
 - c. kegiatan budidaya terbangun yang berada di Kawasan rawan bencana harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang menangani kebencanaan.
- (4) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengurangi luasan KP2B serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - c. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan tanaman pangan yang merupakan KP2B, kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya terbangun dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 2. menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; dan/atau
 3. menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan resapan air yang memiliki bentang alam karst;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuan air atau fungsi peresapan air; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari mata air.

- (6) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas disusun dengan ketentuan:
 1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan berdasarkan jarak dari ujung strip landas pacu sebagai berikut;
 - a) bagian pertama ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu (tinggi landas pacu 7,4 (tujuh koma empat) meter dari ketinggian muka air laut rata-rata/MSL);
 - b) bagian kedua ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian pertama sampai jarak mendatar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 - c) bagian ketiga ditentukan dengan kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari bagian kedua sampai jarak mendatar 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter dari ketinggian landas pacu;
 - d) bagian keempat pada bagian tengah ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, batas ketinggian 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, pada bagian tepi ditentukan dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 (seribu) meter serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter; dan
 - e) bagian kelima (terakhir) ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian keempat sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter, batas ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;

2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
4. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
5. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
6. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
7. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
8. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
9. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan disusun dengan ketentuan:
 1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendarat 3.000 (tiga ribu) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;

2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
4. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau gudang kimia berbahaya, jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
6. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- c. Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam disusun dengan ketentuan:
1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan adalah 16 (enam belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 4. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 5. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 6. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 7. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 8. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 9. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- d. Kawasan di bawah Permukaan Kerucut disusun dengan ketentuan :
1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan oleh kemiringan 5% dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam sampai Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
 3. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 4. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 6. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- e. Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar disusun dengan ketentuan:
1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan adalah 145 (seratus empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;
 2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
 3. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 4. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 6. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - a) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 - b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- (7) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Sempadan pantai, disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan serta perhubungan dan komunikasi;
 3. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 4. diperbolehkan secara terbatas untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, dengan ketentuan pemanfaatan ruang pantai tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) panjang pantai atau sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 5. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen komersial;
 6. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 7. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan budi daya;
 8. tidak diperbolehkan untuk semua jenis usaha peternakan; dan
 9. pemanfaatan ruang di dalam kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan sumberdaya air; dan
 - d) jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. Sempadan sungai, disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan, ruang terbuka hijau (RTH), konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;

2. diperbolehkan untuk tempat perkemahan dan papan informasi;
 3. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai;
 4. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari sungai;
 5. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambah luasan;
 6. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
 7. tidak diperbolehkan pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 8. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 9. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan.
- c. Kawasan sekitar bendungan atau waduk, disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas budaya dan keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta perikanan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi Bendungan atau Waduk;
 2. diperbolehkan bersyarat untuk budi daya tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon, pertanian, perikanan atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber air Bendungan atau Waduk dengan tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan, dan/atau mencemari air, kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

3. diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang tidak mengganggu fungsi bendungan atau Waduk dan fungsi kawasan sekitar Bendungan atau Waduk sebagai kawasan perlindungan setempat dan serta kualitas lingkungan di kawasan sekitar Bendungan atau Waduk;
 4. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan termasuk mendirikan bangunan, kecuali:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 - c) jalur pipa migas dan air minum;
 - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - f) prasarana dan sarana sanitasi;
 - g) bangunan ketenagalistrikan; dan
 - h) pertahanan dan keamanan;
 5. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi Bendungan atau Waduk, membuang limbah, menggembala ternak, serta mengubah aliran air masuk dan ke luar bendungan atau Waduk; dan
 6. pemanfaatan ruang pada daerah genangan Waduk dan daerah sempadan Waduk hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah Bendungan atau Waduk yang bersangkutan.
- d. Sempadan mata air, disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, penanaman tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan/atau tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
 2. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan permukiman dengan ketentuan tidak melakukan pembangunan dan pengembangan bangunan yang sudah ada;
 3. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;

4. diperbolehkan bersyarat untuk pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata air dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mencemari air dan/atau mengganggu fungsi kawasan;
5. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan mata air sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambah luasan; dan
6. tidak diperbolehkan kegiatan pengambilan air bawah tanah.

Bagian Keempat
Ketentuan KKPR

Pasal 50

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diterbitkan pemerintah daerah dalam bentuk:
 - a. Konfirmasi KKPR; atau
 - b. Persetujuan KKPR.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan terhadap kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- (3) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan terhadap kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang didasarkan pada kajian rencana tata ruang di atasnya dan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (5) Penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KKPR harus dimiliki sebelum pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) KKPR yang diterbitkan dan/atau tidak diperoleh dengan melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (8) KKPR yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 51

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

- (4) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (4) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Arahan Sanksi

Pasal 55

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. pihak yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW; dan
 - c. pihak yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan :
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

- (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten.

- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 57

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 58

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 60

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 61

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 62

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 64

- (1) Partisipasi masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 65

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 66

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 68

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berupa bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Untuk operasionalisasi tata ruang di kawasan perkotaan dan kawasan strategis, maka disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan tema ekonomi;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur dengan tema sosial budaya;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan (*border city*) sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* dengan tema lingkungan hidup;
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag dengan tema lingkungan hidup;
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bener dan Sekitar Bendungan Bener dengan tema sosial budaya;
 - f. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Grabag dengan tema lingkungan hidup;
 - g. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kemiri-Pituruh dengan tema ekonomi; dan
 - h. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bruno dengan tema ekonomi.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang dalam pemanfaatan ruang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, huruf b atau huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 72

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan dapat diperpanjang;
 - b. izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. izin yang mempunyai batas waktu, tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin, dengan ketentuan apabila izin akan diperpanjang harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. izin yang tidak mempunyai batas waktu, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
 - c. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27 Seri E Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 37 Seri E Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.

Pembina TK.I

NIP 19650905 199101 1 004

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2021

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 13 SERI E NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 10 – 133/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Kabupaten Purworejo sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di sebelah utara, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Purworejo kurang lebih 108.145 (seratus delapan ribu seratus empat puluh lima) hektare dan dapat dibedakan menjadi daerah dataran di bagian selatan dan daerah perbukitan hingga pegunungan di bagian utara dan timur.

Perkembangan situasi dan kondisi daerah, khususnya di Kabupaten Purworejo menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Purworejo, merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan direvisi. Revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 disamping sebagai pemenuhan terhadap amanat Undang-undang,

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada dasarnya merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya beberapa faktor pendorong yaitu:

- a. produk RTRW Kabupaten Purworejo yang telah dibuat, dari sisi substansi masih kurang sesuai dengan kebutuhan untuk penataan ruang terutama dalam memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. adanya perkembangan/dinamika penggunaan lahan yang sebagian sudah menyimpang dari ketentuan tata ruang sehingga mengharuskan adanya penyesuaian terhadap penataan ruang;
- c. adanya beberapa proyek Strategis Nasional di wilayah dan sekitar wilayah Kabupaten Purworejo yang berpengaruh besar terhadap penggunaan ruang dan perlu diatur dalam RTRW Kabupaten;
- d. adanya perubahan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di Daerah yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar.

Pada dasarnya penataan ruang ini sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Purworejo agar dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan kembali perencanaan penataan ruang merupakan upaya revisi untuk menyusun ulang rencana tata ruang Kabupaten agar rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.

RTRW merupakan rencana yang mendasari proses penataan ruang selanjutnya di wilayah kabupaten. RTRW memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas administrasi kecamatan dalam peta masih bersifat indikatif.

Ayat (3)

Batas administrasi desa dan kelurahan dalam peta masih bersifat indikatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Luas wilayah administrasi Kabupaten berdasarkan pada:

1. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kebumen sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 81 tahun 2013;
2. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Wonosobo sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 7 tahun 2012;
3. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Magelang sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 15 tahun 2013;
4. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Berita Acara nomor 56/BAD II/XI/2020 tanggal 27 November 2020 perihal kesepakatan terhadap draft permendagri dan penarikan garis batas;
5. batas daerah segmen pertigaan antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Berita Acara nomor 14/BADII/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Kesepakatan Batas Daerah Segmen Pertigaan Kabupaten Purworejo-Magelang-Kulon Progo.
6. garis pantai berdasarkan data KSP (Kebijakan Satu Peta) tahun 2017.

Pasal 4

- Yang dimaksud dengan “aman” adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

- Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Purworejo-Kutoarjo merupakan aglomerasi Perkotaan Purworejo dan Perkotaan Kutoarjo, meliputi

- a. Kecamatan Purworejo;
- b. Kecamatan Banyuurip;
- c. Kecamatan Bayan;
- d. Kecamatan Kutoarjo;
- e. Kecamatan Gebang; dan
- f. Kecamatan Loano.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Grabag, meliputi:

- a. Kecamatan Grabag;
- b. Kecamatan Bayan; dan
- c. Kecamatan Kutoarjo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Purwodadi, meliputi:

- a. Kecamatan Purwodadi; dan
- b. Kecamatan Bagelen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kemiri-Pituruh, meliputi:

- a. Kecamatan Kutoarjo;
- b. Kecamatan Kemiri; dan
- c. Kecamatan Pituruh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Bener, meliputi:

- a. Kecamatan Gebang;
- b. Kecamatan Loano; dan
- c. Kecamatan Bener.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Banyuasin, meliputi:

- a. Kecamatan Kaligesing;
- b. Kecamatan Loano; dan
- c. Kecamatan Bener.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)” adalah pusat pelayanan diluar PPK dan PKL yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Ringroad (Jalan Lingkar) Timur Kabupaten Purworejo melalui Kecamatan Bagelen-Kecamatan Purworejo–Kecamatan Loano berfungsi sebagai jalan kolektor primer.

Huruf b

Ruas jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo-Batas Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai jalan lokal primer.

Huruf c

Ruas jalan Banyuasin - Tridadi -Pucungroto - Batas Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai jalan lokal primer.

Huruf d

Jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kecamatan Bener) dan/atau Sedayu (Kecamatan Loano) berfungsi sebagai jalan lokal primer.

Huruf e

Ruas jalan Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Purwodadi-Bubutan, dan Bubutan-Watukuro berfungsi sebagai jalan kolektor primer.

Huruf f

Ruas jalan Bener-Guntur dan Guntur-Ngasinan berfungsi sebagai jalan lokal primer.

Huruf g

Ruas jalan Jl. Tentara Pelajar, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Brigjend. Katamso, dan Jl. Urip Sumoharjo berfungsi sebagai jalan kolektor sekunder.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan lokasi rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan lokasi rencana transmisi tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (5)

Penetapan lokasi rencana distribusi tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “radio trunking” adalah radio yang berbasis repeater untuk satu atau lebih menara dengan menggunakan lebih dari satu frekuensi sehingga pengguna dapat memiliki saluran tersendiri untuk melakukan komunikasi dalam satu grup.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “radio panggil” adalah alat komunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi konvensional” adalah bangunan menara dengan ketinggian lebih dari 20 m (duapuluh meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan, berbentuk rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi Monopole” adalah bangunan Menara dengan ketinggian lebih dari 18 m (delapan belas meter) sampai dengan 36 m (tiga puluhan meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi Microcell” adalah bangunan Menara dengan ketinggian maksimal 18 m (delapanbelas meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah, berbentuk tiang tunggal yang terhubung dengan kabel fiber optik.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “bangunan pengendali banjir” adalah bangunan yang berfungsi menahan atau mengendalikan banjir. Bangunan pengendali banjir berupa embung, bendung, bendungan atau waduk, dan bangunan pengendali banjir lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penetapan lokasi rencana sisten pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan lokasi rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (6)

Penetapan lokasi rencana sistem jaringan persampahan wilayah dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (7)

Penetapan lokasi rencana sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Rencana pengelolaan Kawasan Peruntukan Lindung meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi Kawasan Budi Daya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud “kawasan perkebunan rakyat” adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud “kawasan pertanian” adalah wilayah budi daya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut/non pasang surut, dan/atau lahan tidak beririgasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “kawasan pertambangan dan energi” adalah wilayah usaha pertambangan (WUP) yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud “hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf c

Kawasan hutan produksi yang merupakan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

Huruf d

- Delineasi kawasan hutan produksi terbatas/Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) masih bersifat indikatif. Selanjutnya untuk delineasi definitif mengacu pada hasil pengukuran.
- Berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur yang diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektare.
- Berdasarkan pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.645/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Persetujuan Prinsip TMKH untuk Kawasan Pariwisata atas nama Badan Otorita Borobudur di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, kawasan yang disetujui untuk dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk kawasan pariwisata pada kawasan hutan produksi terbatas Petak 99 o dan 99 t, RPH Loano, BPKH Purworejo, KPH Kedu Selatan, Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pertambangan” adalah kegiatan pertambangan batuan. Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di:

2. Kecamatan Bagelen;
3. Kecamatan Kaligesing;
4. Kecamatan Purworejo;
5. Kecamatan Banyuurip;
6. Kecamatan Pituruh;
7. Kecamatan Kemiri;
8. Kecamatan Bruno;
9. Kecamatan Gebang;
10. Kecamatan Loano; dan
11. Kecamatan Bener.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).

Angka 4
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “agroindustri yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan industri yang memanfaatkan atau memproses bahan baku dari hasil pertanian secara luas seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut meliputi industri hulu hingga hilir dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan “agrowisata yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian secara luas baik dari sisi kawasan, komoditas, maupun aktivitas kegiatannya dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan dan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan dan usaha peternakan dengan menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.

Huruf f

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi. Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi:

1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag;
2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh;
3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri;
4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan
5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener.

Huruf g

- Yang dimaksud dengan “mineral logam” adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, terdapat di Kecamatan Bagelen.
- Yang dimaksud dengan “mineral bukan logam” adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonite, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, terdapat di:
 1. Kecamatan Bagelen;
 2. Kecamatan Kaligesing;
 3. Kecamatan Purworejo;
 4. Kecamatan Pituruh;
 5. Kecamatan Kemiri;
 6. Kecamatan Bruno;
 7. Kecamatan Gebang;
 8. Kecamatan Loano; dan
 9. Kecamatan Bener.
- Yang dimaksud dengan “batuan” adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*). Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di:
 1. Kecamatan Bagelen;
 2. Kecamatan Kaligesing;
 3. Kecamatan Purworejo;
 4. Kecamatan Banyuurip;
 5. Kecamatan Pituruh;
 6. Kecamatan Kemiri;
 7. Kecamatan Bruno;
 8. Kecamatan Gebang;
 9. Kecamatan Loano; dan
 10. Kecamatan Bener.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

- Yang dimaksud dengan “kegiatan perikanan dan peternakan berwawasan lingkungan” adalah kegiatan perikanan dan peternakan dengan menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan “tidak mengubah fungsi kawasan” adalah kegiatan perikanan dan peternakan yang tidak menyebabkan berubahnya fungsi kawasan sebagai kawasan tanaman pangan, seperti pembangunan kandang tidak diperbolehkan menggunakan konstruksi permanen.

Huruf b)

- Yang dimaksud “agroindustri yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan agroindustri yang mendukung kegiatan usaha tanaman pangan seperti penggilingan padi, lantai jemur, gudang gabah, dan sejenisnya sesuai standar pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.
- Yang dimaksud kegiatan “agrowisata yang berwawasan lingkungan” adalah kegiatan agrowisata dengan menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan “mendukung fungsi kawasan” adalah kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kegiatan pertanian tanaman pangan dan fungsi kawasan tanaman pangan.

Huruf c)
Cukup jelas.

Huruf d)
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi.

Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi:

1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag;
2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh;
3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri;
4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan
5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener.

Angka 4
- Yang dimaksud dengan “mineral logam” adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, terdapat di Kecamatan Bagelen.

- Yang dimaksud dengan “mineral bukan logam” adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonite, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, terdapat di:

1. Kecamatan Bagelen;
2. Kecamatan Kaligesing;
3. Kecamatan Purworejo;
4. Kecamatan Pituruh;

5. Kecamatan Kemiri;
 6. Kecamatan Bruno;
 7. Kecamatan Gebang;
 8. Kecamatan Loano; dan
 9. Kecamatan Bener.
- Yang dimaksud dengan “batuan” adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*). Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di:
1. Kecamatan Bagelen;
 2. Kecamatan Kaligesing;
 3. Kecamatan Purworejo;
 4. Kecamatan Banyuurip;
 5. Kecamatan Pituruh;
 6. Kecamatan Kemiri;
 7. Kecamatan Bruno;
 8. Kecamatan Gebang;
 9. Kecamatan Loano; dan
 10. Kecamatan Bener.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peruntukan lainnya” terdiri atas:

- a) area permukiman;
- b) pariwisata;
- c) sumber air; atau
- d) area pembudidayaan.

Huruf g

- Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permukiman eksisting” adalah permukiman penduduk yang telah ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi Kawasan Peruntukan Industri.

Huruf d

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana penunjang industri” meliputi perumahan/permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “industri besar dan menengah eksisting” yakni:
 1. Kegiatan usaha industri yang masih beroperasi atau menjalankan usaha; atau
 2. Kegiatan usaha industri sudah tidak beroperasi, namun tempat kegiatan usahanya belum dialihfungsikan untuk kegiatan lain.
- Yang dimaksud dengan “tidak dapat melakukan perluasan” yakni kegiatan usaha industri tidak diperbolehkan untuk melakukan perluasan lokasi industri.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata” adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi.

Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi:

1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag;
2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh;
3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri;

4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan
5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “industri besar dan menengah eksisting” adalah:
 1. Kegiatan usaha industri yang masih beroperasi atau menjalankan usaha; atau
 2. Kegiatan usaha industri sudah tidak beroperasi, namun tempat kegiatan usahanya belum dialihfungsikan untuk kegiatan lain.
- Yang dimaksud dengan “tidak dapat melakukan perluasan” adalah kegiatan usaha industri tidak diperbolehkan untuk melakukan perluasan lokasi industri.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata” adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “intensitas rendah” adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kawasan operasi keselamatan penerbangan (KKOP) mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1994 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah daratan sepanjang tepian sungai dengan jarak:

1. 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
3. 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
4. 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
5. 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
6. 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
7. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk budi daya pertanian” adalah budi daya pertanian untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar bendungan atau waduk” adalah daratan yang mengelilingi waduk, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sempadan mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

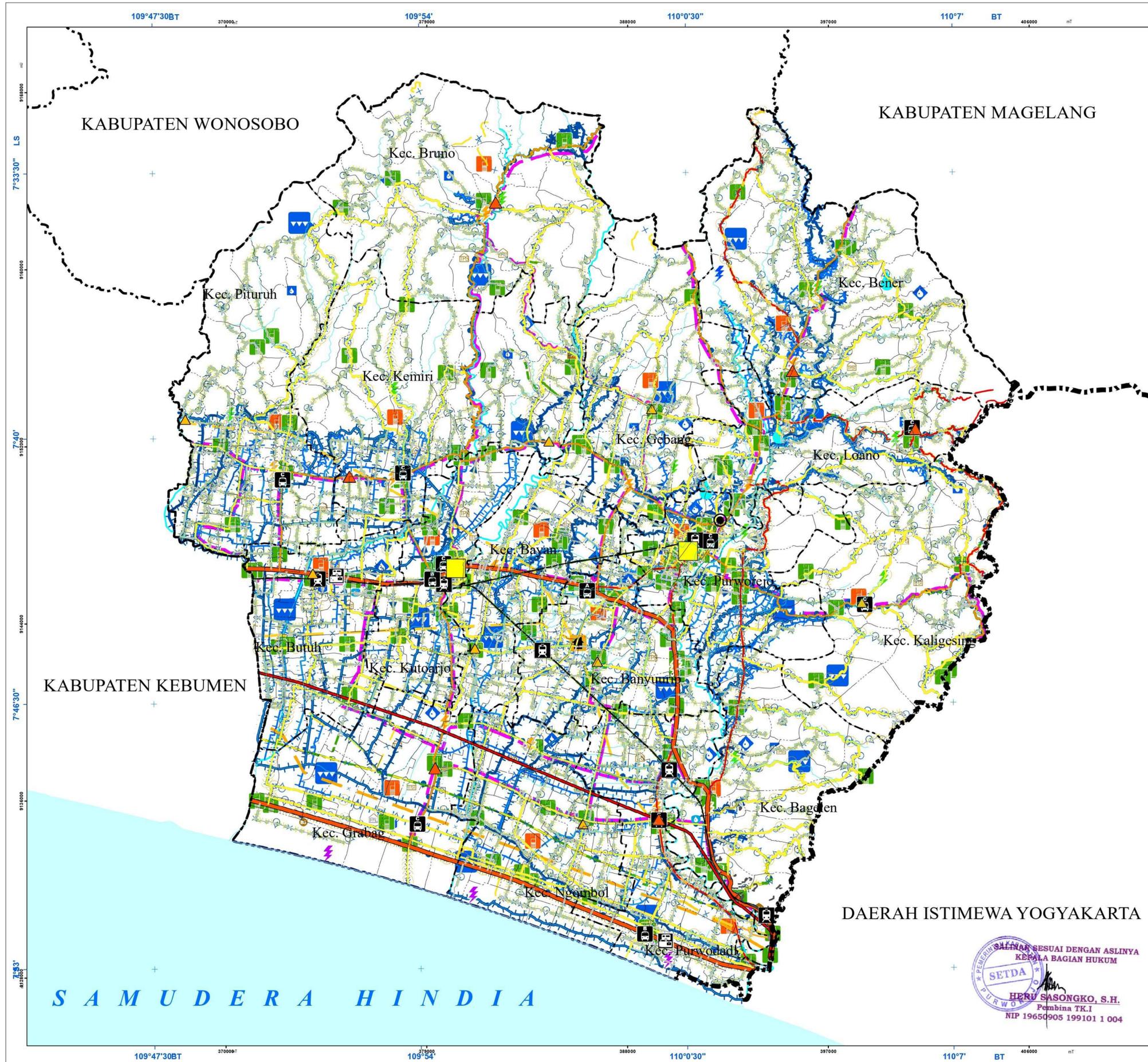
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 13

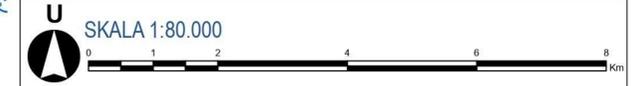

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina TK.I
NIP 19650905 199101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041**
**PETA RENCANA
 STRUKTUR RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S



- KETERANGAN :**
- IBU KOTA PEMERINTAHAN :
 - Bukota Kabupaten
 - BATAS ADMINISTRASI :
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - STRUKTUR RUANG :
 - SISTEM PERKOTAAN :
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 - SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
 - Sistem Jaringan Jalan :
 - Terminal Penumpang :
 - Terminal Penumpang Tipe A
 - Terminal Penumpang Tipe B
 - Terminal Penumpang Tipe C
 - Jembatan Timbang
 - Sistem Jaringan Kereta Api :
 - Stasiun Kereta Api
 - Stasiun Penumpang
 - Jalan Arteri
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan
 - Jalan Lingkungan Sekunder
 - Jalan Tol
 - Jalan Tol
 - Jalan Strategis
 - Jaringan Jalur Kereta Api Umum
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - Jalan Khusus
 - Jalan Khusus
 - SISTEM JARINGAN ENERGI :
 - Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
 - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
 - Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
 - Gardu Induk
 - Gardu Induk
 - Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
 - Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
 - Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 - Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
 - SISTEM JARINGAN PERAIRAN :
 - Garis Pantai KSP 2018
 - Garis Pantai RTRW Prov. Jateng 2019
 - Sungai
 - SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI :
 - Jaringan Bergerak
 - Jaringan Bergerak Sekuler
 - Jaringan Bergerak Terestrial
 - Jaringan Tetap
 - Jaringan Tetap
 - SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 - Prasarana Sumber Daya Air
 - Sistem Pengendalian Banjir
 - Bangunan Pengendali Banjir
 - Air Permukaan
 - Jaringan Pengendali Banjir
 - Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota
 - Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota
 - Sistem Jaringan Irigasi
 - Jaringan Irigasi Primer
 - Jaringan Irigasi Sekunder
 - Jaringan Air Baku untuk Air Bersih
 - Jaringan Air Baku untuk Air Bersih
 - Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna
 - Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna
 - SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA :
 - Sistem Penyedia Air Minum (SPAM)
 - Bukan Jaringan Perpipaan
 - Sumur Dangkal
 - Sumur Pompa
 - Terminal Air
 - Bangunan Pengolahan Mula Air
 - Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik
 - Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik
 - Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Sistem Jaringan Persampahan Wilayah
 - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 - Ruang Evakuasi Bencana
 - Ruang Evakuasi Bencana
 - Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Jaringan Perpipaan
 - Jaringan Air Baku
 - Jaringan Distribusi
 - Jaringan Produksi
 - Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 - Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik
 - Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik

Sumber Peta Dan Rincian Peta
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 Tahun 2016
 - Garis Pantai Perencanaan Sesuai KSP 2018
 - Garis Pantai RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Garis Pantai BCG Berdasarkan Peta Lingkungan Pantai Indonesia Tahun 2013)
 - Batas Administrasi Kabupaten Purworejo menggunakan batas Permendagri No. 15 Thn 2013, Permendagri No. 81 Thn 2013, Permendagri No. 7 Thn 2012
 - Hasil Analisis Tim RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2020
 - Keputusan Bupati Daerah No. 562/DAJ/2020 Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Segmen Perjanjian Kabupaten Purworejo - Magelang - Kulon Progo No. 14/BAD/IV/2021

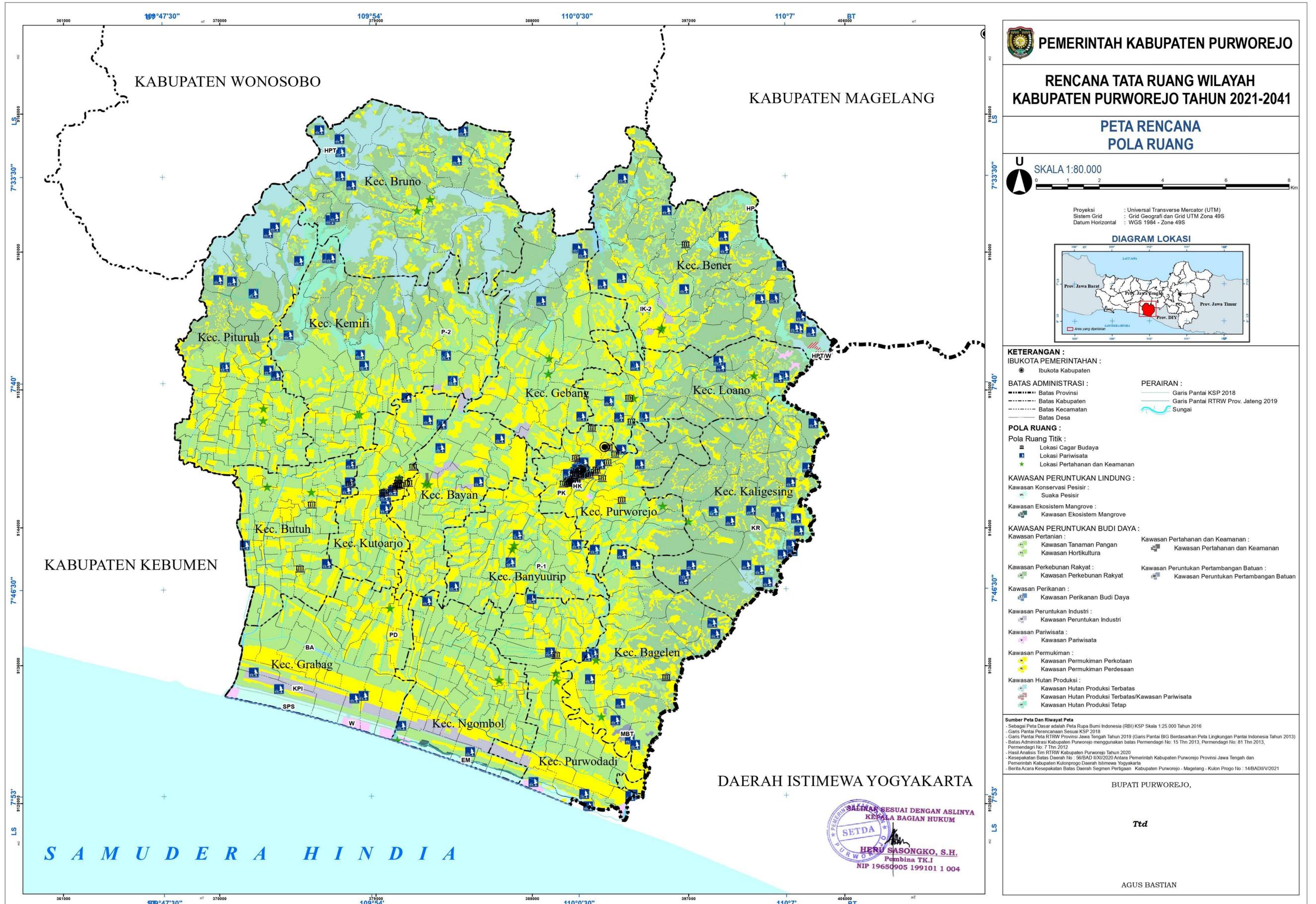
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKUTUPAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEMALA BAGIAN HUKUM
 SETDA
 PURWOREJO
HERU SASONGKO, S.H.
 Pembina TK.I
 NIP 19650905 199101 1 004

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041**

**PETA RENCANA
 POLA RUANG**

SKALA 1:80.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S

DIAGRAM LOKASI

- KETERANGAN :**
- IBUKOTA PEMERINTAHAN :
 - Ibukota Kabupaten
 - BATAS ADMINISTRASI :
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - PERAIRAN :
 - Garis Pantai KSP 2018
 - Garis Pantai RTRW Prov. Jateng 2019
 - ~ Sungai
 - POLA RUANG :
 - Pola Ruang Titik :
 - Lokasi Cagar Budaya
 - Lokasi Pariwisata
 - ★ Lokasi Pertahanan dan Keamanan
 - KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG :
 - Kawasan Konservasi Pesisir :
 - Suaka Pesisir
 - Kawasan Ekosistem Mangrove :
 - Kawasan Ekosistem Mangrove
 - KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA :
 - Kawasan Pertanian :
 - Kawasan Tanaman Pangan
 - Kawasan Hortikultura
 - Kawasan Perikanan :
 - Kawasan Perikanan Budi Daya
 - Kawasan Perumahan :
 - Kawasan Perumahan Perkotaan
 - Kawasan Perumahan Perdesaan
 - Kawasan Hutan Produksi :
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap
 - Kawasan Perkebunan Rakyat :
 - Kawasan Perkebunan Rakyat
 - Kawasan Perikanan :
 - Kawasan Perikanan Budi Daya
 - Kawasan Perumahan :
 - Kawasan Perumahan Perkotaan
 - Kawasan Perumahan Perdesaan
 - Kawasan Hutan Produksi :
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap
 - Kawasan Peruntukan Industri :
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Pariwisata :
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Perumahan :
 - Kawasan Perumahan Perkotaan
 - Kawasan Perumahan Perdesaan
 - Kawasan Hutan Produksi :
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap
 - Kawasan Peruntukan Industri :
 - Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Pariwisata :
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Perumahan :
 - Kawasan Perumahan Perkotaan
 - Kawasan Perumahan Perdesaan
 - Kawasan Hutan Produksi :
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Peruntukan Industri :
 - Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata :
 - Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perumahan :
 - Kawasan Perumahan Perkotaan
 - Kawasan Perumahan Perdesaan
- Kawasan Hutan Produksi :
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap

Sumber Peta Dan Riwayat Peta
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) KSP Skala 1:25.000 Tahun 2016
 - Garis Pantai Perencanaan Sesuai KSP 2018
 - Garis Pantai Peta RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Garis Pantai BIG Berdasarkan Peta Lingkungan Pantai Indonesia Tahun 2013)
 - Batas Administrasi Kabupaten Purworejo menggunakan batas Permendagri No: 15 Thn 2013, Permendagri No: 81 Thn 2013, Permendagri No: 7 Thn 2012
 - Hasil Analisis Tim RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2020
 - Kesepakatan Batas Daerah No : 56/BAD/II/2020 Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Segmen Perbatasan Kabupaten Purworejo - Magelang - Kulon Progo No : 14/BAD/IV/2021

BUPATI PURWOREJO,

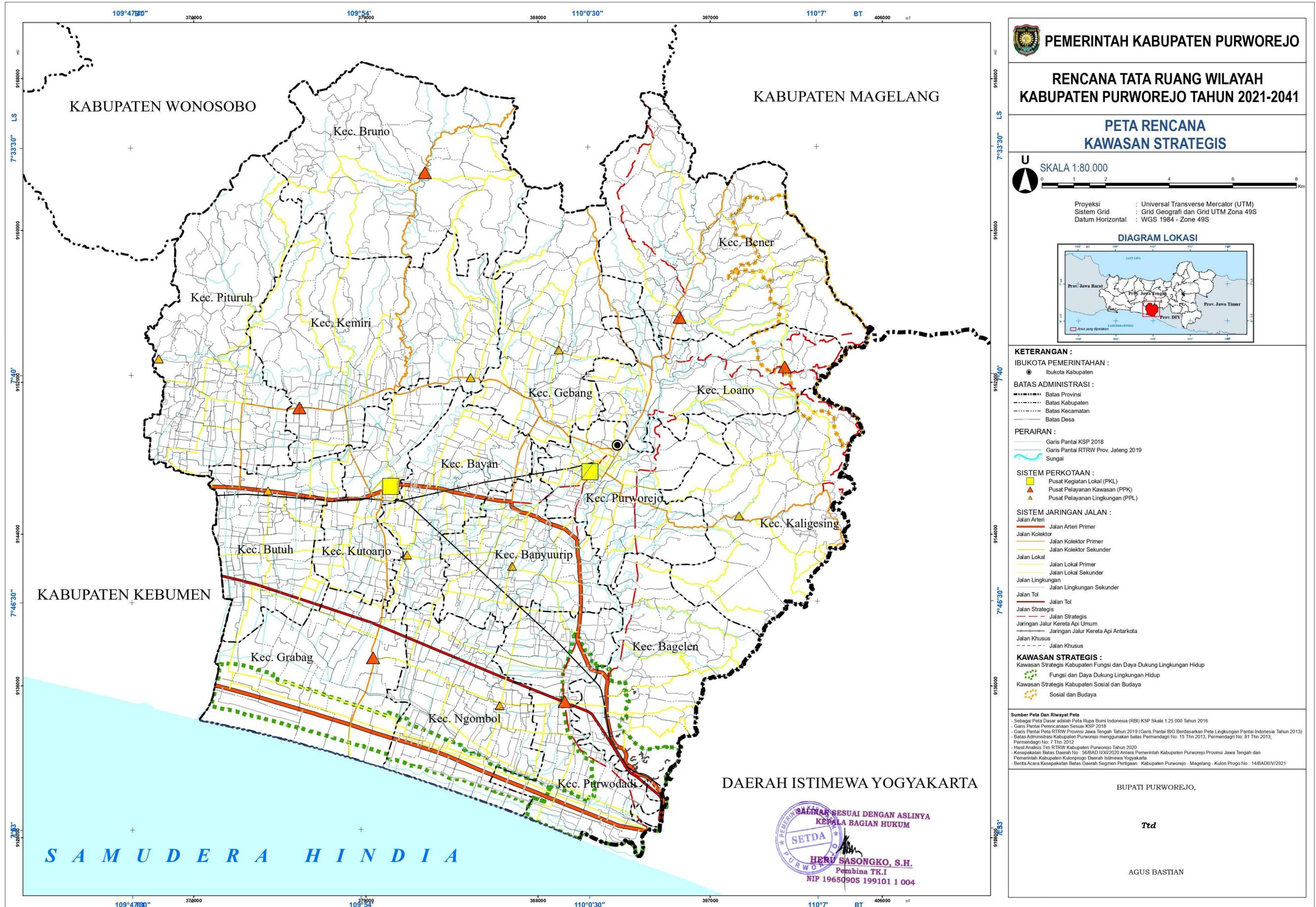
Ttd

AGUS BASTIAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

HERU SASONGKO, S.H.
 Pembina TK.I
 NIP 19650905 199101 1 004



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR: 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

TABEL INDIKASI PROGRAM
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO 2021 - 2041

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Perwujudan Sistem Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan dan pengelolaan kawasan berlandaskan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Kec. Purworejo,
Kec. Banyuurip,
Kec. Bayan, Kec.
Kutoarjo, Kec.
Gebang dan Kec.
Loano | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | |
| | 2) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | |
| | 3) | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | APBD Kab.,
Swasta | Pendidikan | | | | | | | | | |
| | 4) | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | APBD Kab.,
APBD Prov.,
Swasta | Pendidikan | | | | | | | | | |
| | 5) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | |
| | 6) | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | | APBD Kab. | Kesehatan | | | | | | | | | |
| | 7) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | 8) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----|--|---|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 9) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 10) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 11) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 12) | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 13) | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 14) | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 15) | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----|---|---|---------|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | 16) | Penyelenggaraan Jalan | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | 17) | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | 18) | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | 19) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | 20) | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional | | | APBD Kab. | Sosial | | | | | | | | | | | | |
| | | 21) | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah | | | APBD Kab. | Pertanian/ Pangan | | | | | | | | | | | | |
| | | 22) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | APBD Kab., swasta | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | | 23) | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 24) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 25) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 26) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 27) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 28) | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 29) | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--|---|---------|-----------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | 30) | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBN, APBD Kab., BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 31) | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | APBD Prov., APBD Kab. | Perdagangan | | | | | | | | | | | | |
| | | 32) | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | | APBN, APBD Prov., APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | | 33) | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | APBN, APBD Prov., APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | | 34) | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Penciptaan iklim kondusif dan peningkatan promosi untuk investasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah | | | APBD Kab. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pembuatan Peta Potensi Investasi | | | APBD Kab. | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| | | 4) | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | | | APBD Kab. | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Kutoarjo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penyelenggaraan Jalan | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---------|-------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | | | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | | |
| 4 | Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pariwisata secara terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBD Kab., Swasta | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | APBD Kab. | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | APBD Kab. | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengembangan fungsi pusat kegiatan pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Pengelolaan Daya Tarik Wisata | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) | Pengelolaan Destinasi Pariwisata | | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBN, APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah maupun antar pemerintah daerah untuk pengembangan wilayah; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Statistik | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah | | | APBD Kab. | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah | | | APBD Kab. | Persandian | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4) | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata | | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5) | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | APBD Kab. | Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6) | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------|---|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | |
| | | | 7) | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Kec. Purworejo,
Kec. Banyuurip,
Kec. Bayan, Kec.
Kutoarjo, Kec.
Gebang dan Kec.
Loano | | APBD Kab. | Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8) | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | APBD Kab. | Perencanaan Pembangunan Daerah/
Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9) | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10) | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | APBD Kab. | Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) | Kec. Purworejo,
Kec. Banyuurip,
Kec. Bayan, Kec.
Kutoarjo, Kec.
Gebang dan Kec.
Loano | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | Percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal / PKL menjadi Pusat Kegiatan Wilayah / PKW | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Kec. Purworejo,
Kec. Banyuurip,
Kec. Bayan, Kec.
Kutoarjo, Kec.
Gebang dan Kec.
Loano | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | APBD Kab., Swasta | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4) | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | APBD Kab., APBD Prov., Swasta | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6) | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | APBD Kab. | Kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----|--|---------|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | | 8) | Kec. Purworejo,
Kec. Banyuurip,
Kec. Bayan, Kec.
Kutoarjo, Kec.
Gebang dan Kec.
Loano | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9) | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10) | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/
Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11) | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12) | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13) | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/
Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----|---|--|-------------|--|-----------------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | | 14) | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Kec. Purworejo,
Kec. Banyuurip,
Kec. Bayan, Kec.
Kutoarjo, Kec.
Gebang dan Kec.
Loano | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 15) | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 16) | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 17) | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 18) | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 19) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 20) | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Sosial | | | | | | | | | | | |
| | | | 21) | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pertanian/ Pangan | | | | | | | | | | | |
| | | | 22) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | APBD Kab., swasta | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 23) | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 24) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 25) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 26) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|---------|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | 27) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 28) | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 29) | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 30) | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | | APBN, APBD Kab., BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 31) | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | APBD Prov., APBD Kab. | Perdagangan | | | | | | | | | | | |
| b. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | APBD Kab., Swasta | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 4) | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | APBD Kab., APBD Prov., Swasta | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 5) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 6) | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | APBD Kab. | Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | | 7) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 8) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 9) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 10) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 11) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 12) | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 13) | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 14) | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 15) | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 16) | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 17) | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----|--|---------|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 18) | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 19) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 20) | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Sosial | | | | | | | | | | | |
| | | | 21) | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Pertanian/ Pangan | | | | | | | | | | | |
| | | | 22) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | APBD Kab., swasta | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 23) | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 24) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 25) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 26) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 27) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 28) | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 29) | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 30) | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | APBN, APBD Kab., BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | | 31) | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | APBD Prov., APBD Kab. | Perdagangan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|---|-------------|--|-----------------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | |
| | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| | 2 | Pengendalian Pemanfaatan Ruang berbasis mitigasi bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| | | 2) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| | | 3) | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | | APBN, APBD Prov., APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| | | 4) | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | APBN, APBD Prov., APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| | | 5) | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| | 3 | Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin | | APBN, APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah untuk Pengembangan Wilayah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin | | APBD Kab. | Statistik | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Penanaman Modal | | | | | | | | |
| | | 3) | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Persandian | | | | | | | | |
| | | 4) | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|---|---|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | 5) | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin | | APBD Kab. | Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 6) | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | APBD Kab. | Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Penciptaan iklim kondusif untuk investasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin | | APBD Kab. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin | | APBD Kab. | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | APBD Kab. | Perdagangan | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, dan PPK Bruno | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|---------|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | 4) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, dan PPK Bruno | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| c. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pengembangan dan pematapan PPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | 4) | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | 5) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | | 6) | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | APBD Kab. | Kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| | | 7) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | 8) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | 9) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | 10) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | | 11) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----|---|--|---------|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | 12) | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Desa Ngombol (Kec.Ngombol),
Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 13) | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | 14) | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 15) | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 16) | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 17) | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | 18) | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | 19) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | 20) | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Sosial | | | | | | | | | | | |
| | | 21) | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pertanian/ Pangan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|--|---------|-----------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | 22) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Desa Ngombol (Kec.Ngombol),
Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) | | APBD Kab., swasta | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | | 23) | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 24) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 25) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 26) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 27) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 28) | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 29) | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 30) | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | | APBN, APBD Kab., BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | 31) | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | APBD Prov., APBD Kab. | Perdagangan | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|---|---|---------|-----------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | 2 | Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | | APBN, APBD Prov., APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | 4) | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | APBN, APBD Prov., APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | 5) | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) | | APBN, APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|--|---|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | 4 | Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah untuk Pengembangan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligesing, Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | APBD Kab. | Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | APBD Kab. | Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pariwisata secara terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) | | APBD Kab. | Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | APBD Kab. | Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | APBD Kab. | Perdagangan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|
| | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV |
| | | | | | | I | II | III | IV | V | | | |
| II. | Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana | | | | | | | | | | | | |
| a | Sistem jaringan transportasi | | | | | | | | | | | | |
| a.1 | Perwujudan sistem jaringan jalan | | | | | | | | | | | | |
| a. | Perwujudan jaringan jalan arteri | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan jaringan jalan arteri primer | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ | Seluruh ruas jalan arteri | | APBN | Perhubungan | | | | | | | |
| | 2) | Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer | (1) ruas jalan Prembun (batas Kabupaten Kebumen)-Kutoarjo; (2) ruas jalan Kutoarjo-batas kota Purworejo; (3) ruas jalan Lingkar Selatan Purworejo; (4) ruas jalan batas kota Purworejo-Karangnongko (Jalan Purworejo - DIY). | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | |
| | 3) | Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer | | | APBN | Perhubungan | | | | | | | |
| 2 | Pengembangan jaringan jalan strategis nasional | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Penyelenggaraan Jalan Strategis Nasional | ruas jalan Watukuro-Jatimalang-Jetis-Wawar di sepanjang pantai selatan melalui Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Ngombol-Kecamatan Grabag | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | |
| | 2) | Penyediaan Perlengkapan Jalan Strategis Nasional | | | APBN | Perhubungan | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|--|---------|----------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| b. Perwujudan jaringan jalan kolektor primer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ | Seluruh ruas jalan kolektor primer | | APBN, APBD Prov. APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| 2 Pengembangan jaringan jalan kolektor primer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ | Seluruh ruas jalan kolektor primer | | APBD Prov/APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Ruas jalan: (1) Kutoarjo-Bruno/Bts Kab. Wonosobo; (2) Maron-Purworejo; (3) Jl. Ir. H. Juanda; (4) Maron-Kemiri; (5) Bts Kab. Magelang/Bener-Maroon; (6) Purworejo-Sibolong/Bts.Prov. DIY; (7) Jl. WR. Supratman; (8) Jl. Imam Bonjol (lingkar utara Purworejo); (9) Jl. Pahlawan (lingkar barat Purworejo); (10) Kutoarjo-Ketawang | | APBD Prov/APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Penyediaan Perlengkapan Jalan | | | APBN/APBD Prov/APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|--|---------|---------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | 4) | Penyelenggaraan Jalan | Ruas jalan: (1) Karangduwur-Winong; (2) Kemiri-Pituruh; (3) Klepu-Pituruh; (4) Seren-Winong | | APBN, APBD Prov/APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | 5) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Prov/APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | |
| c. Perwujudan jalan kolektor sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ | Seluruh ruas jalan kolektor sekunder | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | |
| 2 Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penyelenggaraan Jalan | Ruas jalan: (1) Jl. A. Yani; (2) Jl. Jend. Gatot Subroto; (3) Jl. Letjend S. Parman; (4) Jl. Mayjend Sutoyo; (5) Jl. Veteran; (6) Jl. Merpati (Jl. Kantor Pos dan Stasiun) | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|--|--|---------|----------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| d. | Perwujudan jaringan jalan lokal primer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ | 1) ruas jalan Diponegoro;
2) ruas jalan Butuh-Jamprong;
3) ruas jalan Andong-Jamprong;
4) ruas jalan Jamprong-Sruwuh;
5) ruas jalan Tamansari-Sruwuh;
6) ruas jalan Tamansari-Sembaon;
7) ruas jalan Jenar-Angkrukkip;
8) ruas jalan Angkrukkip-Sangubanyu;
9) ruas jalan Grabag-Wunut;
10) ruas jalan Ngombol-Wunut;
11) ruas jalan Purwodadi-Krendetan;
12) ruas jalan Purwodadi-Ngombol;
13) ruas jalan Popongan-Banyuurip; | | APBN, APBD Prov, APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|-----------------------|--|---------|----------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | 2) | Penyelenggaraan Jalan | 14) ruas jalan Kedungsari-Borowetan;
15) ruas jalan Tegalrejo-Plandi;
16) ruas jalan Pangenrejo-Tegalrejo;
17) ruas jalan Keduren-Sendangsari;
18) ruas jalan Lengkong-Banyuurip;
19) ruas jalan Banyuurip-Bencorejo;
20) ruas jalan Bencorejo-Angkrukketip;
21) ruas jalan Angkrukketip-Ngombol;
22) ruas jalan Ngombol-Laban;
23) ruas jalan Laban-Gesing; 24) ruas jalan Gesing-Watukuro; 25) ruas jalan Sumpersari-Tanjungrejo; | | APBN, APBD Prov, APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|----|-------------------------------|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | | 3) | Penyediaan Perlengkapan Jalan | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | | | | |
| | 80) ruas jalan Kutoarjo-Karangduwur;
81) ruas jalan Katerban-PG.Wijayan; 82) ruas jalan Jono-Wareng;
83) ruas jalan Wareng-T.M.P.;
84) ruas jalan Suren-Wareng;
85) ruas jalan Semawung-Semawung Daleman;
86) ruas jalan Seren-Pelutan;
87) ruas jalan Gintungan-Gebang;
88) ruas jalan Gintungan-Jetis;
89) ruas jalan Gebang-Jetis;
90) ruas jalan Gebang-Mlaran;
91) ruas jalan Gebang-Tlogosono;
92) ruas jalan Ngemplak-Tlogosono;
93) ruas jalan Redin-Tlogosono; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|--|---------|---------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | | 132) ruas jalan Durensari-Batas DIY; 133) ruas jalan Hargorojo-Batas DIY; 134) ruas jalan Bagelen-Hargorojo; 135) ruas jalan Kalirejo-Hargorojo; 136) ruas jalan Krendetan-Somorejo; 137) ruas jalan Somorejo-Tlogokotes; 138) ruas jalan Somorejo-Tepus; 139) ruas jalan Bapangsari-Tlogokotes; dan 140) ruas jalan Tlogokotes-Batas DIY. | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Perwujudan jaringan jalan lokal sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ | 1. ruas Jalan Agus Salim;
2. ruas Jalan Blimbingan;
3. ruas Jalan Dewi Sartika;
4. ruas Jalan Dopleng-Mranti.
5. ruas Jalan Dr. Setya Budi; | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|----|--------------------------------------|---|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 2) | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 6. ruas Jalan Dusun Sindurjan; 7. ruas Jalan Kapten Tendean; 8. ruas Jalan Kartini; 9. ruas Jalan Kauman; 10. ruas Jalan Kepodang (Gg. Tegal Timur); 11. ruas Jalan Kesatrian; 12. ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan; 13. ruas Jalan KH. Wahid Hasyim; 14. ruas Jalan Ki. Mangun Sarkoro; 15. ruas Jalan Kliwonan I (Jl. Mangga); 16. ruas Jalan Kol. Sugiono; 17. ruas Jalan Kuncen-Krajan (Brigjend. Wiyono); 18. ruas Jalan Kyai Brengkel; 19. ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso (Jl. Kemuning); 20. ruas Jalan Let Jend Suprpto; | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|-----------|-------------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 3) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 21. ruas Jalan Let. Jend. MT. Haryono; 22. ruas Jalan Letjend Sarwoedi Wibowo; 23. ruas Jalan Mardihusodo; 24. ruas Jalan Marditomo; 25. ruas Jalan Mayjen DI Panjaitan (Mranti - Gintungan); 26. ruas Jalan Patok Gambreng; 27. ruas Jalan Pemotongan Hewan; 28. ruas Jalan Pemuda; 29. ruas Jalan Pramuka; 30. ruas Jalan Proklamasi; 31. ruas Jalan Sapta Marga; 32. ruas Jalan Senepo Timur (Wijaya Kusuma); 33. ruas Jalan Singodranan; 34. ruas Jalan Suryokusuman; 35. ruas Jalan Tanjung Anom; | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | | | 36. ruas Jalan Tgl Malang/Gg. Candi (Jl. Tunas Patria); 37. ruas Jalan Wirotaman; 38. ruas Jalan Wismoaji; dan 39. ruas Jalan Yudodipuran. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f) | Perwujudan jaringan jalan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Perwujudan jaringan jalan lingkungan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Peningkatan jalan umum dan jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Seluruh ruas jalan lingkungan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | Perwujudan jaringan jalan desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Peningkatan jalan umum dan jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Penyelenggaraan Jalan Desa | Seluruh ruas jalan desa | | APBD Kab., swadaya masyarakat | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Penyediaan Perlengkapan Jalan Desa | | | APBD Kab., swadaya masyarakat | Perhubungan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|---------|-----------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| 2.2 Pembangunan dan peningkatan jalan poros desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penyelenggaraan Jalan Poros Desa | Seluruh ruas jalan poros desa | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penyediaan Perlengkapan Jalan Poros Desa | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| g) Perwujudan jaringan jalan tol | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penyelenggaraan Jalan Tol | (Masih Indikatif) | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penyediaan Perlengkapan Jalan Tol | | | APBN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| f) Perwujudan jaringan jalan strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Pengembangan jaringan jalan strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Ruas jalan: (1) Ringroad (jalan lingkar timur) Kabupaten Purworejo; (2) Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo-Batas DIY; (3) Banyuasin-Tridadi - Pucungroto - Batas DIY; (4) jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kec. Bener) dan/atau Sedayu (Kec. Loano); | | APBN/APBD Prov. | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | APBN/APBD Prov. | Perhubungan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|--|---------|-------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | 3) | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | (5) Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Purwodadi-Bubutan, dan Bubutan-Watukuro; (6) Bener-Guntur dan Guntur-Ngasinan; (7) Jl. Tentara Pelajar; (8) Jl. Jend. Sudirman; (9) Jl. Brigiend. Katamso; dan (10) Jl. Urip Sumoharjo | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./kerjasama | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | 4) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | |
| g) Perwujudan jaringan jalan khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penyelenggaraan jalan khusus | Seluruh ruas jalan khusus | | Swasta | Swasta | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penyediaan perlengkapan jalan khusus | | | Swasta | Swasta | | | | | | | | | | |
| h) Perwujudan terminal penumpang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A | Kec. Banyuurip | | APBN | Perhubungan | | | | | | | | | | |
| 2) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | Kec. Purwodadi dan Kec. Kutoarjo | | APBD Prov. | Perhubungan | | | | | | | | | | |
| 3) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Kec. Grabag, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Pituruh, Kec. Loano | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|--|---------|------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|
| | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV |
| | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | |
| i) | Perwujudan jembatan timbang | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Penyelenggaraan jembatan timbang | Kec. Butuh dan Kec. Purwodadi | | APBN, APBD Prov. | Perhubungan | | | | | | | | |
| | 2) | Pemeliharaan dan pengawasan jembatan timbang | | | APBN, APBD Prov. | Perhubungan | | | | | | | | |
| a.2 | Perwujudan sistem jaringan kereta api | | | | | | | | | | | | | |
| a. | perwujudan jaringan jalur kereta api | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pengembangan sistem kereta api | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | |
| | 2) | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api | | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | |
| | 2 | Pengembangan jalur selatan | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api | Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | |
| | 3 | Pengembangan jalur rel ganda (<i>double track</i> Jawa Selatan) | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api | Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| 4 Pengembangan sistem kereta api komuter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api | | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| 5 Pengembangan palang pintu pada perlintasan sebidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum | Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum | | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| 6 Pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum | Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum | | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----|--|--|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| b. perwujudan stasiun kereta api | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Pengembangan Stasiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api | Stasiun Jenar (Kec. Purwodadi), Stasiun Wojo (Kec. Bagelen), Stasiun Purworejo (Kec. Purworejo), Stasiun Montelan (Kec. Banyuurip), Stasiun Kutoarjo (Kec. Kutoarjo), dan Stasiun Butuh (Kec. Butuh) | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| 2 Revitalisasi Stasiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api | Stasiun Jenar (Kec. Purwodadi), Stasiun Wojo (Kec. Bagelen), Stasiun Purworejo (Kec. Purworejo), Stasiun Montelan (Kec. Banyuurip), Stasiun Kutoarjo (Kec. Kutoarjo), dan Stasiun Butuh (Kec. Butuh) | | APBN, BUMN | Perhubungan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|---------|--------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| b | sistem jaringan energi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b.1 | Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) pembangunan dan pengembangan pipa minyak dan gas bumi serta sarana dan prasarana pendukungnya | Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Bayan, Kec. Banyuurip, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pembangunan dan pengembangan SPBU serta Sub Penyalur SPBU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) pemerataan distribusi bahan bakar kendaraan | Seluruh kecamatan | | BUMN, Swasta | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Pembangunan dan pengembangan SPBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) pemerataan distribusi gas bumi | Kec. Grabag, Kec. Butuh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang dan Kec. Bener | | BUMN, Swasta | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Perawatan Pipa Perminyakan Cilacap-Yogyakarta I & II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) pemeliharaan sarana distribusi minyak dan gas bumi | Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Bayan, Kec. Banyuurip, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen | | BUMN, Swasta | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|---|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | b.2 | Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b.2 | Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik | Kec. Bener | | APBN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | APBN/APBD Kab./BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral/
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | APBN/APBD Kab./BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral/
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------|--|--|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 3 | Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik | Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| | 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| | 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral/ PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| 4 | Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik | Seluruh kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| | 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| | 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral/ PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| 5 | Pembangunan pembangkit listrik lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik | Seluruh kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| | 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|---------|---------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Seluruh kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | b.2. Perwujudan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pembangunan dan pengembangan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | Seluruh kecamatan | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pemeliharaan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | Seluruh kecamatan | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | pengembangan gardu induk dan sarana pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | Kec. Banyuurip | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTET | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen dan Kec. Butuh | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh dan Kec. Kemiri | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 6 | Pemeliharaan saluran udara tegangan rendah (SUTR) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | Seluruh kecamatan | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| 7 | Pemeliharaan saluran kabel tegangan menengah (SKTM) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya | Seluruh kecamatan | | APBN, BUMN | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| c | sistem jaringan telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | |
| c.1 | Perwujudan jaringan tetap | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan instalasi jaringan tetap telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) penyediaan jaringan tetap telekomunikasi | Seluruh kecamatan | | APBD Kab./BUMN | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| 2 | Pengembangan jaringan tetap tertutup sistem perkeretaapian | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum | Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh | | APBN/APBD Kab./BUMN | Perhubungan/ Komunikasi dan Informatika/ Perkeretaapian | | | | | | | | | |
| 3 | Pengembangan jaringan tetap tertutup Fiber Optik Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) penyelenggaraan jaringan fiber optik | Seluruh kecamatan | | APBD Kab./BUMN | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| c.2 | Perwujudan jaringan bergerak | | | | | | | | | | | | | |
| c.2. | Perwujudan jaringan bergerak terrestrial | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan jaringan terrestrial radio trunking | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) pengembangan sistem jaringan radio trunking kabupaten | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| 2 | Pengembangan jaringan bergerak terrestrial radio panggil untuk umum (RPUU) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) pengembangan sistem jaringan radio panggil untuk umum (RPUU) kabupaten | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|--|-------------------|---------|---------------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | c.2. | Perwujudan jaringan bergerak seluler | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 pengembangan menara telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) pemerataan distribusi pelayanan telekomunikasi | Seluruh kecamatan | | APBD Kab./BUMN/Swasta | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 pembangunan menara telekomunikasi bersama | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) pemerataan distribusi pelayanan telekomunikasi bersama | Seluruh kecamatan | | APBD Kab./BUMN/Swasta | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 pembangunan jaringan layanan internet | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) peningkatan pelayanan telekomunikasi | Seluruh kecamatan | | APBD Kab./BUMN/Swasta | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | |
| | | c.2. | Perwujudan jaringan bergerak satelit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 pengembangan jaringan komunikasi satelit di kalangan militer, kedaruratan bencana dan publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk kegiatan militer, kebencanaan dan publik | Seluruh kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./BUMN/Swasta | Komunikasi dan Informatika/
Pertahanan/
Penanggulangan Bencana/
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|-----------------|---------|-----------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | |
| d | sistem jaringan sumber daya air | | | | | | | | | | | | | | |
| | d.1 Perwujudan sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | peningkatan dan pengelolaan DAS Bogowonto | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota | DAS Bogowonto | | APBN/APBD Prov. | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| | 2 | peningkatan dan pengelolaan DAS Cokroyasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota | DAS Cokroyasan | | APBN/APBD Prov. | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| | 3 | peningkatan dan pengelolaan DAS Wawar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota | DAS Wawar | | APBN/APBD Prov. | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| | 4 | peningkatan dan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha | DI Wadaslintang | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|---|---------|-------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah | DI Watujagir, DI Kalibutek, DI Loning Kragilan | | APBD Prov. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | d.2 | Perwujudan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d.2 | Perwujudan sumber air Cekungan Air Tanah (CAT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | perlindungan mata air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar mata air | Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | 2 | pengembangan embung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | 3 | pembangunan dan pengembangan bendung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|---|-------------|--|-------------------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 4 | pembangunan Waduk Multiguna (Bendungan Bener) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) | Kec. Bener | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | pengelolaan CAT Kebumen - Purworejo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | pemeliharaan lingkungan sekitar CAT Kebumen - Purworejo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|--|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | |
| | | d.2 | Perwujudan prasarana sumber daya air | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi primer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha | DI Boro, DI Kedung Putri | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 1000 - 3000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha | Seluruh kecamatan | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 1000 - 3000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Prov. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|---|-------------|--|--|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 3 | Pencegahan banjir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Penanggulangan dengan mitigasi bencana banjir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | Pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | Pengembangan dan pengelolaan sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|--|----------------------|--|-----------------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | |
| | | | 7 | Pengembangan dan pengelolaan mata air | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | |
| | | | 2) Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | |
| | | | 3) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | |
| | | | 8 | Pengembangan dan pengelolaan sumur dangkal | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |
| | | | 9 | Pengembangan dan pengelolaan sumur dalam | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|---|--|---------|-----------------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | 10 | Pengembangan jaringan air bersih perusahaan daerah air minum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab./BUMD | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Perusahaan Air Minum | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Pengembangan jaringan air bersih bukan perusahaan daerah air minum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swadaya | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Perumahan dan Permukiman | | | | | | | | | | |
| e | sistem jaringan prasarana lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e.1 | Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | SPAM Keburejo | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | |
| | | | | SPAM IKK Bagelen | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|---|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|
| | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV |
| | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | |
| | 2 | Pengembangan jaringan air minum bukan jaringan perpipaan dan/atau perpipaan mandiri di kawasan perdesaan dan desa rawan air bersih | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kec.Grabag,
Kec.Ngombol,
Kec.Purwodadi,
Kec.Bagelen,
Kec.Kaligesing,
Kec.Bayan,
Kec.Banyuuriip,
Kec.Butuh,
Kec.Pituruh,
Kec.Kemiri,
Kec.Bruno,
Kec.Gebang,
Kec.Loano dan
Kec.Bener | | APBN/APBD
Kab./Swadaya | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |
| e.2 | | | Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Perwujudan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (<i>sewage</i>) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Setempat dan Terpusat) | Seluruh Kecamatan | | APBN/APBD
Prov./APBD
Kab./Swasta | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | Kab. Purworejo | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |
| | 2 | Perwujudan jaringan limbah kegiatan, usaha, dan industri (<i>sewage</i>) | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|
| | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV |
| | | | | | | I | II | III | IV | V | | | |
| e.3 | Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kec. Grabag, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | 2) | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 2 | Pengembangan dan pengelolaan IPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Penyelenggaraan instalasi pengolahan limbah B3 | Kec. Grabag, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| e.4 | Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah | | | | | | | | | | | | |
| 1 | pengembangan TPA Sampah Regional | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 2 | revitalisasi TPA lama | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Loano | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 3 | pembangunan TPA baru | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Bagelen, Kec. Kemiri dan Kec. Loano | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|-------------------|---------|----------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| 4 pengembangan TPS di lokasi-lokasi strategis pusat timbulan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| 5 pengembangan TPST pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan dan pasar Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| 6 pengembangan TPS 3R pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| e.5 Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana | Seluruh kecamatan | | APBN/APBD Kab. | Penanggulangan Bencana/ Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|-------------|--|--|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| e.5. Perwujudan jalur evakuasi bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| e.5. Perwujudan ruang evakuasi bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | | | APBD Kab. | Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| e.6 Perwujudan sistem drainase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| II. PERWUJUDAN POLA RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Perwujudan kawasan peruntukan lindung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a Perwujudan kawasan perlindungan setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a.1 Perwujudan sempadan pantai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 2 | pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan; | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 3 | pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 4 | perlindungan dan konservasi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 5 | pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 6 | pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 7 | pengelolaan kebencanaan pesisir | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Prov./APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| a.2 Perwujudan sempadan sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 rehabilitasi dan pematapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Seluruh Kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2 pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Seluruh Kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 3 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah | Seluruh Kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 4 perlindungan dan konservasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Seluruh Kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------|---------|--------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Seluruh Kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 5) pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Seluruh Kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 6) pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pemantauan pemanfaatan ruang sempadan sungai | Seluruh Kecamatan | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 7) pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | a.3) Perwujudan kawasan sekitar bendungan/waduk | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) pemantapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Kec. Gebang dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) pengelolaan dan pengembangan kawasan sekitar bendungan/waduk untuk kegiatan penelitian dan pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Kec. Gebang dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | APBD Kab./Swasta/Swasta/wadaya | Lingkungan Hidup/Pariwisata | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|----------------------------|---------|-------------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| | | | | 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kec. Gebang dan Kec. Bener | | APBD Kab./Swasta/Swadaya | Lingkungan Hidup/Pariwisata | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab./Swadaya | Lingkungan Hidup/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| | | | | 5) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/Swadaya | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | | | | 3 pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengendalian pemanfaatan kawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Gebang dan Kec. Bener | | APBD Kab./Swadaya | Lingkungan Hidup/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| | | | | 4 perlindungan dan konservasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Kec. Gebang dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | | | | 5 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kec. Gebang dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | | | | 6 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kec. Gebang dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---------|----------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Kec. Gebang dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | b Perwujudan kawasan konservasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2 pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 3 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta | Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | 4 perlindungan dan konservasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 5 pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | | | | | |
| 6 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 pengelolaan kebencanaan pesisir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | APBD Prov./APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c Perwujudan kawasan lindung geologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup/ Energi Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya | Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 perlindungan dan konservasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya | Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|---------|----------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 4 | pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kec. Purworejo,
Kec. Loano dan
Kec. Bener | | APBD
Prov./APBD
Kab. | Lingkungan
Hidup/ Sumber
Daya Energi dan
Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APBD
Prov./APBD
Kab. | Lingkungan
Hidup/ Sumber
Daya Energi dan
Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APBD
Prov./APBD
Kab. | Lingkungan
Hidup/ Sumber
Daya Energi dan
Mineral | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | Pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kec. Purworejo,
Kec. Loano dan
Kec. Bener | | APBD Kab. | Ketentraman
dan Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APBD Kab. | Ketentraman
dan Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| d | Perwujudan kawasan cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | APBD Prov. | Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | APBD Prov. | Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | APBD Prov./APBD Kab. | Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab. | Kebudayaan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab. | Kebudayaan | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pengelolaan kawasan inti dan kawasan penyangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | | 3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Kebudayaan | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Kebudayaan | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Kebudayaan | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 5 | Pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | e | Perwujudan kawasan ekosistem mangrove | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | perlindungan dan konservasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/Swadaya | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | pengelolaan, pengembangan dan rehabilitasi ekosistem kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/Swadaya | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | pengembangan untuk pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/Swadaya | Lingkungan Hidup/ Pariwisata | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/Swadaya | Lingkungan Hidup/ Pariwisata | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|---------|---------------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 3) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 4) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| 4 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya | Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya | Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| 5 pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan ekosistem mangrove dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| 6 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| 7 pengelolaan kebencanaan pesisir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Prov./APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|--|---------|-------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| B. Perwujudan kawasan peruntukan budidaya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Perwujudan kawasan hutan produksi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a.1 | kawasan hutan produksi tetap | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | pemantapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan | Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | |
| | 2 | pengembangan dan pengelolaan kawasan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan | Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | |
| | 3 | pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengelolaan Hutan | Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 4 pemanfaatan potensi sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan | Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | |
| 2) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | |
| 5 pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya | Kehutanan/Pari wisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya | Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| 3) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | |
| a.2 kawasan hutan produksi terbatas | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 pemantapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| 2 pengembangan dan pengelolaan kawasan | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | |
| 2) Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | |
| 3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | |
| 3 pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengelolaan Hutan | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan/
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| 4 pemanfaatan potensi sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|---------|--------------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| 5 pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya | Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya | Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | | | APBD Prov. | Kehutanan | | | | | | | | | | | |
| b | Perwujudan kawasan perkebunan rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 pengembangan dan pengelolaan kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Pertanian/ Pangan | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengembangan Prasarana Pertanian | | | APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | | |
| 2 pengembangan kegiatan pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, | | APBD Kab./Swasta/S wadaya | Pertanian/ Pariwisata | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab./ Swasta/ Swadaya | Pertanian/ Pariwisata | | | | | | | | | | |
| c | Perwujudan kawasan pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 pemantapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian | Seluruh kecamatan | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | |
| | 2) Penataan Prasarana Pertanian | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | |
| | 2 pengembangan dan pengelolaan kawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Pengembangan Prasarana Pertanian | Seluruh kecamatan | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | |
| | 2) Pembangunan Prasarana Pertanian | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | |
| | 3 perlindungan LP2B dan KP2B | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Pengembangan Prasarana Pertanian | Seluruh kecamatan | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | |
| | 2) Pembangunan Prasarana Pertanian | | APBN/APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | |
| | 4 peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Seluruh kecamatan | APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | |
| | 2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| 3) Pengembangan Prasarana Pertanian | Seluruh kecamatan | | APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | |
| 5 pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | Seluruh kecamatan | | APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | |
| 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | |
| 3) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | APBD Prov./APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | |
| 6 pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian | Seluruh kecamatan | | APBD Kab. | Pertanian | | | | | | | | | |
| d Perwujudan kawasan perikanan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 perencanaan dan pemantapan fungsi kawasan | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Prov./APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |
| 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |
| 3) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | APBD Kab./Swasta | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |
| 2 pengembangan dan pengelolaan kawasan | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Prov./APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |
| 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |
| 3) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | APBD Prov. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---------|------------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 4) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swasta | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | 5) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | 3 pengembangan teknologi budidaya perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Seluruh Kecamatan | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Swasta | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | APBD Kab./Swasta | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | 4 pengolahan produk budidaya perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | 5 pengelolaan kebencanaan pada kawasan Kelautan dan Perikanan tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Prov./APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|---|---------|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| e | Perwujudan kawasan pertambangan dan energi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | perencanaan dan pengelolaan kawasan pertambangan mineral dan batuan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------|--|--|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 2 | perencanaan dan pengelolaan kawasan pertambangan bukan mineral dan batuan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| | 3) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| | 4) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | |
| 3 | pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Prov. | Energi dan Sumber Daya Mineral/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | 2) Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | | | APBD Prov./APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|---------|-------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| 4 | | | | pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi pada kawasan pertambangan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, | | APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | Energi dan Sumber Daya Mineral/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | |
| f | Perwujudan kawasan peruntukan industri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | penataan dan pematapan kawasan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | |
| 2 | | | | pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. | | APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | |
| | | | 2) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, | | APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|---|-------------|--|-----------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | | 3) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 pengembangan industri menengah dan kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 pengembangan sentra-sentra industri potensial berbasis sumber daya lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Prov./APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Prov./APBD Kab. | Perindustrian | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 peningkatan promosi, iklim investasi dan realisasi investasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Perindustrian dan Perizinan | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 penanganan limbah kawasan peruntukan industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|------------|---|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | 7 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener | | APBD Prov./APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | g Perwujudan kawasan pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 pengembangan destinasi pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 pengembangan amenities pariwisata berbasis homestay/desa wisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|-------------------|-------------|---|-------------------|------------|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 pengembangan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 pengembangan diversifikasi produk wisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 pengorganisasian destinasi wisata dalam sistem distribusi dan pengembangan terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 pengembangan fasilitas layanan wisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------------------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | | |
| | | | 7 | pengembangan obyek wisata dan desa wisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | pemberdayaan masyarakat sadar wisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya | Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Seluruh Kecamatan | APBD Prov./APBD Kab. | Pariwisata/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| | h | Perwujudan kawasan permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g.1 | kawasan permukiman perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | | APBD Kab./Swadaya | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 2 | pengelolaan kawasan permukiman kumuh perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| | 2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | |
| | 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBD Kab./Swadaya | | | | | | | | | | |
| 3 | penyediaan rumah layak huni | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swadaya | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| 4 | pengembangan perumahan swadaya | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swadaya | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| 5 | pengembangan lingkungan sehat permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| | 2) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | |
| 6 | pengembangan prasarana dan sarana permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| | 2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | |
| | 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | |
| 7 | pengembangan kawasan ruang terbuka hijau kota pada kawasan permukiman perkotaan dan jalur hijau sempadan jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| 8 | pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|-------------------|---------|-------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | | 2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | APBD Kab. | Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 pengembangan ekonomi berbasis pesantren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | g.2 kawasan permukiman perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBD Kab./Swadaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 penyediaan rumah layak huni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swadaya | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 pengembangan perumahan swadaya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swadaya | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|-------------------|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | | |
| | | | 4 | pengembangan lingkungan sehat permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swadaya | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBD Kab./Swadaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | pengembangan prasarana dan sarana permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swadaya | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab./Swadaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBD Kab./Swadaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swadaya/Swasta | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | APBD Kab./Swadaya/Swasta | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | APBD Kab./Swadaya/Swasta | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | pengembangan ekonomi berbasis pesantren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab./Swadaya/Swasta | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Seluruh Kecamatan | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|---|--------|--|-------------|--|-------------------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| h | Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | pengembangan dan pengelolaan kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan | | Seluruh Kecamatan | | APBN | Pertahanan | | | | | | | | | | | |
| III | Perwujudan Kawasan Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Perwujudan Kawasan sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | | Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |
| | | 4) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | APBD Kab., Swasta | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 4) | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | APBD Kab., APBD Prov., Swasta | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 5) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 6) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | 7) | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | | APBD Kab. | Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | | 8) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) | | | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----|--|---------|----------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 9) | Kec. Kaligesing,
Kec. Loano dan
Kec. Bener | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 10) | | | APBD Kab./BUMD | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 11) | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/
Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 12) | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 13) | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 14) | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/
Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 15) | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 16) | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----|--|--|----------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | | 17) | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18) | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19) | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21) | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Pertanian/ Pangan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Kec. Kaligesing,
Kec. Loano dan
Kec. Bener | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26) | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27) | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28) | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | APBD Prov./APBD Kab. | Perdagangan | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|--|---------|--|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | 29) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Ketentrangan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | 30) | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Peningkatan promosi, iklim investasi, dan realisasi investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | |
| 4 Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Daya Tarik Wisata | Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./ swasta/ kerjasama | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pengelolaan Destinasi Pariwisata | | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| 5 Pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Kecamatan Bener | 1 unit | APBN/ APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| 6 Pengembangan terminal penumpang untuk pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| 7 Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | APBD Kab. | Pariwisata | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----|--|--|---------|-------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 4) | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Kaligesing,
Kec. Loano dan
Kec. Bener | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/
Lingkungan Hidup/
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | 5) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | | 6) | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | | 7) | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | 8) | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | 9) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | APBD Kab. | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | |
| | | | 10) | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan/
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|--|---------|-------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| 8 Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | 2) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |
| B. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a Perwujudan Kawasan Kota Perbatasan (Border City) sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| 2 rehabilitasi dan revitalisasi kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Kab | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | APBD Kab | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| 3 pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---------------------------------|---------|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | 5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | 6) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | 7) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | | APBD Kab. | Kesehatan | | | | | | | | | |
| | | | 8) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) | | | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | |
| | | | 9) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | 10) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab./BUMD | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| | | | 11) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | | | 12) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | | | 13) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | 14) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| | | | 15) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | 16) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | 17) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------|----------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | | |
| | | | 18) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Prov./APBD Kab. | Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pertanian/ Pangan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---------|-------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | APBD Kab. | Penanggulangan Bencana Daerah/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Penanggulangan Bencana Daerah/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | APBD Kab. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | APBD Kab. | Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | APBD Kab. | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|--|---------|----------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | | 9) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | APBD Kab. | Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pariwisata dan Kebudayaan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | APBD Kab. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | APBD Kab. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen | | APBD Prov./APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b Perwujudan Kawasan sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|--|-------------|--|---|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 2 | rehabilitasi dan revitalisasi kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | APBD Kab. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | | 5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | | 6) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | APBD Prov. | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | | | 7) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | APBD Kab. | Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | | | 8) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) | | | APBN | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | |
| | | | | 9) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab./BUMD | Perumahan dan Kawasan Permukiman/Perusahaan Air Minum | | | | | | | | | | |
| | | | | 10) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | | 11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | | | 12) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|-----------------------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| | | | | 13) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| | | | | 14) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | | 15) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | | 16) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| | | | | 17) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | |
| | | | | 18) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | |
| | | | | 19) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | |
| | | | | 20) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Perhubungan | | | | | | | | | |
| | | | | 4 peningkatan utilitas kawasan peruntukan industri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| | | | | 2) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--|---------|------------------|--|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | | |
| | | | 5) Pengelolaan Sampah | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 6) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | | | APBD Kab./swasta | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 pengendalian dan pengawasan kawasan peruntukan industri | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perindustrian | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 pemantauan dan pengendalian kawasan peruntukan industri | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perindustrian | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------|-------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| | | | | 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| | | | | 7 pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| | | | | 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| | | | | 3) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| | | | | 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | APBD Kab. | Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | | | | | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|--|---------|-------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| | | | | 5) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | 6) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa | | | APBD Kab. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | 7) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | APBD Kab. | Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | | | | | | | | | | |
| | | | | 8) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | APBD Kab. | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | |
| | | | | 9) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan/ Pemb erdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | 10) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | APBD Kab. | Kelautan dan Perikanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | 13) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | APBD Kab. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | 14) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | APBD Kab. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | | APBD Kab. | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |

| Tabel Indikasi Program | Lokasi | Besaran | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | PJM I | | | | | PJM II | PJM III | PJM IV | | |
| | | | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| 7 | pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi | APBD Prov./APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | APBD Kab. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
 Pembina TK.I
 NIP 19650905 199101 1 004

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2021-2041

JARINGAN JALAN KABUPATEN
DAN JEMBATAN YANG BERADA DI KABUPATEN PURWOREJO

A. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

| No | Pangkal Ruas | Ujung Ruas | Panjang (Km) | Permukaan Eksisting (2009) | | | | Permukaan Rencana(2031) | |
|----|--------------|---------------|--------------|----------------------------|------|---------|-------|-------------------------|------|
| | | | | Aspal | Batu | Kerikil | Tanah | Aspal | Batu |
| 1 | Guntur | Ngasinan | 9,6 | 9,6 | | | | 9,6 | |
| 2 | Bener | Guntur | 4,9 | 4,9 | | | | 4,9 | |
| 3 | Kaliboto | Guntur | 6 | 6 | | | | 6 | |
| 4 | Tumbakanyar | Banyuasin | 8,55 | 8,55 | | | | 8,55 | |
| 5 | Gebang | Mlaran | 2,75 | 2,75 | | | | 2,75 | |
| 6 | Mlaran | Winong | 3,05 | 3,05 | | | | 3,05 | |
| 7 | Gebang | Tlogosono | 2,96 | 2,96 | | | | 2,96 | |
| 8 | Bruno | Cempedak | 5,54 | 5,54 | | | | 5,54 | |
| 9 | Loano | Jetis | 1,12 | 1,12 | | | | 1,12 | |
| 10 | Purworejo | Loano | 5 | 5 | | | | 5 | |
| 11 | Bagelen | Soko | 4,6 | 4,6 | | | | 4,6 | |
| 12 | Pandanrejo | Bts. DIY | 2,2 | 2,2 | | | | 2,2 | |
| 13 | Karangduwur | Winong | 4,85 | 4,85 | | | | 4,85 | |
| 14 | Gintungan | Gebang | 4,13 | 4,13 | | | | 4,13 | |
| 15 | Doplang | Sucen | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 | |
| 16 | Bener | Wadas | 3,3 | 3,3 | | | | 3,3 | |
| 17 | Karangrejo | Tridadi | 8,5 | | 8,5 | | | 8,5 | |
| 18 | Sawit | Krandegan | 4,45 | | 4,45 | | | 4,45 | |
| 19 | Kluwung | Kedungpomahan | 5,4 | | 5,4 | | | 5,4 | |
| 20 | Cangkreng | Kemanukan | 3,5 | 3,5 | | | | 3,5 | |
| 21 | Kaliharjo | Somongari | 6 | | 6 | | | 6 | |
| 22 | Kemanukan | Somongari | 2,7 | 2,7 | | | | 2,7 | |
| 23 | Somongari | Jatirejo | 3,6 | | 3,6 | | | 3,6 | |
| 24 | S o k o | Semagung | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 25 | Kemanukan | Soko | 2,3 | 2,3 | | | | 2,3 | |
| 26 | Krendetan | Somorejo | 1,5 | 1,5 | | | | 1,5 | |
| 27 | Somorejo | Tepus | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 28 | Gintungan | Winong | 4,61 | 4,61 | | | | 4,61 | |
| 29 | Somorejo | Tlogokotes | 0,8 | 0,8 | | | | 0,8 | |
| 30 | Semagung | Tlogokotes | 5 | 5 | | | | 5 | |
| 31 | Tlogokotes | Batas DIY | 3,5 | 3,5 | | | | 3,5 | |
| 32 | Bapangsari | Tlogokotes | 6 | | | 5 | 1 | | 6 |
| 33 | Lengkong | Banyuurip | 3,69 | 3,69 | | | | 3,69 | |
| 34 | Banyuurip | Bencorejo | 2,04 | 2,04 | | | | 2,04 | |
| 35 | Bencorejo | Angkrukkip | 3,71 | 3,71 | | | | 3,71 | |
| 36 | Angkrukkip | Ngombol | 2,04 | 2,04 | | | | 2,04 | |
| 37 | Purwodadi | Bubutan | 2,4 | 2,4 | | | | 2,4 | |
| 38 | Bubutan | Watukuro | 6,31 | 6,31 | | | | 6,31 | |
| 39 | Jenar | Angkrukkip | 2,85 | 2,85 | | | | 2,85 | |
| 40 | Kenteng | Bencorejo | 9,75 | 9,75 | | | | 9,75 | |
| 41 | Pendowo | Jenar | 1,94 | 1,94 | | | | 1,94 | |
| 42 | Jenar | Purwodadi | 2,04 | 2,04 | | | | 2,04 | |
| 43 | Doplang | Mranti | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 44 | Jetak | Jetis | 0,78 | 0,78 | | | | 0,78 | |
| 45 | Laban | Gesing | 4,3 | 4,3 | | | | 4,3 | |
| 46 | Banyuasin | Pagerharjo | 3,06 | 3,06 | | | | 3,06 | |
| 47 | Sendangsari | Temenggungan | 3 | | 3 | | | 3 | |
| 48 | Angkrukkip | Sangubanyu | 7,72 | 7,72 | | | | 7,72 | |
| 49 | Purwodadi | Ngombol | 3,25 | 3,25 | | | | 3,25 | |
| 50 | Bubutan | Gesing | 2,33 | 2,33 | | | | 2,33 | |

| No | Pangkal Ruas | Ujung Ruas | Panjang (Km) | Permukaan Eksisting (2009) | | | | Permukaan Rencana(2031) | |
|-----|-------------------|----------------|--------------|----------------------------|------|---------|-------|-------------------------|------|
| | | | | Aspal | Batu | Kerikil | Tanah | Aspal | Batu |
| 51 | Wunut | Laban | 5 | 5 | | | | 5 | |
| 52 | Gesing | Watukoro | 4,35 | | | | 4,35 | | 4,35 |
| 53 | Gesing | Jatimalang | 0,87 | 0,87 | | | | 0,87 | |
| 54 | Grabag | Wunut | 4,35 | 4,35 | | | | 4,35 | |
| 55 | Ngombol | Wunut | 2,9 | 2,9 | | | | 2,9 | |
| 56 | Jatimalang | Jetis | 10,5 | 10,5 | | | | 10,5 | |
| 57 | Watukuro | Jatimalang | 5,5 | 5,5 | | | | 5,5 | |
| 58 | Kutoarjo | Jono | 4,9 | 4,9 | | | | 4,9 | |
| 59 | Jono | Sangubanyu | 0,74 | 0,74 | | | | 0,74 | |
| 60 | Sangubanyu | Sembaon | 0,92 | 0,92 | | | | 0,92 | |
| 61 | Sembaon | Grabag | 1,35 | 1,35 | | | | 1,35 | |
| 62 | Grabag | Ketawang | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 63 | Jetis | Pantai | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 | |
| 64 | Bayan | Dungus | 7,17 | 7,17 | | | | 7,17 | |
| 65 | Kutoarjo | Karangduwur | 5,05 | 5,05 | | | | 5,05 | |
| 66 | Tambakrejo | Karangrejo | 6,5 | 6,5 | | | | 6,5 | |
| 67 | Sruwuh | Suren | 3,5 | 3,5 | | | | 3,5 | |
| 68 | Tunggorono | Butuh | 5 | | | | 5 | | 5 |
| 69 | Butuh | Jamprong | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 70 | Sruwuh | Kedungsri | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 | |
| 71 | Jamprong | Sruwuh | 1,3 | 1,3 | | | | 1,3 | |
| 72 | Tamansari | Sruwuh | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 73 | Tamansari | Sembaon | 4,46 | 4,46 | | | | 4,46 | |
| 74 | Tamansari | Sidomulyo | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 75 | Andong | Jamprong | 1,8 | 1,8 | | | | 1,8 | |
| 76 | Butuh | Kedungsri | 3,22 | 3,22 | | | | 3,22 | |
| 77 | Kedungsri | Sidomulyo | 2,4 | 2,4 | | | | 2,4 | |
| 78 | Sidomulyo | Wawar | 6,7 | | 0,8 | | 5,9 | | 6,7 |
| 79 | Jetis | Wawar | 8 | 8 | | | | 8 | |
| 80 | Brengkol | Megulung | 2,3 | 2,3 | | | | 2,3 | |
| 81 | Pituruh - Kesawen | Megulung | 6 | 6 | | | | 6 | |
| 82 | Pituruh | Megulung | 1,75 | 1,75 | | | | 1,75 | |
| 83 | Kemiri | Pituruh | 5,3 | 5,3 | | | | 5,3 | |
| 84 | Gebang | Megulung | 8,4 | 8,4 | | | | 8,4 | |
| 85 | Klepu | Pituruh | 4,46 | 4,46 | | | | 4,46 | |
| 86 | Kedungsri | Wonosari | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 | |
| 87 | Katerban | Pg. Wijayan | 5,2 | 5,2 | | | | 5,2 | |
| 88 | Pangenrejo | Tegalrejo | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 | |
| 89 | Tegalrejo | Plandi | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 90 | Popongan | Banyuurip | 4,1 | 4,1 | | | | 4,1 | |
| 91 | Guyangan | Ngombol | 3,3 | | | | 3,3 | | 3,3 |
| 92 | Sumbersari | Tanjungrejo | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 93 | Kesawen | Kaliglagah | 4,6 | 4,6 | | | | 4,6 | |
| 94 | Kaliglagah | Wonosido | 5,16 | | 5,16 | | | | 5,16 |
| 95 | Sambeng | Seren | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 96 | Pucangagung | Sambeng | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 97 | Bayan | Pucangagung | 4,4 | 4,4 | | | | 4,4 | |
| 98 | Bayan | Sambeng | 4,8 | 4,8 | | | | 4,8 | |
| 99 | Cempedak | Kemranggen | 5,5 | | 5,5 | | | 5,5 | |
| 100 | Pakisarum | Cempedak | 4,4 | | | | 4,4 | | 4,4 |
| 101 | Kemiri | Pakisarum | 10,7 | 10,7 | | | | 10,7 | |
| 102 | Kalikotes | Kaligintung | 5,2 | | | 5,2 | | | 5,2 |
| 103 | Loning | Girijoyo | 6 | 6 | | | | 6 | |
| 104 | Bruno | Girijoyo | 13,2 | | 13,2 | | | 13,2 | |
| 105 | Bedug | Manisjangan | 6 | 6 | | | | 6 | |
| 106 | Manisjangan | Nglaris | 2,35 | 2,35 | | | | 2,35 | |
| 107 | Kalijambe | Cacaban Lor | 6,8 | 6,8 | | | | 6,8 | |
| 108 | Cacaban Lor | Batas Magelang | 2,5 | | 2,5 | | | 2,5 | |
| 109 | Banyuasin | Cacaban Lor | 6,36 | 6,36 | | | | 6,36 | |
| 110 | Banyuasin | Tridadi | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 111 | Tridadi | Pucungroto | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 112 | Pandanrejo | Pucungroto | 3,3 | 3,3 | | | | 3,3 | |
| 113 | Karangrejo | Ngaran | 7,25 | | 7,25 | | | 7,25 | |
| 114 | Kaligesing | Ngaran | 4,65 | 4,65 | | | | 4,65 | |
| 115 | Jeketro | Donorejo | 5,25 | 5,25 | | | | 5,25 | |
| 116 | Kalirejo | Hargorojo | 5 | | 5 | | | 5 | |

| No | Pangkal Ruas | Ujung Ruas | Panjang (Km) | Permukaan Eksisting (2009) | | | | Permukaan Rencana(2031) | |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------|---------|-------|-------------------------|------|
| | | | | Aspal | Batu | Kerikil | Tanah | Aspal | Batu |
| 117 | Ketawang | Nambangan | 7,7 | | 7,7 | | | | 7,7 |
| 118 | Ketawang | laban | 7 | 7 | | | | 7 | |
| 119 | Bagelen | Hargorojo | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 120 | Semagung | Durensari | 3,5 | 1 | 2,5 | | | 3,5 | |
| 121 | Jono | Wareng | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 122 | Redin | Tlogosono | 2,9 | 2,9 | | | | 2,9 | |
| 123 | Tegalmiring | Piono | 2,1 | 2,1 | | | | 2,1 | |
| 124 | Cangkrep | Ganggeng | 5,3 | 5,3 | | | | 5,3 | |
| 125 | Pandanrejo | Ngaran | 3,5 | 3,5 | | | | 3,5 | |
| 126 | Candisari | Sawit | 4,3 | 1,8 | | | 2,5 | 1,8 | 2,5 |
| 127 | Kaliwungu | Blimbing | 4 | 4 | | | | 4 | |
| 128 | Mlaran | Ngaglik | 4,3 | | 4,3 | | | 4,3 | |
| 129 | Ngombol | Laban | 2,62 | 2,62 | | | | 2,62 | |
| 130 | Wonosido | Kemranggen | 2,6 | | | | 2,6 | | 2,6 |
| 131 | Hargorojo | Batas DIY | 4,5 | 2,5 | | 2 | | 2,5 | 2 |
| 132 | Pandanrejo | Donorejo | 5,7 | 5,7 | | | | 5,7 | |
| 133 | Gintungan | Jetis | 8 | | 8 | | | 8 | |
| 134 | Tunjungtejo | Blekatuk | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 | |
| 135 | Sucen | Lugosobo | 1,8 | 1,8 | | | | 1,8 | |
| 136 | Piono | Cokroyasan | 2,5 | | 2,5 | | | | 2,5 |
| 137 | Cangkrep | Sidomulyo | 1,4 | 1,4 | | | | 1,4 | |
| 138 | Tambakrejo -Sidorejo - Sidomulyo | | 2,65 | | 2,65 | | | | 2,65 |
| 139 | Seren | Pelutan | 3,3 | | 3,3 | | | | 3,3 |
| 140 | Rowobayem | Paitan | 2,1 | 2,1 | | | | 2,1 | |
| 141 | Winong | Girijoyo | 4,4 | 4,4 | | | | 4,4 | |
| 142 | Purwodadi | Krendetan | 2,55 | 2,55 | | | | 2,55 | |
| 143 | Stasiun Butuh | Butuh | 0,45 | | | 0,45 | | | 0,45 |
| 144 | Winong | Winongkidul | 0,75 | 0,75 | | | | 0,75 | |
| 145 | Stasiun Jenar | Jenar | 0,25 | | | 0,25 | | | 0,25 |
| 146 | Gupit – Sibolong | Kaligesing | 4 | | | | 4 | | 4 |
| 147 | Tumbakanyar | Simbarjoyo | 1,04 | 1,04 | | | | 1,04 | |
| 148 | Cangkrep | Kedungsari | 4,25 | 4,25 | | | | 4,25 | |
| 149 | Pekacangan | Kalitapas | 4,45 | 4,45 | | | | 4,45 | |
| 150 | Jalur Lmbt. Purworejo | Kutoarjo | 9 | 9 | | | | 9 | |
| 151 | Jl. Dusun Sindurjan | | 0,45 | | | 0,45 | | | 0,45 |
| 152 | Wareng | T.M.P | 1,1 | 1,1 | | | | 1,1 | |
| 153 | Mranti | Bulus | 2,6 | 2,6 | | | | 2,6 | |
| 154 | Ngelak | Krg.nongko | 1,21 | 1,21 | | | | 1,21 | |
| 155 | Pekacangan | Wadas | 5,35 | 5,35 | | | | 5,35 | |
| 156 | Gebang | Jetis | 3,6 | | 3,6 | | | 3,6 | |
| 157 | Grantunglegok | Tanjungrejo | 3,15 | | 3,15 | | | 3,15 | |
| 158 | Kalimeneng | Purbayan | 10 | | 10 | | | 10 | |
| 159 | Keduren | Sendangsari | 3,2 | 3,2 | | | | 3,2 | |
| 160 | Ngemplak | Tlogosono | 3,4 | | 3,4 | | | 3,4 | |
| 161 | Winong | Pucangagung | 3,1 | 3,1 | | | | 3,1 | |
| 162 | Tunjungan | Wonoroto | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 163 | Durensari | Batas DIY | 2,25 | | 2,25 | | | 2,25 | |
| 164 | Batoh | Dewi | 3 | | | 3 | | 3 | |
| 165 | Candisari | Condongsari | 1,25 | 1,25 | | | | 1,25 | |
| 166 | Blimbing | Somoleter | 5 | 5 | | | | 5 | |
| 167 | Kedungsari | Borowetan | 2,2 | 2,2 | | | | 2,2 | |
| 168 | Bandungkidul | Jatingarang | 3,14 | 3,14 | | | | 3,14 | |
| 169 | Jatingarang | Krandegan | 3,15 | | 3,15 | | | 3,15 | |
| 170 | Jatimalang | Pantai | 2 | | 2 | | | 2 | |
| 171 | Semawung | Sem. Daleman | 1,22 | 1,22 | | | | 1,22 | |
| 172 | Suren | Wareng | 3,6 | 3,6 | | | | 3,6 | |
| 173 | Tridadi | Somowono | 3,6 | 3,6 | | | | 3,6 | |
| 174 | Kledung | Lengkong | 0,7 | 0,7 | | | | 0,7 | |
| 175 | Jl. A. Yani | | 1,7 | 1,7 | | | | 1,7 | |
| 176 | Jl. KH. Ahmad Dahlan | | 1,15 | 1,15 | | | | 1,15 | |
| 177 | Jl. May. Jend. Sutoyo | | 1,9 | 1,9 | | | | 1,9 | |
| 178 | Jl. KH.Wahid Hasyim | | 0,48 | 0,48 | | | | 0,48 | |
| 179 | Jl. Letjend Sarwoedi Wibowo | | 1,98 | 1,98 | | | | 1,98 | |
| 180 | Jl. Kalikepuh | | 0,5 | 0,5 | | | | 0,5 | |
| 181 | Jl. Agus Salim | | 1,4 | 1,4 | | | | 1,4 | |
| 182 | Jl. Let Jend Suprpto | | 0,8 | 0,8 | | | | 0,8 | |

| No | Pangkal Ruas | Ujung Ruas | Panjang (Km) | Permukaan Eksisting (2009) | | | | Permukaan Rencana(2031) | |
|-----|---|------------|--------------|----------------------------|--------|---------|-------|-------------------------|-------|
| | | | | Aspal | Batu | Kerikil | Tanah | Aspal | Batu |
| 183 | Jl. Dewi Sartika | | 0,35 | 0,35 | | | | 0,35 | |
| 184 | Jl. Cut Mutia | | 0,2 | 0,2 | | | | 0,2 | |
| 185 | Jl. Kapten Tendean | | 0,8 | 0,8 | | | | 0,8 | |
| 186 | Jl. Veteran | | 0,4 | 0,4 | | | | 0,4 | |
| 187 | Jl. Pramuka | | 0,7 | 0,7 | | | | 0,7 | |
| 188 | Jl. Laksamana Yos Sudarso | | 0,2 | 0,2 | | | | 0,2 | |
| 189 | Jl. Kol. Sugiono | | 0,9 | 0,9 | | | | 0,9 | |
| 190 | Jl. Dr. Setya Budi | | 0,6 | 0,6 | | | | 0,6 | |
| 191 | Jl. Yududipuran | | 0,5 | 0,5 | | | | 0,5 | |
| 192 | Jl. Suryokusuman | | 0,3 | 0,3 | | | | 0,3 | |
| 193 | Jl. Kartini | | 0,5 | 0,5 | | | | 0,5 | |
| 194 | Jl. Proklamasi | | 0,24 | 0,24 | | | | 0,24 | |
| 195 | Jl. Ki. Mangun Sarkoro | | 0,23 | 0,23 | | | | 0,23 | |
| 196 | Jl. Nyi Laos | | 0,4 | 0,4 | | | | 0,4 | |
| 197 | Jl. Kesatrian | | 0,81 | 0,81 | | | | 0,81 | |
| 198 | Jl. Pemotongan Hewan | | 0,4 | 0,4 | | | | 0,4 | |
| 199 | Jl. Singodranan | | 0,48 | 0,48 | | | | 0,48 | |
| 200 | Jl. Masuk Kuburan Krekop | | 0,1 | 0,1 | | | | 0,1 | |
| 201 | Jl. Masuk Kuburan Sibak | | 0,25 | 0,25 | | | | 0,25 | |
| 202 | Jl. Sapta Marga | | 0,23 | 0,23 | | | | 0,23 | |
| 203 | Jl. Kuncen | | 2,15 | 2,15 | | | | 2,15 | |
| 204 | Jl. Let Jend S Parman-Kaliwungu | | 2,65 | 2,65 | | | | 2,65 | |
| 205 | Jl. Tanjung Anom | | 0,53 | 0,53 | | | | 0,53 | |
| 206 | Jl. Marditomo | | 0,54 | 0,54 | | | | 0,54 | |
| 207 | Jl. Mardihusodo | | 0,54 | 0,54 | | | | 0,54 | |
| 208 | Jl. Kliwonan I | | 0,44 | 0,44 | | | | 0,44 | |
| 209 | Jl. Kliwonan II | | 0,35 | 0,35 | | | | 0,35 | |
| 210 | Jl. Wismoaji | | 0,15 | 0,15 | | | | 0,15 | |
| 211 | Jl. Kauman | | 0,15 | 0,15 | | | | 0,15 | |
| 212 | Jl. Kawedanan | | 0,1 | 0,1 | | | | 0,1 | |
| 213 | Jl. Wirotaman | | 0,18 | 0,18 | | | | 0,18 | |
| 214 | Jl. Merpati | | 0,6 | 0,6 | | | | 0,6 | |
| 215 | Jl. Stasiun | | 0,55 | 0,55 | | | | 0,55 | |
| 216 | Jl. Let. Jend. MT. Haryono | | 0,94 | 0,94 | | | | 0,94 | |
| 217 | Jl. Cempaka | | 0,14 | 0,14 | | | | 0,14 | |
| 218 | Jl. Teratai | | 0,18 | 0,18 | | | | 0,18 | |
| 219 | Jl. Senepo | | 0,17 | 0,17 | | | | 0,17 | |
| 220 | Jl. Sanepo Timur | | 0,6 | 0,6 | | | | 0,6 | |
| 221 | Jl. Sanepo Barat | | 0,15 | 0,15 | | | | 0,15 | |
| 222 | Jl. Sanepo Selatan | | 0,7 | 0,7 | | | | 0,7 | |
| 223 | Jl. Bedeng | | 0,2 | 0,2 | | | | 0,2 | |
| 224 | Jl. Sawunggalih | | 1,09 | 1,09 | | | | 1,09 | |
| 225 | Jl. Wijaya Mulya | | 0,45 | 0,45 | | | | 0,45 | |
| 226 | Jl Melati | | 0,44 | 0,44 | | | | 0,44 | |
| 227 | Jl. Anggrek | | 0,31 | 0,31 | | | | 0,31 | |
| 228 | Jl. GG. Kliwonan | | 0,24 | 0,24 | | | | 0,24 | |
| 229 | Jl. GG. Tegal | | 0,45 | 0,45 | | | | 0,45 | |
| 230 | Jl. Tegal Malang - Bandung | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 231 | Jl. Lingkar Barat Purworejo | | 5,1 | 5,1 | | | | 5,1 | |
| 232 | Jl. Lingkar Utara Purworejo | | 4,4 | 4,4 | | | | 4,4 | |
| 233 | Jl. Lingkar Selatan Purworejo | | 4,3 | 4,3 | | | | 4,3 | |
| 234 | Jl. Lingkar Timur Purworejo (ruas baru) | | | | | | | 9 | |
| | JUMLAH | | 734,8 | 556,54 | 128,86 | 16,35 | 33,05 | 675,29 | 68,51 |
| | PROSENTASE (%) | | 100,00 | 75,28 | 17,87 | 2,27 | 4,58 | 90,50 | 9,50 |

B. Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|------------------------|------------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| | 01 | GUNTUR -NGASINAN | | | |
| 1 | 24,06,01,01,0001 | Guntur | GUNTUR -NGASINAN | 4.00 | 3.00 |
| 2 | 24,06,01,02,0002 | Ngasinan | GUNTUR -NGASINAN | 5.00 | 3.00 |
| | 02 | BENER-GUNTUR | | | |
| 3 | 24,06,01,01,0003 | Guntur | BENER-GUNTUR | 5.00 | 4.00 |
| | 03 | KALIBOTO-GUNTUR | | | |
| 4 | 24,06,03,01,0004 | Sumpersari | KALIBOTO-GUNTUR | 6.00 | 3.00 |
| | 04 | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | | | |
| 5 | 24,06,04,01,0005 | Tumbakanyar | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 2.00 | 8.00 |
| 6 | 24,06,04,02,0006 | Sembuh | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 7.50 | 3.50 |
| 7 | 24,06,04,03,0007 | Kodil | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 95.00 | 4.00 |
| 8 | 24,06,04,04,0008 | Krasak | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 4.50 | 4.00 |
| 9 | 24,06,04,05,0009 | Kemejing | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 14.00 | 5.00 |
| 10 | 24,06,04,06,0010 | Guyangan | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 5.00 | 3.50 |
| 11 | 24,06,04,07,0011 | Tepan/Plampangan | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 5.00 | 3.75 |
| 12 | 24,06,04,08,0012 | Bayeman | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 5.50 | 4.00 |
| 13 | 24,06,04,09,0013 | Spare | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 4.00 | 3.25 |
| 14 | 24,06,04,10,0014 | Kembaran 1 | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 4.00 | 3.25 |
| 15 | 24,06,04,11,0015 | Kembaran 2 | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 2.00 | 5.00 |
| 16 | 24,06,04,12,0016 | Plarangan | TUMBAK ANYAR-BANYUASIN | 3.00 | 4.00 |
| | 05 | GEBANG-MLARAN | | | |
| 17 | 24,06,05,03,00117 | Bendosari | GEBANG-MLARAN | 3.50 | 2.90 |
| 18 | 24,06,05,02,0018 | Ngemplak | GEBANG-MLARAN | 5.00 | 4.00 |
| 19 | 24,06,05,04,369 | Mlaran 1 | GEBANG-MLARAN | 12.00 | 4.00 |
| 20 | 24,06,05,03,0019 | Pelutan | GEBANG-MLARAN | 3.00 | 4.00 |
| | 06 | MLARAN-WINONG | | | |
| 21 | 24,06,06,01,0020 | Mlaran 2 | MLARAN-WINONG | 9.50 | 4.00 |
| | 08 | BRUNO-CEMPEDAK | | | |
| 22 | 24,06,08,01,0021 | Cempedak 1 | BRUNO-CEMPEDAK | 2.00 | 4.00 |
| 23 | 24,06,08,02,0022 | Cempedak 2 | BRUNO-CEMPEDAK | 11.00 | 4.50 |
| | 11 | BAGELEN-SOKO | | | |
| 24 | 24,06,11,01,0023 | Bagelen | BAGELEN-SOKO | 9.00 | 4.00 |
| 25 | 24,06,11,02,0024 | Keposong | BAGELEN-SOKO | 9.00 | 5.00 |
| 26 | 24,06,11,03,0025 | Kahuripan | BAGELEN-SOKO | 12.50 | 4.00 |
| 27 | 24,06,11,04,0026 | Clapar | BAGELEN-SOKO | 9.00 | 4.00 |
| 28 | 24,06,11,05,0027 | Sokopendem | BAGELEN-SOKO | 12.5 | 4.00 |
| 29 | 24,06,11,06,0028 | Sokobokuning | BAGELEN-SOKO | 10.50 | 4.00 |
| 30 | 24,06,11,07,0029 | Sokolegok | BAGELEN-SOKO | 40.00 | 5.00 |
| | 13 | KARANG DUWUR-WINONG | | | |
| 31 | 24,06,13,01,0030 | Pengairan 1 | KARANG DUWUR-WINONG | 6.00 | 5.00 |
| 32 | 24,06,13,02,0031 | Pengairan 2 | KARANG DUWUR-WINONG | 5.00 | 5.00 |
| 33 | 24,06,13,03,0032 | Loning | KARANG DUWUR-WINONG | 18.00 | 3.00 |
| 34 | 24,06,13,04,0033 | Pengairan | KARANG DUWUR-WINONG | 3.00 | 5.00 |
| | 14 | GINTUNGAN-GEBANG | | | |
| 35 | 24,06,14,01,0035 | Gintungan | GINTUNGAN-GEBANG | 14.00 | 4.00 |
| 36 | 24,06,14,02,0036 | Ngrendeng | GINTUNGAN-GEBANG | 6.00 | 4.00 |
| 37 | 24,06,14,03,0037 | Gentan | GINTUNGAN-GEBANG | 14.00 | 4.00 |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| | 15 | DOPLANG-SUCEN | | | |
| 38 | 24,06,15,01,0038 | Doplang | DOPLANG-SUCEN | 3.00 | 4.00 |
| 39 | 24,06,15,02,0039 | Sucen | DOPLANG-SUCEN | 3.00 | 3.50 |
| | 16 | BENER-WADAS | | | |
| 40 | 24,06,16,01,0040 | Kaliwader 1 | BENER-WADAS | 50.00 | 3.00 |
| 41 | 24,06,16,02,0041 | Kaliwader 2 | BENER-WADAS | 16.00 | 3.50 |
| | 17 | KARANGREJO-TRIDADI | | | |
| 42 | 24,06,17,01,0042 | Tri Renggo | KARANGREJO-TRIDADI | 21.00 | 3.00 |
| | 18 | SAWIT-KRANDEGAN | | | |
| 43 | 24,06,18,03,0043 | Sawit | SAWIT-KRANDEGAN | 7.00 | 3.00 |
| | 19 | KLUWUNG-KEDUNGPOMAHAN | | | |
| 44 | 24,06,17,05,0044 | Kluwung | KLUWUNG-KEDUNGPOMAHAN | 7.00 | 3.00 |
| | 20 | CANGKREP-KEMANUKAN | | | |
| 45 | 24,06,20,01,0045 | Cangkrep | CANGKREP-KEMANUKAN | 2.25 | 5.00 |
| 46 | 24,06,20,02,0046 | Mongo / Kali Mongo | CANGKREP-KEMANUKAN | 13.50 | 4.00 |
| 47 | 24,06,20,03,0047 | Sigondok | CANGKREP-KEMANUKAN | 11.00 | 4.00 |
| 48 | 24,06,20,04,0048 | Kemanukan / Bangsan | CANGKREP-KEMANUKAN | 80.00 | 4.00 |
| | 21 | KALIHARJO-SOMONGARI | | | |
| 49 | 24,06,21,01,0049 | Kaliharjo 1 | KALIHARJO-SOMONGARI | 18.00 | 4.00 |
| 50 | 24,06,21,02,0050 | Kaliharjo 2 | KALIHARJO-SOMONGARI | 4.00 | 4.00 |
| 51 | 24,06,21,03,0051 | Hulosobo 1 | KALIHARJO-SOMONGARI | 2.00 | 4.00 |
| 52 | 24,06,21,04,0052 | Hulosobo 2 | KALIHARJO-SOMONGARI | 2.00 | 4.00 |
| 53 | 24,06,21,05,0053 | Hulosobo 3 | KALIHARJO-SOMONGARI | 2.50 | 4.00 |
| 54 | 24,06,21,06,0054 | Somongari 1 | KALIHARJO-SOMONGARI | 5.00 | 4.00 |
| 55 | 24,06,21,07,0055 | Somongari 2 | KALIHARJO-SOMONGARI | 5.00 | 4.00 |
| | 22 | KEMANUKAN-SOMONGARI | | | |
| 56 | 24,06,22,01,0056 | Kedungkacang | KEMANUKAN-SOMONGARI | 2.00 | 4.00 |
| 57 | 24,06,22,02,0057 | Tombong | KEMANUKAN-SOMONGARI | 3.00 | 3.50 |
| 58 | 24,06,22,03,0058 | Sambeng | KEMANUKAN-SOMONGARI | 3.00 | 3.50 |
| | 23 | SOMONGARI-JATIREJO | | | |
| 59 | 24,06,23,01,0059 | Somongari 3 | SOMONGARI-JATIREJO | 11.00 | 3.00 |
| | 24 | SOKO-SEMAGUNG | | | |
| 60 | 24,06,24,01,0060 | Sokobesole 1 | SOKO-SEMAGUNG | 3.70 | 3.50 |
| 61 | 24,06,24,02,0061 | Sokobesole 2 | SOKO-SEMAGUNG | 9.00 | 4.00 |
| 62 | 24,06,24,03,0062 | Semagung 1 | SOKO-SEMAGUNG | 8.75 | 3.50 |
| 63 | 24,06,24,04,0063 | Semagung 2 | SOKO-SEMAGUNG | 3.00 | 3.50 |
| 64 | 24,06,24,05,0064 | Semagung 3 | SOKO-SEMAGUNG | 4.50 | 3.50 |
| 65 | 24,06,24,06,0065 | Semagung 4 | SOKO-SEMAGUNG | 5.00 | 4.00 |
| | 25 | KEMANUKAN-SOKO | | | |
| 67 | 24,06,25,01,0066 | Ngasinan | KEMANUKAN-SOKO | 60.00 | 3.00 |
| 68 | 24,06,25,02,0067 | Soko | KEMANUKAN-SOKO | 4.00 | 4.00 |
| | 26 | KRENDETAN-SOMOREJO | | | |
| 69 | 24,06,26,01,0068 | Somorejo 1 | KRENDETAN-SOMOREJO | 3.00 | 3.50 |
| | 27 | SOMOREJO-TEPUS | | | |
| 70 | 24,06,27,01,0069 | Somorejo 2 | SOMOREJO-TEPUS | 3.00 | 3.00 |
| 71 | 24,06,27,01,0070 | Somorejo 3 | SOMOREJO-TEPUS | 3.00 | 3.00 |
| | 28 | GINTUNGAN-WINONG | | | |
| 72 | 24,06,28,01,0071 | Seren | GINTUNGAN-WINONG | 19.80 | 3.00 |
| 73 | 24,06,28,02,0072 | Tempel | GINTUNGAN-WINONG | 4.50 | 4.00 |
| 74 | 24,06,28,03,0073 | Winong | GINTUNGAN-WINONG | 55.00 | 5.00 |
| | 33 | LENGKONG-BANYU URIP | | | |
| 75 | 24,06,33,01,0074 | Pelaan | LENGKONG-BANYU URIP | 8.00 | 6.00 |
| 76 | 24,06,33,02,0075 | Demangan | LENGKONG-BANYU URIP | 2.00 | 4.00 |
| | 34 | BANYU URIP-BENCOREJO | | | |
| 77 | 24,06,34,01,0076 | Malangrejo | BANYU URIP-BENCOREJO | 11.00 | 3.00 |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| | 35 | BENCOREJO-ANGKRUUKKETIP | | | |
| 78 | 24,06,35,01,0077 | Bencorejo 1 | BENCOREJO-ANGKRUUKKETIP | 3.00 | 3.00 |
| 79 | 24,06,35,02,0078 | Bencorejo 2 | BENCOREJO-ANGKRUUKKETIP | 3.00 | 3.50 |
| 80 | 24,06,35,03,0079 | Sendangsari | BENCOREJO-ANGKRUUKKETIP | 3.00 | 3.50 |
| 81 | 24,06,35,04,0080 | Gowok | BENCOREJO-ANGKRUUKKETIP | 6.00 | 5.00 |
| 82 | 24,06,35,05,0081 | Angkrukkip 1 | BENCOREJO-ANGKRUUKKETIP | 3.00 | 5.00 |
| | 36 | ANGKRUUKKETIP-NGOMBOL | | | |
| 83 | 24,06,36,01,0082 | Kuning | ANGKRUUKKETIP-NGOMBOL | 4.40 | 4.00 |
| 84 | 24,06,36,02,0083 | Sruwoh | ANGKRUUKKETIP-NGOMBOL | 3.00 | 3.00 |
| | 38 | BUBUTAN-WATUKURO | | | |
| 85 | 24,06,38,01,0084 | Watukuro | BUBUTAN-WATUKURO | 50.00 | 4.00 |
| | 39 | JENAR-ANGKRUUKKETIP | | | |
| 86 | 24,06,39,01,0085 | Jenar | JENAR-ANGKRUUKKETIP | 5.20 | 4.00 |
| | 40 | KENTENG-BENCOREJO | | | |
| 87 | 24,06,40,01,0086 | Kenteng | KENTENG-BENCOREJO | 3.00 | 4.00 |
| 88 | 24,06,40,02,0087 | Condong | KENTENG-BENCOREJO | 3.00 | 6.00 |
| 89 | 24,06,40,03,0088 | Korok | KENTENG-BENCOREJO | 4.00 | 4.00 |
| 90 | 24,06,40,04,0089 | Tegal Miring | KENTENG-BENCOREJO | 4.00 | 4.00 |
| 91 | 24,06,40,05,0090 | Plenden | KENTENG-BENCOREJO | 6.00 | 4.00 |
| 92 | 24,06,40,06,0091 | Munggang | KENTENG-BENCOREJO | 2.00 | 4.00 |
| 93 | 24,06,40,07,0092 | Popohan | KENTENG-BENCOREJO | 2.00 | 4.00 |
| 94 | 24,06,40,08,0093 | Triwarno | KENTENG-BENCOREJO | 11.00 | 3.00 |
| | 42 | JENAR-PURWODADI | | | |
| 95 | 24,06,42,01,0094 | Purwosari | JENAR-PURWODADI | 2.00 | 8.00 |
| | 43 | DOPLANG-MRANTI | | | |
| 96 | 24,06,43,01,0095 | Doplang 2 | DOPLANG-MRANTI | 2.00 | 3.50 |
| | 45 | LABAN-GESING | | | |
| 97 | 24,06,45,01,0096 | Jeruken | LABAN-GESING | 5.00 | 4.00 |
| 98 | 24,06,45,02,0097 | Tanggungrejo | LABAN-GESING | 18.00 | 4.00 |
| 99 | 24,06,45,03,0098 | Gesing | LABAN-GESING | 2.00 | 4.00 |
| | 46 | BANYUASIN-PAGERHARJO | | | |
| 100 | 24,06,46,01,0099 | Juweh | BANYUASIN-PAGERHARJO | 12.00 | 5.00 |
| 101 | 24,06,46,02,0100 | Sedayu 1 | BANYUASIN-PAGERHARJO | 21.00 | 4.00 |
| 102 | 24,06,46,03,0101 | Sedayu 2 | BANYUASIN-PAGERHARJO | 7.00 | 4.00 |
| 103 | 24,06,46,04,0102 | Sedayu 3 | BANYUASIN-PAGERHARJO | 15.00 | 4.00 |
| 104 | 24,06,46,05,0103 | Pagerharjo | BANYUASIN-PAGERHARJO | 3.00 | 4.00 |
| | 48 | ANGKRUUKKETIP-SANGUBANYU | | | |
| 105 | 24,06,48,01,0104 | Sirindeng 1 | ANGKRUUKKETIP-SANGUBANYU | 15.00 | 3.00 |
| 106 | 24,06,48,02,0105 | Sirindeng 2 | ANGKRUUKKETIP-SANGUBANYU | 4.00 | 4.00 |
| 107 | 24,06,48,03,0106 | Kluwek | ANGKRUUKKETIP-SANGUBANYU | 20.00 | 3.00 |
| 108 | 24,06,48,04,0107 | Secang Kecil | ANGKRUUKKETIP-SANGUBANYU | 4.20 | 3.00 |
| 109 | 24,06,48,05,0108 | Secang Besar | ANGKRUUKKETIP-SANGUBANYU | 64.00 | 5.00 |
| 110 | 24,06,48,06,0109 | Kedungkamal | ANGKRUUKKETIP-SANGUBANYU | 3.00 | 5.00 |
| | 49 | PURWODADI-NGOMBOL | | | |
| 111 | 24,06,49,01,0110 | Purwodadi | PURWODADI-NGOMBOL | 5.20 | 5.00 |
| | 50 | BUBUTAN-GESING | | | |
| 112 | 24,06,50,01,0111 | Guyangan | BUBUTAN-GESING | 3.00 | 5.00 |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|--|------------------------|-----------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | | (M) | (M) |
| | 51 | | WUNUT-LABAN | | | |
| 113 | 24,06,51,01,0112 | | Laban | WUNUT-LABAN | 3.00 | 4.00 |
| 114 | | | Ringgit | WUNUT-LABAN | 4.00 | 5.00 |
| | 53 | | GESING-JATIMALANG | | | |
| 115 | 24,06,53,01,0113 | | Gesing | GESING-JATIMALANG | 32.00 | 4.00 |
| | 54 | | GRABAG-WUNUT | | | |
| 116 | 24,06,54,01,0114 | | Pengairan | GRABAG-WUNUT | 3.00 | 5.00 |
| 117 | 24,06,54,02,0115 | | Tanggulrejo 1 | GRABAG-WUNUT | 6.00 | 3.50 |
| 118 | 24,06,54,03,0116 | | Tanggulrejo 2 | GRABAG-WUNUT | 2.50 | 4.00 |
| 119 | 24,06,54,04,0117 | | Tunggaksewu | GRABAG-WUNUT | 5.50 | 4.00 |
| 120 | 24,06,54,05,0118 | | Cokroyasan | GRABAG-WUNUT | 55.00 | 5.00 |
| 121 | 24,06,54,06,0119 | | Sumber Rejo | GRABAG-WUNUT | 30.00 | 3.00 |
| 122 | 24,06,54,07,0120 | | Wunut | GRABAG-WUNUT | 15.00 | 3.00 |
| | 56 | | JATIMALANG-JETIS | | | |
| 123 | 24,06,56,01,0121 | | Harjobilangun | JATIMALANG-JETIS | 130.00 | 7.00 |
| | 58 | | KUTOARJO-JONO | | | |
| 124 | 24,06,58,01,0122 | | Slis Pengairan | KUTOARJO-JONO | 6.00 | 5.00 |
| 125 | 24,06,58,01,0123 | | Sidoarum / Pengairan | KUTOARJO-JONO | 2.00 | 7.00 |
| | 59 | | JONO-SANGUBANYU | | | |
| 126 | 24,06,59,01,0124 | | Ngepakan | JONO-SANGUBANYU | 5.00 | 5.00 |
| | 62 | | GRABAG-KETAWANG | | | |
| 127 | 24,06,62,01,0125 | | Sengoro | GRABAG-KETAWANG | 50.00 | 5.00 |
| 128 | 24,06,62,02,0126 | | Sengoro Kecil | GRABAG-KETAWANG | 7.00 | 5.00 |
| | 64 | | BAYAN-DUNGUS | | | |
| 129 | 24,06,64,01,0127 | | Ireng | BAYAN-DUNGUS | 7.00 | 4.00 |
| 130 | 24,06,64,02,0128 | | Krandegan 1 | BAYAN-DUNGUS | 2.00 | 4.00 |
| 131 | 24,06,64,03,0129 | | Krandegan 2 | BAYAN-DUNGUS | 30.00 | 4.00 |
| 132 | 24,06,64,04,0130 | | Ketitang | BAYAN-DUNGUS | 62.00 | 5.00 |
| 133 | 24,06,64,05,0131 | | Ketitang Kecil | BAYAN-DUNGUS | 2.00 | 3.00 |
| 134 | 24,06,64,06,0132 | | Dungus | BAYAN-DUNGUS | 5.00 | 3.50 |
| | 65 | | KUTOARJO-KARANGDUWUR | | | |
| 135 | 24,06,65,01,0133 | | Abatoar | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 11.00 | 4.00 |
| 136 | 24,06,65,02,0134 | | Gunung Tugel | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 2.00 | 4.00 |
| 137 | 24,06,65,03,0135 | | Gunung Tugel 2 | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 14.00 | 3.00 |
| 138 | 24,06,65,04,0136 | | Kepik | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 6.00 | 3.00 |
| 139 | 24,06,65,05,0137 | | Soko 1 | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 14.00 | 3.00 |
| 140 | 24,06,65,06,0138 | | Soko 2 | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 3.00 | 3.00 |
| 141 | 24,06,65,07,0139 | | Soko 3 | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 3.00 | 4.00 |
| 142 | 24,06,65,08,0140 | | Kaligesing 1 | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 3.50 | 4.50 |
| 143 | 24,06,65,09,0141 | | Kaligesing 2 | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 2.70 | 4.00 |
| 144 | 24,06,65,10,0142 | | Wirun | KUTOARJO-KARANGDUWUR | 71.50 | 5.50 |
| | 66 | | TAMBAKREJO-KARANGREJO | | | |
| 145 | 24,06,66,01,0143 | | Tambakrejo | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 3.00 | 4.00 |
| 146 | 24,06,66,02,0144 | | Tanggul | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 9.00 | 3.00 |
| 147 | 24,06,66,03,0145 | | Sidomulyo 1 | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 3.00 | 3.00 |
| 148 | 24,06,66,04,0146 | | Sidomulyo 2 | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 3.00 | 3.00 |
| 149 | 24,06,66,05,0147 | | Wonotulus 1 | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 6.00 | 3.00 |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| 150 | 24,06,66,06,0148 | Wonotulus 2 | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 4.00 | 3.00 |
| 151 | 24,06,66,07,0149 | Wonotulus 3 | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 4.00 | 3.00 |
| 152 | 24,06,66,08,0150 | Wonotulus 4 | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 5.00 | 3.00 |
| 153 | 24,06,66,09,0151 | Karangrejo | TAMBAKREJO-KARANGREJO | 6.00 | 3.00 |
| | 67 | SRUWOH-SUREN | | | |
| 154 | 24,06,67,01,0152 | Sruwoh / Irigasi | SRUWOH-SUREN | 5.00 | 4.00 |
| | 69 | BUTUH-JAMPRONG | | | |
| 155 | 24,06,69,01,0153 | Kunir | BUTUH-JAMPRONG | 12.00 | 5.50 |
| 156 | 24,06,69,02,0154 | Jamprong | BUTUH-JAMPRONG | 2.00 | 3.50 |
| | 70 | SRUWOH-KEDUNGSRI | | | |
| 157 | 24,06,70,01,0155 | Kedungagung 1 | SRUWOH-KEDUNGSRI | 14.80 | 4.00 |
| 158 | 24,06,70,02,0156 | Kedungagung 2 | SRUWOH-KEDUNGSRI | 2.5 | 4.00 |
| | 72 | TAMANSARI-SRUWOH | | | |
| 159 | 24,06,72,01,0157 | Mundusari | TAMANSARI-SRUWOH | 6.00 | 4.00 |
| 160 | 24,06,72,02,0158 | Sruwoh / Irigasi | TAMANSARI-SRUWOH | 4.00 | 4.00 |
| | 73 | TAMANSARI-SEMBAON | | | |
| 161 | 24,06,73,01,0159 | Tulusrejo | TAMANSARI-SEMBAON | 10.00 | 3.00 |
| 162 | 24,06,73,02,0160 | Tlepok 1 | TAMANSARI-SEMBAON | 5.00 | 3.00 |
| 163 | 24,06,73,03,0161 | Tlepok 2 | TAMANSARI-SEMBAON | 5.00 | 4.00 |
| 164 | 24,06,73,04,0162 | Tlepok 3 | TAMANSARI-SEMBAON | 4.00 | 4.00 |
| 165 | 24,06,73,05,0163 | Tlepok 4 | TAMANSARI-SEMBAON | 4.00 | 4.00 |
| 166 | 24,06,73,06,0164 | Sembaon | TAMANSARI-SEMBAON | 3.00 | 4.00 |
| | 74 | TAMANSARI-SIDOMULYO | | | |
| 167 | 24,06,74,01,0165 | Sumbersari | TAMANSARI-SIDOMULYO | 11.00 | 3.00 |
| 168 | 24,06,74,02,0166 | Sidomulyo | TAMANSARI-SIDOMULYO | 10.50 | 3.00 |
| | 75 | ANDONG-JAMPRONG | | | |
| 169 | 24,06,75,01,0167 | Lugurejo | ANDONG-JAMPRONG | 3.00 | 4.00 |
| | 77 | KEDUNGSRI-SIDOMULYO | | | |
| 170 | 24,06,77,01,0168 | Kedungsri | KEDUNGSRI-SIDOMULYO | 4.00 | 3.00 |
| 171 | 24,06,77,01,0169 | Sidomulyo | KEDUNGSRI-SIDOMULYO | 5.50 | 3.00 |
| | 78 | SIDOMULYO-MAWAR | | | |
| 172 | 24,06,78,01,0170 | Cilik | SIDOMULYO-MAWAR | 30.00 | 2.00 |
| | 79 | JETIS-WAWAR | | | |
| 173 | 24,06,79,01,0171 | Wawar | JETIS-WAWAR | 16.00 | 7.00 |
| | 80 | BRENGKOL-MEGULUNG | | | |
| 174 | 24,06,80,01,0172 | Megulung 1 | BRENGKOL-MEGULUNG | 5.00 | 4.00 |
| 175 | 24,06,80,02,0173 | Megulung 3 | BRENGKOL-MEGULUNG | 3.00 | 4.00 |
| 175 | 24,06,80,03,0174 | Prapag | BRENGKOL-MEGULUNG | 40.00 | 4.00 |
| 177 | 24,06,80,04,0175 | Brengkol 1 | BRENGKOL-MEGULUNG | 4.00 | 4.00 |
| 178 | 24,06,80,05,0176 | Brengkol 2 | BRENGKOL-MEGULUNG | 12.00 | 4.00 |
| | 81 | PITURUH-KESAWEN-MEGULUNG | | | |
| 179 | 24,06,81,01,0177 | Pituruh | PITURUH-KESAWEN-MEGULUNG | 3.50 | 3.50 |
| 180 | 24,06,81,02,0178 | Bodroyono | PITURUH-KESAWEN-MEGULUNG | 5.00 | 3.00 |
| 181 | 24,06,81,03,0179 | Binorong | PITURUH-KESAWEN-MEGULUNG | 5.00 | 3.00 |
| | 82 | PITURUH-MEGULUNG | | | |
| 182 | 24,06,82,01,0180 | Pituruh 1 | PITURUH-MEGULUNG | 4.00 | |
| 183 | 24,06,82,02,0181 | Megulung 4 | PITURUH-MEGULUNG | 2.00 | |
| | 83 | KEMIRI-PITURUH | | | |
| 184 | 24,06,83,01,0182 | Pituruh | KEMIRI-PITURUH | 2.50 | |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| 185 | 24,06,83,02,0183 | Ngampel 1 | KEMIRI-PITURUH | 4.00 | |
| 186 | 24,06,83,03,0184 | Ngampel 2 | KEMIRI-PITURUH | 3.00 | |
| 187 | 24,06,83,04,0185 | Ngampel 3 | KEMIRI-PITURUH | 6.00 | |
| 188 | 24,06,83,05,0186 | Kroya | KEMIRI-PITURUH | 8.00 | |
| | 84 | GEBANG-MEGULUNG | | | |
| 189 | 24,06,84,01,0187 | Pangkalan | GEBANG-MEGULUNG | 22.00 | |
| 190 | 24,06,84,02,0188 | Sumber | GEBANG-MEGULUNG | 3.00 | |
| 191 | 24,06,84,03,0189 | Wonoyoso | GEBANG-MEGULUNG | 3.00 | |
| 192 | 24,06,84,04,0190 | Tapen | GEBANG-MEGULUNG | 4.00 | |
| 193 | 24,06,84,05,0191 | Blekatuk | GEBANG-MEGULUNG | 5.40 | |
| | 85 | KLEPU-PITURUH | | | |
| 194 | 24,06,85,01,0192 | Pepe 1 | KLEPU-PITURUH | 2.00 | 6.00 |
| 195 | 24,06,85,02,0193 | Pepe 2 | KLEPU-PITURUH | 3.30 | 4.00 |
| 196 | 24,06,85,03,0194 | Pepe 3 | KLEPU-PITURUH | 21.00 | 4.00 |
| 197 | 24,06,85,04,0195 | Pepe 4 | KLEPU-PITURUH | 3.00 | 4.00 |
| | 86 | KEDUNGSRI-WONOSARI | | | |
| 198 | 24,06,86,01,0196 | Kedungsri | KEDUNGSRI-WONOSARI | 3.00 | 4.00 |
| 199 | 24,06,86,02,0197 | Kedungsri 2 | KEDUNGSRI-WONOSARI | 54.00 | 3.00 |
| 200 | 24,06,86,03,0198 | Wonorejo Wetan | KEDUNGSRI-WONOSARI | 2.00 | 4.00 |
| 201 | 24,06,86,04,0199 | Wonorejo | KEDUNGSRI-WONOSARI | 26.00 | |
| | 87 | BOROKULON-LENGKONG | | | |
| 202 | 24,06,87,01,0200 | Pakis | BOROKULON-LENGKONG | 4.50 | 7.00 |
| | 88 | KLEDUNG-SEREN | | | |
| 203 | 24,06,88,01,0201 | Sucen 1 | KLEDUNG-SEREN | 11.00 | 6.00 |
| 204 | 24,06,88,02,0202 | Sucen 2 | KLEDUNG-SEREN | 3.00 | 7.00 |
| | 89 | KATERBAN-PG.WIJAYAN | | | |
| 205 | 24,06,89,01,0203 | Suren | KATERBAN-PG.WIJAYAN | 11.00 | 3.00 |
| 206 | 24,06,89,01,0204 | Pringgowijayan | KATERBAN-PG.WIJAYAN | 5.00 | 4.00 |
| | 90 | PANGENREJO-TEGALREJO | | | |
| 207 | 24,06,90,01,0205 | Pangenrejo | PANGENREJO-TEGALREJO | 3.00 | 4.00 |
| | 91 | TEGALREJO-PLANDI | | | |
| 208 | 24,06,91,01,0206 | Suroyasan | TEGALREJO-PLANDI | 3.50 | |
| 209 | 24,06,91,02,0207 | Banyuurip | TEGALREJO-PLANDI | 4.00 | |
| | 92 | POPONGAN-BANYU URIP | | | |
| 210 | 24,06,92,01,0208 | Popongan | POPONGAN-BANYU URIP | 2.00 | 3.00 |
| 211 | 24,06,92,02,0209 | Suroyasan | POPONGAN-BANYU URIP | 3.00 | 3.50 |
| 212 | 24,06,92,03,0210 | Nyomlek | POPONGAN-BANYU URIP | 5.00 | 4.00 |
| 213 | 24,06,92,04,0211 | Kuning | POPONGAN-BANYU URIP | 4.00 | 4.00 |
| | 93 | GUYANGAN-NGOMBOL | | | |
| 214 | 24,06,93,01,0212 | Bubutan | GUYANGAN-NGOMBOL | 3.00 | 4.00 |
| | 95 | KESAWEN-KALIGLAGAH | | | |
| 215 | 24,06,95,01,0213 | Trigasi 1 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 2.40 | 4.00 |
| 216 | 24,06,95,02,0214 | Trigasi 2 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 9.00 | 4.00 |
| 217 | 24,06,95,03,0215 | Kesawen 1 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 6.00 | 3.00 |
| 218 | 24,06,95,04,0216 | Kesawen 2 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 2.00 | 3.00 |
| 219 | 24,06,95,05,0217 | Kapiteran 1 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 4.00 | 4.00 |
| 220 | 24,06,95,06,0218 | Kapiteran 2 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 7.50 | 3.00 |
| 221 | 24,06,95,07,0219 | Kaliglagah 1 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 28.00 | 3.00 |
| 222 | 24,06,95,08,0220 | Kaliglagah 2 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 2.00 | 4.00 |
| 223 | 24,06,95,09,0221 | Kaliglagah 3 | KESAWEN-KALIGLAGAH | 2.00 | 4.00 |
| | 96 | KALIGLAGAH-WONOSIDO | | | |
| 224 | 24,06,96,01,0222 | Wonosido | KALIGLAGAH-WONOSIDO | 3.00 | 3.50 |
| | 97 | SAMBENG-SAREN | | | |
| 225 | 24,06,97,01,0223 | Saren 1 | SAMBENG-SAREN | 5.00 | 4.00 |
| | 98 | PUCANGAGUNG-SAMBENG | | | |
| 226 | 24,06,98,01,0224 | Sambeng | PUCANGAGUNG-SAMBENG | 3.00 | 4.00 |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | | (M) | (M) |
| | 99 | | BAYAN-PUCANGAGUNG | | | |
| 227 | 24,06,99,01,0225 | | Pekutan 1 | BAYAN-PUCANGAGUNG | 5.00 | 4.00 |
| 228 | 24,06,99,02,0226 | | Pekutan 2 | BAYAN-PUCANGAGUNG | 3.00 | 4.00 |
| 229 | 24,06,99,03,0227 | | Pucangagung | BAYAN-PUCANGAGUNG | 3.00 | 4.00 |
| | 101 | | CEMPDK-G .CONDONG-KEMRANGGEN | | | |
| 230 | 24,06,101,01,0228 | | Kemrangen | CEMPDK-G .CONDONG-KEMRANGGEN | 10.00 | 4.00 |
| | 102 | | PAKISARUM-CEMPEDAK | | | |
| 231 | 24,06,102,01,0229 | | Pakisarum 1 | PAKISARUM-CEMPEDAK | 7.00 | 4.00 |
| 232 | 24,06,102,02,0230 | | Pakisarum 2 | PAKISARUM-CEMPEDAK | 5.00 | 4.00 |
| 233 | 24,06,102,03,0231 | | Cempedak 1 | PAKISARUM-CEMPEDAK | 7.00 | 4.00 |
| 234 | 24,06,102,04,0232 | | Cempedak 2 | PAKISARUM-CEMPEDAK | 8.00 | 4.00 |
| | 103 | | KEMIRI-PAKISARUM | | | |
| 235 | 24,06,103,01,0233 | | Pengairan | KEMIRI-PAKISARUM | 9.00 | 4.00 |
| 236 | 24,06,103,02,0234 | | Kalimeneng | KEMIRI-PAKISARUM | 2.50 | 3.00 |
| 237 | 24,06,103,03,0235 | | Kali Lamat Kedungpomahan | KEMIRI-PAKISARUM | 30.00 | 5.00 |
| 238 | 24,06,103,04,0236 | | Kali Kliling Kedungpomahan | KEMIRI-PAKISARUM | 6.00 | 3.00 |
| | 104 | | KALIKOTES-KALIGESING | | | |
| 239 | 24,06,104,01,0237 | | Kalikotes | KALIKOTES-KALIGESING | 21.00 | 3.00 |
| 240 | 24,06,104,02,0238 | | Kaligitung 1 | KALIKOTES-KALIGESING | 10.00 | 4.00 |
| 241 | 24,06,104,03,0239 | | Kaligitung 2 | KALIKOTES-KALIGESING | 9.00 | 4.00 |
| | 105 | | LONING-GIRIJOYO | | | |
| 242 | 24,06,105,01,0240 | | Turus | LONING-GIRIJOYO | 4.00 | 4.00 |
| | 106 | | BRUNO-GIRIJOYO | | | |
| 243 | 24,06,106,01,0241 | | Brunorejo | BRUNO-GIRIJOYO | 40.00 | 4.00 |
| | 107 | | BEDUG-MANISJANGAN | | | |
| 244 | 24,06,107,01,0242 | | Sokowuwuh | BEDUG-MANISJANGAN | 5.00 | 3.00 |
| 245 | 24,06,107,02,0243 | | Sidomukti | BEDUG-MANISJANGAN | 9.00 | 4.00 |
| | 109 | | KALIJAMBE-CACABAN LOR | | | |
| 246 | 24,06,109,01,0244 | | Kalijambe | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 20.50 | 3.00 |
| 247 | 24,06,109,02,0245 | | Jati | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 7.00 | 4.00 |
| 248 | 24,06,109,03,0246 | | Medono 1 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 2.00 | 4.00 |
| 249 | 24,06,109,04,0247 | | Medono 2 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 2.00 | 4.00 |
| 250 | 24,06,109,05,0248 | | Pekacangan 1 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 10.00 | 4.00 |
| 251 | 24,06,109,06,0249 | | Pekacangan 2 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 2.00 | 4.00 |
| 252 | 24,06,109,07,0250 | | Cacaban Lor 1 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 2.00 | 4.00 |
| 253 | 24,06,109,08,0251 | | Cacaban Lor 2 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 6.50 | 4.00 |
| 254 | 24,06,109,09,0252 | | Cacaban Lor 3 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 3.50 | 4.00 |
| 255 | 24,06,109,10,0253 | | Cacaban Lor 4 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | - | - |
| 256 | 24,06,109,11,0254 | | Cacaban Lor 5 | KALIJAMBE-CACABAN LOR | 5.00 | 3.00 |
| | 110 | | CACABAN LOR-BATAS MAGELANG | | | |
| 257 | 24,06,110,01,0255 | | Cacaban Lor 3 | CACABAN LOR-BATAS MAGELANG | 5.00 | 4.00 |
| 258 | 24,06,110,02,0256 | | Cacaban Lor 4 | CACABAN LOR-BATAS MAGELANG | 8.00 | 4.00 |
| | 111 | | BANYUASIN-CACABAN LOR | | | |
| 259 | 24,06,111,01,0257 | | Banyuasin | BANYUASIN-CACABAN LOR | 3.00 | |
| 260 | 24,06,111,02,0258 | | Ngargosari 1 | BANYUASIN-CACABAN LOR | 6.00 | |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| 261 | 24,06,111,03,0259 | Ngargosari 2 | BANYUASIN-CACABAN LOR | 7.00 | |
| 262 | 24,06,111,04,0260 | Kalipatas 1 | BANYUASIN-CACABAN LOR | 10.00 | |
| 263 | 24,06,111,05,0261 | Kalipatas 5 | BANYUASIN-CACABAN LOR | 5.40 | |
| 264 | 24,06,111,06,0262 | Kalipatas 3 | BANYUASIN-CACABAN LOR | 3.00 | |
| 265 | 24,06,111,07,0263 | Juwah 1 | BANYUASIN-CACABAN LOR | 6.00 | |
| 266 | 24,06,111,08,0264 | Juwah 2 | BANYUASIN-CACABAN LOR | 7.00 | |
| | 112 | BANYUASIN-TRIDADI | | | |
| 267 | 24,06,112,01,0265 | Banyuasin | BANYUASIN-TRIDADI | 16.00 | 4.00 |
| | 115 | KARANGREJO-NGARAN | | | |
| 268 | 24,06,115,01,0266 | Donorati 1 | KARANGREJO-NGARAN | 4.00 | 3.00 |
| 269 | 24,06,115,02,0267 | Donorati 2 | KARANGREJO-NGARAN | 5.00 | 3.00 |
| 270 | 24,06,115,03,0268 | Sudimoro | KARANGREJO-NGARAN | 3.00 | 3.00 |
| | 116 | KALIGESING-NGARAN | | | |
| 271 | 24,06,116,01,0269 | Kaligono | KALIGESING-NGARAN | 5.00 | 4.00 |
| 272 | 24,06,116,02,0270 | Sawahan | KALIGESING-NGARAN | 6.00 | 3.00 |
| 273 | 24,06,116,03,0271 | Ngaran | KALIGESING-NGARAN | 3.00 | 3.00 |
| | 117 | JEKETRO-DONOREJO | | | |
| 274 | 24,06,117,01,0272 | Palpitu | JEKETRO-DONOREJO | 10.00 | |
| | 118 | KALIREJO-HARGOROJO | | | |
| 275 | 24,06,118,01,0273 | Kalirejo | KALIREJO-HARGOROJO | 10.00 | 3.00 |
| | 121 | BAGELEN-HARGOROJO | | | |
| 276 | 24,06,121,01,0274 | Krendetan 1 | BAGELEN-HARGOROJO | 9.00 | 4.00 |
| 277 | 24,06,121,02,0275 | Krendetan 2 | BAGELEN-HARGOROJO | 10.00 | 4.00 |
| 278 | 24,06,121,03,0276 | Hargorojo 1 | BAGELEN-HARGOROJO | 5.00 | 4.00 |
| 279 | 24,06,121,04,0277 | Hargorojo 2 | BAGELEN-HARGOROJO | 10.00 | 3.00 |
| 280 | 24,06,121,05,0278 | Hargorojo 3 | BAGELEN-HARGOROJO | 10.00 | 3.00 |
| 281 | 24,06,121,06,0279 | Hargorojo 4 | BAGELEN-HARGOROJO | 6.00 | 3.00 |
| | 122 | SEMAGUNG-DURENSARI | | | |
| 282 | 24,06,122,01,0280 | Semagung 4 | SEMAGUNG-DURENSARI | 10.00 | 3.00 |
| 283 | 24,06,122,02,0281 | Semono | SEMAGUNG-DURENSARI | 5.00 | 3.00 |
| | 123 | JONO-WARENG | | | |
| 284 | 24,06,123,01,0282 | Jono | JONO-WARENG | 3.00 | |
| 285 | 24,06,123,02,0283 | Kese | JONO-WARENG | 4.00 | |
| 286 | 24,06,123,03,0284 | Giani | JONO-WARENG | 4.00 | |
| 287 | 24,06,123,04,0285 | Sawit | JONO-WARENG | 10.00 | |
| | 125 | TEGALMIRING-PIONO | | | |
| 288 | 24,06,125,01,0286 | Seboro Krapyak | TEGALMIRING-PIONO | 3.50 | 4.00 |
| | 126 | CENKREP LOR-K.SARI-GANGGENG | | | |
| 289 | 24,06,126,01,0287 | Semawung | CENKREP LOR-K.SARI-GANGGENG | 14.00 | |
| | 129 | KALIWUNGU-BLIMBING | | | |
| 290 | 24,06,129,01,0288 | Blimbing 1 | KALIWUNGU-BLIMBING | 2.00 | |
| 291 | 24,06,129,02,0289 | Blimbing 2 | KALIWUNGU-BLIMBING | 2.00 | |
| 293 | 24,06,129,03,0290 | Blimbing 3 | KALIWUNGU-BLIMBING | 3.00 | |
| | 130 | MLARAN-NGAGLIK | | | |
| 294 | 24,06,130,01,0291 | Ngemplak | MLARAN-NGAGLIK | 5.00 | 3.00 |
| 295 | 24,06,130,02,0292 | Keragilan | MLARAN-NGAGLIK | 5.00 | 3.00 |
| | 135 | GINTUNGAN-JETIS | | | |
| 296 | 24,06,135,01,0293 | Brejan 1 | GINTUNGAN-JETIS | 10.00 | |
| 297 | 24,06,135,02,0294 | Brejan 2 | GINTUNGAN-JETIS | 10.00 | |
| 298 | 24,06,135,03,0295 | Bulus 1 | GINTUNGAN-JETIS | 6.00 | |
| 299 | 24,06,135,04,0296 | Bulus 2 | GINTUNGAN-JETIS | 5.00 | |
| 300 | 24,06,135,05,0297 | Bulus 3 | GINTUNGAN-JETIS | 5.00 | |
| 301 | 24,06,135,06,0298 | Jetis 1 | GINTUNGAN-JETIS | 2.00 | |
| 302 | 24,06,135,07,0299 | Jetis 2 | GINTUNGAN-JETIS | 4.00 | |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| | 136 | TUNJUNGREJO-BLEKATUK | | | |
| 303 | 24,06,136,01,0300 | Blekatuk | TUNJUNGREJO-BLEKATUK | 4.00 | |
| | 140 | TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO | | | |
| 304 | 24,06,140,01,0301 | Sorogenen | TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO | 3.00 | |
| 305 | 24,06,140,02,0302 | Sipucung | TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO | 3.00 | |
| 306 | 24,06,140,03,0303 | Bokongan 1 | TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO | 2.00 | |
| 307 | 24,06,140,04,0304 | Bikingan 2 | TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO | 3.00 | |
| 308 | 24,06,140,05,0305 | Bokongan 3 | TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO | 2.00 | |
| 309 | 24,06,140,06,0306 | Jurang Jero | TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO | 5.00 | |
| | 143 | WINONG-GIRIJOYO | | | |
| 310 | 24,06,143,01,0307 | Sidomulyo | WINONG-GIRIJOYO | 4.00 | 4.00 |
| 311 | 24,06,143,02,0308 | Sutoragan | WINONG-GIRIJOYO | 5.00 | 4.00 |
| 312 | 24,06,143,03,0309 | Jatiwangsan | WINONG-GIRIJOYO | 3.50 | |
| 313 | 24,06,143,04,0310 | Girimulyo | WINONG-GIRIJOYO | 2.00 | |
| 314 | 24,06,143,05,0311 | Sawangan | WINONG-GIRIJOYO | 6.00 | |
| | 145 | STASIUN BUTUH | | | |
| 315 | 24,06,145,01,0312 | Butuh | STASIUN BUTUH | 5.00 | |
| | 150 | CANGKREP-AG PUTRO-K SARI | | | |
| 316 | 24,06,150,01,0313 | Kedungsari 1 | CANGKREP-AG PUTRO-K SARI | 4.00 | |
| 317 | 24,06,150,02,0314 | Kedungsari 2 | CANGKREP-AG PUTRO-K SARI | 2.50 | |
| | 151 | PEKACANGAN-WADAS-KALIPATAS | | | |
| 318 | 24,06,151,01,0315 | Kaliancer 1 | PEKACANGAN-WADAS-KALIPATAS | 8.00 | 3.00 |
| 319 | 24,06,151,02,0316 | Kaliancer 2 | PEKACANGAN-WADAS-KALIPATAS | 8.00 | 3.00 |
| | 152 | JALUR LAMBAT PWR-KTA | | | |
| 320 | 24,06,152,01,0317 | Grantung Legog | JALUR LAMBAT PWR-KTA | 3.00 | 2.00 |
| 321 | 24,06,152,02,0318 | Batoh | JALUR LAMBAT PWR-KTA | 3.00 | 2.00 |
| 322 | 24,06,152,03,0319 | Kalidulang | JALUR LAMBAT PWR-KTA | 20.00 | 3.00 |
| 323 | 24,06,152,04,0320 | Saluran Bayan | JALUR LAMBAT PWR-KTA | 3.00 | 2.50 |
| 324 | 24,06,152,04,0321 | Basole | JALUR LAMBAT PWR-KTA | 3.00 | 2.50 |
| 325 | 24,06,152,04,0322 | Kalijali | JALUR LAMBAT PWR-KTA | 40.00 | 5.00 |
| | 153 | JL DS SINDURJAN | | | |
| 326 | 24,06,153,01,0323 | Ngrapah 1 | JL DS SINDURJAN | 2.00 | |
| 327 | 24,06,153,02,0324 | Ngrapah 2 | JL DS SINDURJAN | 3.00 | |
| 328 | 24,06,153,03,0325 | Ngrapah 3 | JL DS SINDURJAN | 3.00 | |
| | 155 | MRANTI-BULUS | | | |
| 329 | 24,06,155,01,0326 | Mranti | MRANTI-BULUS | 7.00 | |
| | 157 | PEKACANGAN-WADAS | | | |
| 330 | 24,06,157,01,0327 | Wadas | PEKACANGAN-WADAS | 6.00 | |
| | 158 | GEBANG-JETIS | | | |
| 331 | 24,06,158,01,0328 | Pakem 1 | GEBANG-JETIS | 21.00 | |
| 332 | 24,06,158,02,0329 | Pakem 2 | GEBANG-JETIS | 6.00 | |
| | 159 | GRANTUNGLEGOK-TANJUNGREJO | | | |
| 333 | 24,06,159,01,0330 | Tanjunganom | GRANTUNGLEGOK-TANJUNGREJO | 15.00 | |
| | 160 | KALIMENENG-PURBAYAN | | | |
| 334 | 24,06,160,01,0331 | Kalimeneng | KALIMENENG-PURBAYAN | 2.00 | |
| 335 | 24,06,160,02,0332 | Rejowinangun | KALIMENENG-PURBAYAN | 2.00 | |
| | 161 | KEDUREN-SENDANGSARI | | | |
| 336 | 24,06,161,01,0333 | Kedondong | KEDUREN-SENDANGSARI | 4.00 | |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| | 162 | NGEMPLAK-TLOGOSONO | | | |
| 337 | 24,06,162,01,0334 | Ngemplak | NGEMPLAK-TLOGOSONO | 5.00 | |
| | 163 | WINONG-PUCANGAGUNG | | | |
| 338 | 24,06,163,01,0335 | Winong Kidul | WINONG-PUCANGAGUNG | 4.00 | |
| | 167 | CANDISARI-CONDONGSARI | | | |
| 339 | 24,06,167,01,0336 | Candisari | CANDISARI-CONDONGSARI | 3.00 | |
| | 171 | JATINGARANG-KRANDEGAN | | | |
| 340 | 24,06,171,01,0337 | Tangkisan | JATINGARANG-KRANDEGAN | 3.50 | |
| 341 | 24,06,171,02,0338 | Krandegan | JATINGARANG-KRANDEGAN | 3.00 | 3.00 |
| | 172 | JATIMALANG-PANTAI | | | |
| 342 | 24,06,172,01,0339 | Jatimalang | JATIMALANG-PANTAI | 18.00 | |
| | 173 | SEMAWUNG DALEMAN-SEMAWUNG KMBR | | | |
| 343 | 24,06,173,01,0340 | Semawung Daleman | SEMAWUNG DALEMAN-SEMAWUNG KMBR | 11.00 | |
| | 174 | SUREN-WARENG | | | |
| 344 | 24,06,174,01,0341 | Purwosari | SUREN-WARENG | 7.00 | |
| | 175 | TRIDADI-SOMOWONO | | | |
| 345 | 24,06,175,01,0342 | Tridadi 1 | TRIDADI-SOMOWONO | 5.00 | |
| 346 | 24,06,175,02,0343 | Tridadi 2 | TRIDADI-SOMOWONO | 3.50 | |
| 347 | 24,06,175,03,0344 | Kedunglo | TRIDADI-SOMOWONO | 16.50 | |
| | 176 | KLEDUNG-LENGKONG | | | |
| 348 | 24,06,176,01,0345 | Condongsari 1 | KLEDUNG-LENGKONG | 9.00 | |
| 349 | 24,06,176,01,0346 | Condongsari 2 | KLEDUNG-LENGKONG | 4.00 | |
| 350 | 24,06,176,01,0347 | Condongsari 3 | KLEDUNG-LENGKONG | 5.00 | |
| | 177 | JL.SUDIRMAN | | | |
| 351 | 24,06,177,01,0348 | Koplak | JL.SUDIRMAN | 6.00 | |
| | 178 | JL. A YANI | | | |
| 352 | 24,06,178,01,0349 | Penceng | JL. A YANI | 12.00 | |
| | 179 | JL.URIP SUMOHARJO | | | |
| 353 | 24,06,179,01,0350 | Junjungan | JL.URIP SUMOHARJO | 3.00 | |
| 354 | 24,06,179,02,0351 | Kedungputri 2 | JL.URIP SUMOHARJO | 6.80 | |
| 355 | 24,06,179,03,0352 | Kepatihan | JL.URIP SUMOHARJO | 3.00 | |
| | 180 | JL.KH AHMAD DAHLAN | | | |
| 356 | 24,06,180,01,0353 | Pandekluweh | JL.KH AHMAD DAHLAN | 12.00 | |
| | 181 | JL.WR. SUPRATMAN | | | |
| 357 | 24,06,181,01,0354 | Liwung | JL.WR. SUPRATMAN | 84.00 | |
| | 182 | JL.PAHLAWAN | | | |
| 358 | 24,06,182,01,0355 | Bruderan | JL.PAHLAWAN | 3.00 | |
| | 183 | JL.SUTOYO | | | |
| 359 | 24,06,183,01,0356 | Kedungputri 3 | JL.SUTOYO | 6.80 | |
| | 184 | JL.WAHID HASYIM | | | |
| 360 | 24,06,184,01,0357 | Kedungputri 1 | JL.WAHID HASYIM | 3.00 | |
| | 188 | JL.TEGALSARI I | | | |
| 361 | 24,06,188,01,0358 | Tegalsari 1 | JL.TEGALSARI I | 2.00 | |
| 362 | 24,06,188,02,0359 | Tegalsari 2 | JL.TEGALSARI I | 8.30 | |
| | 191 | JL.DEWI SATRIKA | | | |
| 363 | 24,06,191,01,0360 | Kedungputri 4 | JL.DEWI SATRIKA | 5.45 | |
| | 198 | JL.DR.SETYABUDI | | | |
| 364 | 24,06,198,01,0361 | Kemuning | JL.DR.SETYABUDI | 5.55 | |
| | 200 | JL.SURYOKESUMAN | | | |
| 365 | 24,06,200,01,0362 | Kedungputri 7 | JL.SURYOKESUMAN | 7.40 | |
| | 201 | JL.KARTINI | | | |
| 366 | 24,06,201,01,0363 | Kedungputri 5 | JL.KARTINI | 6.20 | |
| | 206 | JL.PEMOTONG HEWAN | | | |
| 367 | 24,06,206,01,0364 | Ngentak | JL.PEMOTONG HEWAN | 10.00 | |

| No URUT | No. RUAS JEMBATAN | NAMA JEMBATAN / SUNGAI | NAMA RUAS JALAN | DEMENSI | |
|---------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|-------|
| | NO, JEMBATAN | | | PANJANG | LEBAR |
| | | | | (M) | (M) |
| | 207 | JL.SINGODRANAN | | | |
| 368 | 24,06,207,01,0365 | Singodranan | JL.SINGODRANAN | 10.00 | |
| | 208 | JL.KYAI BRENGKEL | | | |
| 369 | 24,06,208,01,0366 | Kyai Brengkel | JL.KYAI BRENGKEL | 4.00 | |
| | 212 | JL.KUNCEN | | | |
| 370 | 24,06,212,01,0367 | Baledono | JL.KUNCEN | 10.00 | 3.00 |
| | 213 | LINGKAR UTARA | | | |
| 371 | 24,06,212,01,0370 | Kalimranti | LINGKAR UTARA | 11.00 | 7.00 |
| 372 | 24,06,212,01,0371 | Kayulawang | LINGKAR UTARA | 8.00 | 7.00 |
| 373 | 24,06,212,01,0372 | Tegalsari | LINGKAR UTARA | 6.00 | 7.00 |
| | 214 | BRENGGONG-KEDUNGGUBAH | | | |
| 374 | 24,06,212,01,0373 | Brenggong | BRENGGONG-KEDUNGGUBAH | 30.00 | 7.00 |
| | 215 | JALAN-JALAN DESA | | | |
| 375 | | Pacekelan / Desa Pacekelan Pwr | JALAN-JALAN DESA | 12.00 | |
| 376 | | Kunirejo/ Desa Kunirejo Kec Bth | JALAN-JALAN DESA | 60.00 | |
| 377 | | Gantung Grantung Bayan | JALAN-JALAN DESA | 60.00 | |
| 378 | | Gantung Kalisemo Loano | JALAN-JALAN DESA | 60.00 | |
| 379 | | Gantung Seren Gebang | JALAN-JALAN DESA | 21.00 | |
| 380 | | Gantung Guntur | JALAN-JALAN DESA | 21.00 | |
| 381 | | Gantung Soko Bagelen | JALAN-JALAN DESA | 21.00 | |
| 382 | | Gantung Separe Loano | JALAN-JALAN DESA | 21.00 | |
| 383 | 24,06,144,01,0374 | Sembir | Krendetan-Purwodadi | 97.00 | |
| | | | | | |
| | | JUMLAH | | 3,846.00 | |

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERU SASONGKO, S.H.
Pembina TK.I
NIP 19650905 199101 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR: 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

JARINGAN TRAYEK AKAP, AKDP, ANGKUTAN PERDESAAN,
 DAN ANGKUTAN PERBATASAN KABUPATEN PURWOREJO

A. AKAP

| NO. | JALUR |
|-----|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Solo-Yogya-Purworejo-Cilacap PP |
| 2 | Yogya-Purworejo-Cilacap PP |
| 3 | Solo-Yogya-Purworejo-Purwokerto PP |
| 4 | Yogya-Purworejo-Purwokerto PP |
| 5 | Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta PP |
| 6 | Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta-Bogor PP |
| 7 | Solo-Yogya-Purworejo-Purwokerto-Tasikmalaya PP |
| 8 | Solo-Yogya-Purworejo-Jakarta-Lampung-Pekanbaru |
| 9 | Solo-Yogya-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung Semarang-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung |
| 10 | Surabaya- Yogya-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung-Jakarta |
| 11 | Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru |
| 12 | GunungKidul-Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta- PP |
| 13 | Surabaya-Yogya-Purworejo-Jakarta |
| 14 | Surabaya- Yogya-Purworejo-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru |
| 15 | Purworejo-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru-Aceh |
| 16 | Purworejo-Bandung-Lampung |
| 17 | Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung-Jakarta-Lampung |
| 18 | Purworejo-Jakarta-Bogor |
| 19 | Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung |
| 20 | Solo- Yogya-Purworejo-Bandung |

B. AKDP

| NO. | JALUR |
|-----|----------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | Semarang-Purworejo-Purwokerto PP |
| 2 | Semarang-Purworejo-Cilacap PP |
| 3 | Purworejo-Magelang PP |
| 4 | Purworejo-Wonosobo PP |
| 5 | Purworejo-Kebumen PP |

C. Angkutan Perdesaan

| NO. | JALUR |
|-----|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Purworejo - Kutoarjo |
| 2 | Purworejo-Krendetan - Dadirejo |
| 3 | Purworejo - Kaliboto |
| 4 | Purworejo - Banyuurip - Sendangsari |
| 5 | Purworejo - Tegalmiring - Bencorejo |
| 6 | Kutoarjo - Klepu - Pituruh |
| 7 | Kutoarjo - Klepu - Pituruh- Kaligintung |
| 8 | Kutoarjo - Kemiri - Pituruh |

| NO. | JALUR |
|-----|---|
| 1 | 2 |
| 9 | Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Prapaglor |
| 10 | Kutoarjo - Kedungagung - Wonorejo |
| 11 | Kutoarjo - Gng Tugel - Winong |
| 12 | Purworejo - Gintungan - Winong |
| 13 | Purworejo - Banyuasin |
| 14 | Purworejo - Kaligesing |
| 15 | Purworejo - Caok - Tlogorejo |
| 16 | Purworejo - Somongari - Jatirejo |
| 17 | Purworejo - Semagung |
| 18 | Kutoarjo - Kemiri - Bruno |
| 19 | Cepedak - Bruno - Kemiri - KTA |
| 20 | Purworejo - Keduren - Sendangsari |
| 21 | Pundensari - Keduren - Purworejo |
| 22 | Surorejo - Tegalrejo - Purworejo |
| 23 | Kutoarjo - Bayan - Piyono - Wingko |
| 24 | Kutoarjo - Pekutan - Sambeng - Seren |
| 25 | Kutoarjo - Gebang - Brengkol |
| 26 | Purworejo - Ngasinan |
| 27 | Purworejo - Purwodadi - Ngombol |
| 28 | Purworejo - Purwodadi - Ngombol- Wunut |
| 29 | Purworejo - Purwodadi - Ngombol-Wonoroto |
| 30 | Purworejo - Purwodadi - Gesing - Nampurejo |
| 31 | PWR - Karangduwur - Kemiri - KTA - Andong - Sembaon- Grabag - Purwodadi - Krendetan- Bagelen - Piji - Cangkrep- PWR |
| 32 | Kutoarjo - Ketawang |
| 33 | Kutoarjo - Suren - Wareng - Sidomulyo |
| 34 | Kutoarjo - Grabag - Wunut - Wonoroto |
| 35 | Purworejo - Jalingkut - Terminal Bus PWR |
| 36 | Purworejo - Bulus |
| 37 | Purworejo - Maron - Redin - Kemiri |
| 38 | Kutoarjo - Kemiri - Kedungpomahan Kulon |
| 39 | Purworejo - Kaligesing - Goa Seplawan - Pandanrejo |
| 40 | Purworejo - Krendetan - Tlogokotes- Somorejo |
| 41 | Purworejo - Krendetan - Bugel |
| 42 | Purworejo - Bagelen - Haargorojo |
| 43 | Purworejo - Dewi - Tanjung Anom |
| 44 | PWR - Perum Boro - Pakisrejo - Bajangrejo |
| 45 | Purworejo - Jenar - Wingkorejo |
| 46 | Purworejo - Winong - Sawangan |
| 47 | Purworejo - Gebang - Tlogosono - Redin |
| 48 | Purworejo - Bayan - Bringin - Seren |
| 49 | Purworejo - Sikemplong - Boro Wetan |
| 50 | Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Kali Glagah |
| 51 | Kutoarjo - Kaliwatu- Kranggan - Paitan |
| 52 | Kutoarjo - Loning - Giriloyo |
| 53 | Purworejo - Ngaran |
| 54 | Purworejo - Cacaban - Kalitapas |
| 55 | Purworejo - Ketosari - Sidomukti |
| 56 | Purworejo - Kaliboto - Kaliwader - Kalitapas |
| 57 | Purworejo - Purwodadi - Jogoboyo |
| 58 | Purworejo - Brenggong - Kedunggubah |
| 59 | Sokoagung - Clapar - Tambakrejo - PWR |
| 60 | Kutoarjo - Kedungpomahan Wetan |
| 61 | Sidorejo - Cangkrep - Purworejo |
| 62 | Kalinongko - Purworejo |
| 63 | Purworejo - Kalikalong - Rimun |
| 64 | Wonoroto - Ngombol - Banyuurip - Lengkong - Purworejo |
| 65 | Pogungrejo - Tangkisan - Bandungkidul - Kutoarjo |

| NO. | JALUR |
|-----|---|
| 1 | 2 |
| 66 | Lingkar Kota |
| 67 | Terminal Bus - Kolam Renang Artha Tirta |

D. Angkutan Perbatasan

| NO. | JALUR |
|-----|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Pendowo (Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo) - Kulonprogo PP |

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN



LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR: 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH

| No | Nama Daerah irigasi | Luas Areal (Ha) |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 1 | DI Boro | 5.136 |
| 2 | DI Kedungputri | 4.341 |
| 3 | DI Waduk Wadaslintang | 10.431 |
| Total | | 19.908 |

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

| No | Nama Daerah irigasi | Luas Areal (Ha) |
|-------|---------------------|-----------------|
| 1 | DI Watujagir | 210 |
| 2 | DI Loning Kragilan | 2.532 |
| Total | | 2.742 |

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN PURWOREJO

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|----|--------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | u 1 | Andong | 4 |
| 2 | 2 | Awis | 16 |
| 3 | 187 | Banaran | 10 |
| 4 | 3 | Bangkong | 9 |
| 5 | 4 | Banyusurup | 4 |
| 6 | 188 | Bapangsari | 20 |
| 7 | 5 | Beji | 15 |
| 8 | 6 | Bekekang | 11 |
| 9 | 7 | Bekok III | 13 |
| 10 | 189 | Bekokok I | 11 |
| 11 | 190 | Bekokok II | 15 |
| 12 | 8 | Bengkal | 70 |
| 13 | 9 | Bengkek I | 24 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|----|--------------------|----------------|--------------------------------|
| 14 | 10 | Bengkek II | 13 |
| 15 | 11 | Besole | 28 |
| 16 | 12 | Blade | 7 |
| 17 | 13 | Bleber | 60 |
| 18 | 14 | Bojong | 8 |
| 19 | 15 | Brengkok | 4 |
| 20 | 16 | Brondong I | 25 |
| 21 | 17 | Brondong II | 18 |
| 22 | 18 | Brondong III | 11 |
| 23 | 19 | Buhmati | 10 |
| 24 | 191 | Bugel | 23 |
| 25 | 20 | Bulus | 27 |
| 26 | 21 | Caban I | 10 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|----|--------------------|----------------|--------------------------------|
| 27 | 22 | Caban II | 24 |
| 28 | 23 | Caban III | 10 |
| 29 | 24 | Cangkring | 6 |
| 30 | 192 | Cawang Kanan | 1 |
| 31 | 193 | Cawang Kiri | 3 |
| 32 | 25 | Cempedak | 122 |
| 33 | 194 | Cepego | 3 |
| 34 | 195 | Cepit | 7 |
| 35 | 26 | Clapar | 10 |
| 36 | 27 | Cluwek | 336 |
| 37 | 196 | Condong | 51 |
| 38 | 28 | Curug | 4 |
| 39 | 197 | Dawuhan | 3 |
| 40 | 198 | Depok | 11 |
| 41 | 29 | Donorejo | 14 |
| 42 | 30 | Dukuh | 5 |
| 43 | 31 | Dung Bendo | 17 |
| 44 | 32 | Dung Lemper | 15 |
| 45 | 199 | Dung Suter | 10 |
| 46 | 33 | Dupo | 15 |
| 47 | 34 | Ganggeng | 32 |
| 48 | 200 | Gedangan | 30 |
| 49 | 201 | Girirejo | 14 |
| 50 | 35 | Gladak | 14 |
| 51 | 202 | Glasah | 32 |
| 52 | 36 | Gondosuli | 25 |
| 53 | 37 | Gowang | 7 |
| 54 | 38 | Guntur | 326 |
| 55 | 39 | Gunung Butak | 168 |
| 56 | 40 | Gupit | 49 |
| 57 | 41 | Gusti Ngisor | 105 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|----|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| 58 | 42 | Guyangan | 12 |
| 59 | 43 | Jambean | 17 |
| 60 | 44 | Jati | 4 |
| 61 | 203 | Jatikontal | 60 |
| 62 | 204 | Jatimalang | 75 |
| 63 | 205 | Jemberan | 10 |
| 64 | 45 | Jeruk | 5 |
| 65 | 46 | Jetis | 15 |
| 66 | 206 | Jogoboyo | 30 |
| 67 | 47 | Jonggol | 5 |
| 68 | 207 | Jonokerto | 4 |
| 69 | 48 | Jrakah | 405 |
| 70 | 49 | Juwah | 37 |
| 71 | 50 | Juwah | 26 |
| 72 | 51 | Kalibawang | 42 |
| 73 | 52 | Kalidono | 8 |
| 74 | 53 | Kaliduren | 190 |
| 75 | 208 | Kaligalih | 4 |
| 76 | 54 | Kaliglagah | 15 |
| 77 | 55 | Kaliharjo | 26 |
| 78 | 56 | Kalikalong | 33 |
| 79 | 209 | Kalimati | 3 |
| 80 | 57 | Kalimeneng | 15 |
| 81 | 210 | Kalimeneng Kiri | 310 |
| 82 | 211 | Kalisat | 1 |
| 83 | 58 | Kalisemo | 599 |
| 84 | 212 | Kalisemo | 12 |
| 85 | 213 | Karanganyar | 40 |
| 86 | 59 | Karang Pencil | 75 |
| 87 | 214 | Karanggedang | 11 |
| 88 | 60 | Karangrejo | 43 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------|
| 89 | 61 | Kebangsan | 93 |
| 90 | 62 | Kebo Kuning | 86 |
| 91 | 215 | Keburuan | 32 |
| 92 | 216 | Kecapi | 37 |
| 93 | 63 | Kedondong | 282 |
| 94 | 64 | Kedung Agung | 9 |
| 95 | 65 | Kedung Bibis | 10 |
| 96 | 66 | Kedung Bulu | 5 |
| 97 | 67 | Kedung Kidang | 70 |
| 98 | 68 | Kedung Lele | 19 |
| 99 | 217 | Kedung Lumpang | 8 |
| 100 | 69 | Kedung Minger | 6 |
| 101 | 70 | Kedung Miring | 46 |
| 102 | 218 | Kedung Pomahan | 16 |
| 103 | 71 | Kedung Tebok | 12 |
| 104 | 219 | Kedung Wadas | 5 |
| 105 | 72 | Kemranggen I | 27 |
| 106 | 73 | Kemranggen II | 53 |
| 107 | 74 | Kepising | 211 |
| 108 | 75 | Kinger | 20 |
| 109 | 76 | Klereng I | 15 |
| 110 | 77 | Klereng II | 22 |
| 111 | 78 | Klereng III | 16 |
| 112 | 79 | Kombang I | 33 |
| 113 | 80 | Kombang II | 18 |
| 114 | 81 | Kombang III | 25 |
| 115 | 82 | Kopeng | 3 |
| 116 | 83 | Krandon | 153 |
| 117 | 84 | Krasak | 30 |
| 118 | 85 | Krasak | 8 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------|
| 119 | 86 | Krengseng | 17 |
| 120 | 87 | Larangan | 12 |
| 121 | 88 | Lingsang | 10 |
| 122 | 89 | Loroggrantung | 30 |
| 123 | 220 | Malang | 31 |
| 124 | 90 | Mawung | 10 |
| 125 | 91 | Medono | 20 |
| 126 | 92 | Mentosaran | 27 |
| 127 | 93 | Mranti | 268 |
| 128 | 94 | Mranti I | 18 |
| 129 | 95 | Mranti II | 20 |
| 130 | 96 | Mudal | 59 |
| 131 | 221 | Mudal | 8 |
| 132 | 97 | Munggang | 15 |
| 133 | 98 | Ngabean | 10 |
| 134 | 99 | Ngadirejo | 13 |
| 135 | 100 | Ngaglik I | 15 |
| 136 | 101 | Ngaglik II | 19 |
| 137 | 102 | Ngasem | 22 |
| 138 | 103 | Ngasem I | 15 |
| 139 | 104 | Ngasem II | 16 |
| 140 | 105 | Ngasinan | 61 |
| 141 | 222 | Ngembel | 2 |
| 142 | 223 | Ngentak | 47 |
| 143 | 106 | Onggowangsan | 98 |
| 144 | 224 | Pagak | 43 |
| 145 | 107 | Pakistan | 16 |
| 146 | 108 | Pakisarum | 17 |
| 147 | 109 | Pamriyan | 155 |
| 148 | 110 | Panceng | 2 |
| 149 | 111 | Pandanrejo | 16 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 150 | 112 | Pandek | 5 |
| 151 | 113 | Pategongan | 11 |
| 152 | 114 | Pawotan | 84 |
| 153 | 115 | PB. Sengon | 7 |
| 154 | 116 | PB. Watubelah | 19 |
| 155 | 117 | Pending | 10 |
| 156 | 118 | Pending | 44 |
| 157 | 225 | Penjalin | 1 |
| 158 | 119 | Penungkulan | 581 |
| 159 | 120 | Pepedan | 20 |
| 160 | 121 | Petung Tanah Putih | 48 |
| 161 | 122 | Plandaan | 4 |
| 162 | 123 | Planditan | 68 |
| 163 | 124 | Plipiran | 17 |
| 164 | 125 | Ploro | 225 |
| 165 | 126 | Podang | 10 |
| 166 | 127 | Pomahan | 25 |
| 167 | 226 | Pucungan I | 6 |
| 168 | 227 | Pucungan II | 2 |
| 169 | 128 | Purbowono | 18 |
| 170 | 129 | Putak | 8 |
| 171 | 130 | Randuparang | 3 |
| 172 | 131 | Remun | 10 |
| 173 | 132 | Santren | 40 |
| 174 | 133 | Sawangan (Ds. Brunorejo - Bruno) | 19 |
| 175 | 134 | Sawangan (Ds. Gowong - Bruno) | 15 |
| 176 | 228 | Sebanggai | 3 |
| 177 | 229 | Securi | 2 |
| 178 | 135 | Sedayu I | 21 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------|
| 179 | 136 | Sedayu II | 79 |
| 180 | 230 | Seduren | 13 |
| 181 | 137 | Semawung | 99 |
| 182 | 138 | Separe | 53 |
| 183 | 139 | Seprih | 11 |
| 184 | 140 | Setran | 21 |
| 185 | 231 | Sewalo | 1 |
| 186 | 232 | Sibedog | 5 |
| 187 | 141 | Siblembeng | 7 |
| 188 | 233 | Sibokong | 22 |
| 189 | 234 | Sidoleren | 6 |
| 190 | 235 | Sigigis | 25 |
| 191 | 236 | Sijambu | 5 |
| 192 | 142 | Sijeruk | 26 |
| 193 | 237 | Sikidang | 5 |
| 194 | 143 | Silanang | 14 |
| 195 | 144 | Sileteh | 25 |
| 196 | 238 | Silir | 8 |
| 197 | 239 | Siluhur | 5 |
| 198 | 145 | Silumpang | 12 |
| 199 | 146 | Simacan | 6 |
| 200 | 147 | Simanggis | 2 |
| 201 | 148 | Simanggis | 2 |
| 202 | 149 | Simanggis I | 10 |
| 203 | 150 | Sinongko | 6 |
| 204 | 151 | Sipetit | 6 |
| 205 | 240 | Sisden | 20 |
| 206 | 241 | Sitalang | 6 |
| 207 | 152 | Siwaru | 10 |
| 208 | 153 | Siwaru | 5 |
| 209 | 154 | Siwaru | 6 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------|
| 210 | 155 | Siwaru I | 5 |
| 211 | 242 | Siwatu kiri | 192 |
| 212 | 156 | Siwinong | 36 |
| 213 | 157 | Siwurang | 4 |
| 214 | 243 | Somorejo | 12 |
| 215 | 244 | Somowono | 17 |
| 216 | 158 | Srapah | 9 |
| 217 | 159 | Sudorogo | 18 |
| 218 | 245 | Sumong | 3 |
| 219 | 160 | Tawang Sari | 38 |
| 220 | 161 | Tegal Duren | 83 |
| 221 | 162 | Tembalak Duwur | 38 |
| 222 | 163 | Tengah | 13 |
| 223 | 164 | Tepansari | 60 |
| 224 | 246 | Tilampok | 4 |
| 225 | 165 | Tlogobulu | 46 |
| 226 | 166 | Tlogoguwo | 16 |
| 227 | 167 | Tlogokotes | 9 |
| 228 | 168 | Tretes | 10 |
| 229 | 169 | Tridadi | 38 |
| 230 | 170 | Tuk Bende | 1 |

| NO | NO. DAERAH IRIGASI | DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------|
| 231 | 171 | Tuk Brondong | 30 |
| 232 | 172 | Tuk Cekal | 4 |
| 233 | 173 | Tuk Gunting | 65 |
| 234 | 174 | Tuk Guyangan | 5 |
| 235 | 175 | Tuk Kalisemo | 28 |
| 236 | 176 | Tuk Karangrejo | 10 |
| 237 | 177 | Tuk Keposong | 10 |
| 238 | 178 | Tuk Pait | 6 |
| 239 | 179 | Tuk Pekacangan | 41 |
| 240 | 247 | Tuk Siwinong | 2 |
| 241 | 180 | Tumbak Anyar | 32 |
| 242 | 181 | Watesan | 3 |
| 243 | 182 | Watugajah I | 14 |
| 244 | 183 | Watugajah II | 3 |
| 245 | 184 | Watutengah | 12 |
| 246 | 248 | Wero | 35 |
| 247 | 185 | Winong | 11 |
| 248 | 186 | Winong II | 4 |
| 249 | 249 | Wonorejo Kulon | 106 |
| 250 | 250 | Wuluh | 1 |
| | | JUMLAH | 9,470 |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina TK.I
NIP 19650905 199101 1 004

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR: 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

KAWASAN MATA AIR DI KABUPATEN PURWOREJO

| No | Nama Mata Air | Desa | Kecamatan | Debit |
|----|----------------|-------------|-----------|-------|
| 1 | Tuk Umbul | Medono | Bener | 10.10 |
| 2 | Siloko | Ngasinan | Bener | 3.00 |
| 3 | Pening | Ngasinan | Bener | 2.00 |
| 4 | Sirebut | Benowo | Bener | 10.00 |
| 5 | Tuksiwaru | Limbangan | Bener | 10.00 |
| 6 | Tuk Siwuang | Limbangan | Bener | 7.00 |
| 7 | Tuk Mudal | Kalinongko | Loano | 42.50 |
| 8 | Simbar Joyo | Mudalrejo | Loano | 27.78 |
| 9 | Sedayu / Ngrau | Sedayu | Loano | 3.40 |
| 10 | Tuk Songo | Purworejo | Purworejo | 7.00 |
| 11 | Kedungkebo | Pangenrejo | Purworejo | 4.64 |
| 12 | Simbarjoyo | Mudalrejo | Purworejo | 27.78 |
| 13 | Sekalapan | Pakem | Gebang | 1,50 |
| 14 | Tirip | Rendeng | Gebang | 1,70 |
| 15 | Siranda | Girijoyo | Pituruh | 5,00 |
| 16 | Gondosuli I | Pamriyan | Pituruh | 2,00 |
| 17 | Gondosuli II | Pamriyan | Pituruh | 3,00 |
| 18 | Sipetung | Wonosido | Pituruh | 3,00 |
| 19 | Kedondong | Kaligondang | Pituruh | 2,00 |
| 20 | Andong | Brunosari | Bruno | 3,00 |
| 21 | Siglodak | Cempedak | Bruno | 2,00 |
| 22 | Pakisarum | Pakisarum | Bruno | 1.00 |
| 23 | Plipiran | Plipiran | Bruno | 2.00 |
| 24 | Tirip | Clapar | Bagelen | 10,00 |
| 25 | Beji | Clapar | Bagelen | 5,00 |
| 26 | Kaliputat | Clapar | Bagelen | 3,00 |
| 27 | Kali Clapar | Clapar | Bagelen | 3,00 |
| 28 | Nglegok | Soko | Bagelen | 5,00 |
| 29 | Lemah Putih | Soko | Bagelen | 20,00 |
| 30 | Sipoh | Semagung | Bagelen | 5,00 |

| No | Nama Mata Air | Desa | Kecamatan | Debit |
|----|---------------|-------------|------------|-------|
| 31 | Ngaglik | Semagung | Bagelen | 4,00 |
| 32 | Sekopek | Semono | Bagelen | 4,00 |
| 33 | Karangginem | Semono | Bagelen | 4,00 |
| 34 | Gandik | Semono | Bagelen | 4,00 |
| 35 | Depok | Semono | Bagelen | 6,00 |
| 36 | Klegen | Semono | Bagelen | 3,00 |
| 37 | Belik | Piji | Bagelen | 5,00 |
| 38 | Pernolo | Kemanukan | Bagelen | 5,00 |
| 39 | Jembangan | Kemanukan | Bagelen | 3,00 |
| 40 | Bawi | Kemanukan | Bagelen | 3,00 |
| 41 | Sipucung | Kemanukan | Bagelen | 3,00 |
| 42 | Sitolang | Sokoagung | Bagelen | 2,00 |
| 43 | Pucungsawit | Sokoagung | Bagelen | 2,00 |
| 44 | Sidandang | Hargorojo | Bagelen | 10,00 |
| 45 | Curug | Sokoagung | Bagelen | 6,00 |
| 46 | Pancuran | Tlogokotes | Bagelen | 2,00 |
| 47 | Singobarong | Somorejo | Bagelen | 2,00 |
| 48 | Pletuk Kidul | Dadirejo | Bagelen | 2,00 |
| 49 | Sudorogo 1 | Sudorogo | Kaligesing | 2,00 |
| 50 | Sudorogo 2 | Sudorogo | Kaligesing | 2,00 |
| 51 | Tawang Sari 1 | Tawang Sari | Kaligesing | 3,00 |
| 52 | Tawang Sari 2 | Tawang Sari | Kaligesing | 1,00 |
| 53 | Tawang Sari 3 | Tawang Sari | Kaligesing | 1,00 |
| 54 | Tlogobulu 1 | Tlogobulu | Kaligesing | 3,00 |
| 55 | Tlogobulu 2 | Tlogobulu | Kaligesing | 1,00 |
| 56 | Purbowono 1 | Purbowono | Kaligesing | 2,00 |
| 57 | Purbowono 2 | Purbowono | Kaligesing | 3,00 |
| 58 | Purbowono 3 | Purbowono | Kaligesing | 2,00 |
| 59 | Kaliglagah | Kaliglagah | Kemiri | 2,00 |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina TK.I
NIP 19650905 199101 1 004

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR: 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN 2021-2041

KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PURWOREJO

| No | Nama | Lokasi | Klasifikasi | Konservasi** |
|----|--|---------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Situs Prasasti Kayu Arahawang | Desa Borowetan, Kec. Banyuurip | Utama | Golongan A |
| 2 | Pendopo Bupati Purworejo | Purworejo | Utama | Golongan A |
| 3 | Masjid Agung Darul Mutaqin | Purworejo | Utama | Golongan A |
| 4 | Masjid Santren | Bagelen | Utama | Golongan A |
| 5 | Gereja GPIB | Purworejo | Utama | Golongan A |
| 6 | Klentheng Thong Kwie Kiong | Purworejo | Utama | Golongan A |
| 7 | Petilasan WR Supratman | Desa Somongari, Kec. Kaligesing | Madya | Golongan B |
| 8 | SD N Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 9 | Kompleks SMA N 7 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 10 | Gereja Santa Perawan Maria | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 11 | Masjid Al Iman | Loano | Madya | Golongan B |
| 12 | Masjid Al Izhar | Kutoarjo | Madya | Golongan B |
| 13 | Masjid Kawedanan Cangkrep | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 14 | Masjid Sunan Geseng | Bagelen | Madya | Golongan B |
| 15 | Masjid Janatunaim | Butuh | Madya | Golongan B |
| 16 | Gereja Kristen Kyai Sadrach | Butuh | Madya | Golongan B |
| 17 | Masjid Tiban Jenarkidul | Purwodadi | Madya | Golongan B |
| 18 | Masjid An Nuur | Purwodadi | Madya | Golongan B |
| 19 | Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 20 | Pendopo Wakil Bupati | Kutoarjo | Madya | Golongan B |
| 21 | Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 22 | Kantor Dinas Pengairan/ Inspektorat | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 23 | Kantor Binamarga Provinsi Jawa Tengah | Kutoarjo | Madya | Golongan B |
| 24 | Kantor Camat Kutoarjo | Kutoarjo | Madya | Golongan B |
| 25 | Kantor BRIMOB Kutoarjo | Kutoarjo | Madya | Golongan B |
| 26 | Kompleks KODIM 0708 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 27 | Rumah Dinas Dandim 0708 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 28 | Rumah Dinas Kasdim 0708 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 29 | DKT Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |

| No | Nama | Lokasi | Klasifikasi | Konservasi** |
|----|--|----------------------|-------------|--------------|
| 30 | Kompleks Asrama Militer 412 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 31 | Kompleks Rumah Dinas Militer 412 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 32 | Balai Prajurit | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 33 | Andungan Air Minum Mudal | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 34 | Kantor Mesin Pompa PDAM Tuk Songo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 35 | Gardu Listrik | Purworejo & Kutoarjo | Madya | Golongan B |
| 36 | Museum Tosan Aji | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 37 | Alun-alun Kota Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 38 | Stasiun Kereta Api Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan B |
| 39 | Stasiun Kereta Api Kutoarjo | Kutoarjo | Madya | Golongan B |
| 40 | Makam Sawunggaling | Kutoarjo | Madya | Golongan B |
| 41 | Kompleks Makam Cokronagoro I, III & IV | Bulus_Purworejo | Madya | Golongan B |
| 42 | Makam Cokronegoro II | Kayulawang_Purworejo | Madya | Golongan B |
| 43 | Makam Gagak Handoko | Loano | Madya | Golongan B |
| 44 | Makam Gagak Pranolo II | | Madya | Golongan B |
| 45 | Petilasan Nyai Bagelen | Bagelen | Madya | Golongan B |
| 46 | Rumah Jend. A. Yani | Rendeng_Gebang | Madya | Golongan B |
| 47 | SMP N 4 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan C |
| 48 | SMP N 2 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan C |
| 49 | SMP N 1 Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan C |
| 50 | Gereja Kristen Jawa | Purwodadi | Madya | Golongan C |
| 51 | Beteng Kalimaro | Bagelen | Madya | Golongan C |
| 52 | Bendung Kedung Pucung | Bener | Madya | Golongan C |
| 53 | Pintu Air Baledono Selis | Purworejo | Madya | Golongan C |
| 54 | Selis Kali Jali | Kutoarjo | Madya | Golongan C |
| 55 | Jembatan Kali Jali | Bandung, Kutoarjo | Madya | Golongan C |
| 56 | Jembatan Ngandul Kali Bogowonto | Bagelen | Madya | Golongan C |
| 57 | Tugu Peringatan Pembuatan Jalan Magelang-Purworejo | Bener | Madya | Golongan C |
| 58 | Pemotongan Hewan Baledono | Purworejo | Madya | Golongan C |
| 59 | Kompleks Pertokoan Jl. A. Yani | Purworejo | Madya | Golongan C |
| 60 | Eks Hotel Indra | Purworejo | Madya | Golongan C |
| 61 | RSPD Kabupaten Purworejo | Purworejo | Madya | Golongan C |
| 62 | Hotel Puri Mandiri | Kutoarjo | Madya | Golongan C |
| 63 | Alun-alun Kota Kutoarjo | Kutoarjo | Madya | Golongan C |
| 64 | Makam Eyang Giri Cementhoko | Butuh | Madya | Golongan C |
| 65 | Makam Imam Puro | Baledono, Purworejo | Madya | Golongan C |
| 66 | Petilasan Sunan Geseng | Bagelen | Madya | Golongan C |
| 67 | Rumah Ibu Sisworo | Sindurjan, Purworejo | Madya | Golongan C |

| No | Nama | Lokasi | Klasifikasi | Konservasi** |
|----|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 68 | Rumah Bapak Pujiono | Ngupasan,
Purworejo | Madya | Golongan C |
| 69 | Rumah Dinas DPR | Ngupasan,
Purworejo | Madya | Golongan C |
| 70 | Rumah Ibu Suhardini | Dlangu, Butuh | Madya | Golongan C |
| 71 | Rumah Jenderal Panuju | Sindurjan,
Purworejo | Madya | Golongan C |
| 72 | Sumur Pinatah | Banyuurip | | |
| 73 | Prigi | Banyuurip | | |
| 74 | Masjid Banyuurip | Banyuurip | | |
| 75 | Andungan Air Minum | Keseneng,
Purworejo | Pratama | Golongan D |
| 76 | Jembatan Buh Lewung
Kali Bogowonto | Baledono, Purworejo | Pratama | Golongan D |
| 77 | Gedung Bioskop
Bagelen | Purworejo | Pratama | Golongan D |
| 78 | Eks Kantor
Transmigrasi | Purworejo | Pratama | Golongan D |

Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya lainnya adalah kawasan dan/atau bangunan cagar budaya selain yang sudah tersebut di atas, yang memenuhi kriteria cagar budaya, yaitu:

a. Bangunan Cagar Budaya

1. Umur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
2. Estetika, berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu;
3. Kejamakan, berkenaan dengan bangunan-bangunan, atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan;
4. Kelangkaan, berkenaan dengan jumlah yang terbatas dari jenis atau fungsinya, atau hanya satu-satunya di lingkungan atau wilayah tertentu;
5. Nilai Sejarah, berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Kabupaten Purworejo, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya serta nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau Daerah;
6. Memperkuat Kawasan, berkenaan dengan bangunan-bangunan dan/atau bagian kota yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya;
7. Keaslian, berkenaan dengan tingkat perubahan dari bangunan cagar budaya baik dari aspek struktur, material, tampang bangunan maupun sarana dan prasarana lingkungannya;
8. Keistimewaan, berkenaan dengan sifat istimewa dari bangunan dimaksud;
9. *Tengeran* atau *landmark* berkenaan dengan keberadaan

sebuah bangunan, baik tunggal maupun jamak dari bangunan atau lansekap yang menjadi simbol/karakter suatu tempat atau lingkungan tersebut.

- b. Lingkungan Cagar Budaya
 1. Umur, berkenaan dengan usia lingkungan terbangun, paling sedikit seusia bangunan yang telah ditetapkan atau diduga sebagai bangunan cagar budaya;
 2. Keaslian, yaitu keberadaan lingkungan cagar budaya yang masih asli, baik lengkap maupun tidak lengkap;
 3. Nilai Sejarah, berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Kabupaten Purworejo, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau daerah untuk memperkuat jati diri bangsa;
 4. Kelangkaan, berkenaan dengan tatanan tapak atau tatanan lingkungan yang jarang ditemukan;
 5. Ilmu Pengetahuan, berkenaan dengan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan cagar budaya.

Jenis Konservasi:

1. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan A
Konservasi bangunan cagar budaya Golongan A (Preservasi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;
 - b. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya;
 - c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen aslinya;
 - d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk aslinya; dan
 - e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
2. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan B
Konservasi bangunan cagar budaya Golongan B (restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bangunan dilarang dibongkar kecuali apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, sehingga dapat dilakukan pembongkaran;
 - b. dalam hal bangunan cagar budaya sudah tidak utuh lagi maka apabila dilakukan pembangunan harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar

- bagian bangunan yang masih ada;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan cagar budaya harus dilakukan tanpa mengubah tampang bangunan, warna dan detail serta ornamen bangunan;
 - d. dalam upaya restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian dalam, sepanjang tidak mengubah struktur utama bangunan; dan
 - e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
3. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan C
- Konservasi bangunan cagar budaya Golongan C (revitalisasi/adaptasi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan syarat tetap mempertahankan tampang bangunan utama termasuk warna, detail dan ornamennya;
 - b. warna, detail dan ornamen dari bagian bangunan yang diubah disesuaikan dengan arsitektur bangunan aslinya;
 - c. penambahan bangunan di dalam tapak atau persil hanya dapat dilakukan di belakang bangunan cagar budaya dan harus disesuaikan dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian tatanan tapak; dan
 - d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.
4. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan D
- a. Bangunan cagar budaya yang keberadaannya dapat membahayakan keselamatan lingkungan sekitarnya dapat dibongkar dan dapat dibangun kembali sesuai dengan aslinya dengan cara demolisi;
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan demolisi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

